



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI AIR MANIS KOTA PADANG SUMATRA BARAT**

**TESIS**



**ASRI JENITA  
1121202031**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2013**

# PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI AIR MANIS PADANG

## SUMATRA BARAT

Oleh : ASRI JENITA

(Dibawah bimbingan : Dr. ERWIN, M.Si dan RONI EKHA PUTERA, S.IP. M.AP)

### RINGKASAN

Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 10 (2) tersebut pemerintah daerah berwenang untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan setiap daerah mampu berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan pada berbagai sektor. Karena dalam prinsipnya, daerah dituntut untuk mandiri dalam menciptakan berbagai potensi daerah yang dapat diandalkan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan menurut peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata Nomor: KM.67 / UM.001 /MKP/ 2004, tentang pembangunan pariwisata adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat didaerah tujuan saat ini dengan tetap menjaga dan meningkatkan kesempatan pemenuhan kebutuhan masa yang akan datang, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dicitrakan menjadi patokan dalam pengaturan sumber daya sehingga kebutuhan ekonomi, social, dan estetika tercapai dengan tetap menjaga integritas budaya proses-proses keanekaragaman hayati. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik (Spillane, 1994 : 14). Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan objek wisata Pantai Air Manis dan kendala yang ditemui dalam pengembangan objek wisata pantai Air Manis. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk pengambilan informan dilakukan dengan cara Purposive sampling, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menggambarkan pengembangan objek pariwisata pantai Air Manis belum berjalan secara optimal. Dimana dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Padang mempunyai empat strategi dalam mengupayakan pengembangan Pantai Air Manis seperti strategi pengembangan untuk melakukan program gerakan bersama untuk mengubah perilaku masyarakat dan wisatawan, strategi pengembangan sumber daya wisata terpadu, strategi pengembangan penanaman investasi dan promosi dunia wisata, strategi pengadaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana pariwisata. Namun, didalam usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang masih terdapat beberapa kendala seperti sarana dan prasarana yang belum lengkap, masyarakat yang kurang mengerti dengan pengembangannya, serta dana yang belum cukup.

ALHAMDULILLAH

Dengan segenap ketulusan Do'a

Karya kecilku ini kupersembahkan

Sebagai embun penyejuk diantara limpahan do'a

Pengorbanan dan kasih sayang orang-orang tercinta ku...

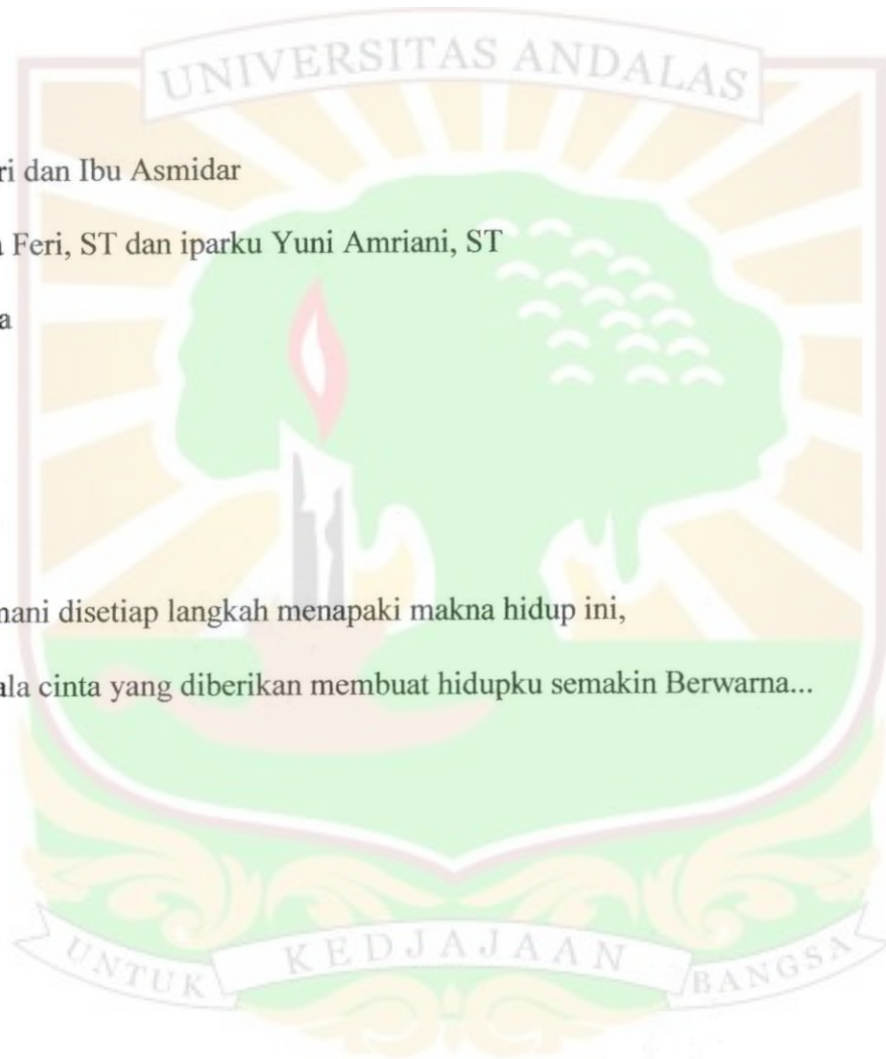
Ayah Buchari dan Ibu Asmidar

Kakak Setria Feri, ST dan iparku Yuni Amriani, ST

Nenek Nurila

Yang menemani disetiap langkah menapaki makna hidup ini,

Semoga segala cinta yang diberikan membuat hidupku semakin Berwarna...



By : Asri Jenita

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 18 oktober 1987 di Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat. Penulis anak terakhir dari 2 bersaudara Setria Feri, ST (kakak) dari Suami istri, Bapak Buchari dan Ibu Asmidar. Penulis menamatkan SD Tahun 1997 di SDN 18 Kecamatan Pauh, SMP tahun 2003 di SLTP N 21 Padang dan SMA tahun 2005 di SMA N 14 Padang. penulis memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang pada tahun 2011.

Sejak tahun 2011 penulis langsung meneruskan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Andalas di Padang.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menuliskan karya yang berjudul Pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis Kota Padang Sumatra Barat. Salawat dan salam untuk junjungan umat, Nabi Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih dan penghargaan tertinggi penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan penulis dalam menyelesaikan tesis ini:

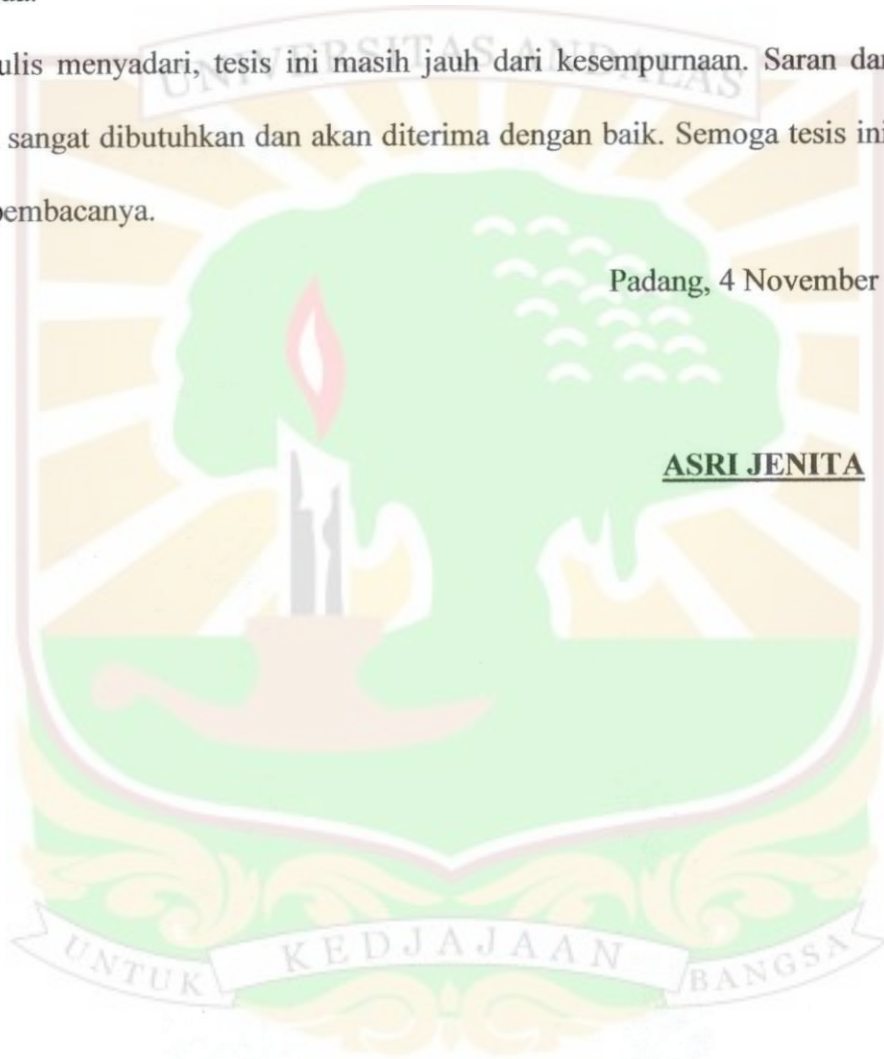
1. Bapak Prof.Dr. Syafruddin Karimi, SE,MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang
2. Bapak Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc, selaku Ketua Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Universitas Andalas Padang
3. Bapak Dr. Erwin M.Si, selaku ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Roni Ekha Putera, S.IP. MAP, selaku anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan masukan dan bantuan kepada penulis berupa tenaga, pikiran waktu serta arahan-arahan yang sangat berguna dalam penulisan Tesis ini.
4. Bapak dan Ibu dosen pada jurusan Politi Lokal dan Otonomi Daerah di Pascasarjana Universitas Andalas Padang, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu staf administrasi yang telah memfasilitasi penulis selama kuliah.
6. Kedua orang tua penulis Ayah Buchari dan Ibu Asmidar, yang telah memberikan do'a dorongan, motivasi dan waktu untuk penulis dalam penulisan Tesis ini
7. Kakakku Setria Feri, ST dan Iparku Yuni Amriani, ST yang telah memberikan do'a, dorongan dan motivasi untuk penulis dalam penulisan Tesis ini

8. Teman-teman seperjuangan POLOKDA 2011, buat kebersamaan dalam meraih satu tujuan, Efendi, Endang Fertana, Afrizal, Arham, Igusti Firmansyah, Yosep Prihatin, Andi Frenky, Rizki Syafril, Doni Gustian, Rosalita Maturini, Karima Bararah, Witma Videlta, dan Makhdum Fadli (Alm).
9. Semua keluarga, sahabat dan semua pihak yang sangat berarti bagi penulis. Terima kasih atas semua.

Penulis menyadari, tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik dari semua pihak sangat dibutuhkan dan akan diterima dengan baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pembacanya.

Padang, 4 November 2013

**ASRI JENITA**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>9</b>
2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
2.2. Pengembangan Kawasan Wisata.....	12
2.3. Pengertian Strategi.....	15
2.4. Pariwisata.....	21
2.5. Jenis Pariwisata.....	23
2.6. Sapta Pesona Wisata.....	25
2.7. Sadar Wisata.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
3.2. Lokasi penelitian.....	31
3.3. Teknik pengumpulan data.....	32
3.4. Teknik pengambilan informan.....	34
3.5. Jenis dan sumber data.....	35
3.6. Unit analisis data.....	36
3.7. Triangulasi data.....	36
3.8. Analisis data.....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1. Gambaran umum daerah penelitian.....	39
4.1.1. Keadaan Geografis Kota Padang.....	39
4.1.2. Keadaan Geografis Air Manis.....	40
4.1.3. Jumlah Penduduk Kelurahan Air Manis.....	41
4.1.4. Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan.....	41
4.1.5. Mata Pencarian Penduduk Air Manis.....	42
4.1.6. Agama Di Kelurahan Pantai Air Manis.....	43
4.1.7. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.....	43
4.2. Potensi Objek Wisata Pantai Air Manis.....	48
4.2.1. Jenis Pariwisata di Pantai Air Manis.....	48
4.2.2. Wisatawan Pantai Air Manis.....	53
4.3. Kondisi Objek Wisata Pantai Air Manis.....	56
4.3.1. Sarana dan Prasarana.....	57
4.3.2. Organisasi Pengelola Objek Wisata Pantai Air Manis	68

	4.3.3 Strategi Pengembangan Pantai Air Manis.....	72
<b>BAB V</b>	4.4. Kendala Dalam Pengembangan Pantai Air Manis.....	90
	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	5.1. Kesimpulan.....	94
	5.2. Saran.....	96
	<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Bagan 1	Kerangka Pemikiran.....	30
Bagan 2	Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.....	47
Bagan 3	Struktur Organisasi Anak Nagari Air Manis.....	69
Tabel.1	Informan dalam penelitian.....	34
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kelurahan Air Manis.....	41
Tabel 3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 4	Mata Pencarian Penduduk Air Manis.....	42
Tabel 5	Agama Di Kelurahan Air Manis.....	43
Tabel 6	Jumlah Kunjungan Wisatawan Pada Objek wisata Pantai Air Manis.....	54
Tabel 7	Daftar Penerimaan Dari Objek Wisata Pantai Air Manis	55
Tabel 8	Aspek Pengembangan Objek Wisata di Pantai Air Manis....	58
Tabel 9	Macam-macam Konsumsi Di Pantai Air Manis.....	61
Tabel 10	Tingkat Pendidikan Aparatur Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Padang.....	70
Tabel 11	Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Pembinaan Hubungan Dengan Masyarakat.....	73
Tabel 12	Program Kegiatan yang Dilakukan Pemerintah Kota Padang Tentang Pembinaan dan Pengembangan Objek .....	75
Tabel 13	Program Kegiatan Tentang Perencanaan dan Pelestarian Lingkungan.....	77
Tabel 14	Kegiatan Yang Dilakukan Pemerintah Tentang Pengembangan Rencana Strategis Pemasaran .....	79



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 10 (2) tersebut pemerintah daerah berwenang untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan setiap daerah mampu berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan pada berbagai sektor. Karena dalam prinsipnya, daerah dituntut untuk mandiri dalam menciptakan berbagai potensi daerah yang dapat diandalkan. Dengan adanya desentralisasi ke daerah sebagai harapan yang menjanjikan, maka perluasan wewenang daerah Kabupaten dan Kota melalui UU

No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana secara politis daerah memiliki kewenangan untuk menggali setiap potensi daerah. Jadi disini pemerintah daerah sebagai ujung tombak dari implementasi otonomi daerah dalam menciptakan berbagai pendapatan daerah dan harus mampu mempertahankan dan meningkatkan berbagai potensi daerah di setiap sektor. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di daerah, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Otonomi daerah juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga secara sekaligus dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Pembangunan pada prinsipnya merupakan usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah untuk memajukan modernisasi dalam rangka mensejahterakan rakyat baik secara lahir maupun batin. Dalam pembangunan terjadi suatu proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan. Disinilah peran pemerintah harus lebih jeli menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki negara, untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, karena pada dasarnya pembangunan diselenggarakan oleh rakyat bersama pemerintah. Peranan masyarakat dalam pembangunan harus ditumbuhkan, dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan, bahwa hak, kewajiban dan tanggung

jawab seluruh masyarakat, maka hasil hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan menurut peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata Nomor: KM.67 / UM.001 /MKP/ 2004, tentang pembangunan pariwisata adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat di daerah tujuan saat ini dengan tetap menjaga dan meningkatkan kesempatan pemenuhan kebutuhan masa yang akan datang, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dicitrakan menjadi patokan dalam pengaturan sumber daya sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika tercapai dengan tetap menjaga integritas budaya proses-proses keanekaragaman hayati.

Pembangunan pariwisata pada prinsipnya merupakan usaha mencapai pembangunan pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah untuk menuju modernisasi dalam rangka mensejahterakan rakyat baik secara lahir maupun batin. Dalam pembangunan terjadi suatu proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan. Disinilah peran pemerintah daerah harus lebih jeli menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki negara, untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, karena pada dasarnya pembangunan diselenggarakan oleh rakyat bersama pemerintah. Peranan masyarakat dalam pembangunan harus ditumbuhkan, dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan, bahwa hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh masyarakat, maka hasil hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik (Spillane, 1994 : 14). Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini salah satunya adalah potensi pariwisata. Perkembangan dunia pariwisata yang cukup pesat serta tipologi wisatawan yang

beragam membuat daerah tujuan wisata mulai menggeliat dengan meningkatkan sarana dan prasarana.

Sumatra Barat sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Indonesia, juga mempunyai peranan yang penting dalam hal ini wilayah yang cukup luas dan terdiri dari Kabupaten/ Kota yang mempunyai objek wisata yang bagus sehingga menjadikan Sumatra Barat menjadi tujuan wisata handalan. Lain dari pada itu Kota Padang merupakan Ibu Kota Propinsi Sumatra Barat memiliki suatu objek wisata yang menarik untuk dikunjungi.

Dalam upaya pengembangan objek wisat pantai Air Manis, pemerintah daerah harus merencanakan suatu strategi, yaitu suatu usaha atau kegiatan untuk meningkatkan fungsi wisata yang ada didaerah. Strategi tersebut dibarengi dengan penambahan dan peningkatan berbagai fasilitas yang mendukung kepariwisataan.

Pengelolaan kepariwisataan pada hakekatnya sama dengan mengelola sebuah perusahaan dengan produk tertentu. Usaha ini melibatkan juga penjual yang terdiri atas pemerintah dan para pengusaha-pengusaha di sektor kepariwisataan seperti pengusaha hotel, restoran, biro perjalanan dan lain-lain, sementara itu sebagai pelanggan atau pembeli adalah para wisatawan itu sendiri baik itu yang berasal dari mancanegara maupun nusantara. Sehingga pemerintah Kota harus melakukan suatu strategidalam meningkatkan pengelolaan objek wisata khususnya pantai air manis. Adapun visi dan misi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang adalah:

## Visi

Menjadikan Kota Padang sebagai Daerah Tujuan Wisata yang berkualitas, yang ramah lingkungan dengan tetap Menjunjung Tinggi Adat dan Budaya Minangkabau (*Adat basandi Sarak, Sarak basandi Kitabullah*)

## misi

1. Melindungi, Memulihkan dan Menata Potensi Objek Wisata yang ada melalui konsep pengembangan yang kerkesinambungan.
2. Memelihara Nilai-nilai Ajaran Agama, Adat/Istiadat dan Seni Budaya Daerah.
3. Mencari Peluang Pasar dan Investasi baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
4. Menggalang Apresiasi, Partisipasi dan Kontribusi Masyarakat Banyak terhadap Peningkatan dan Pengembangan Usaha Kepariwisataaan.

Dari visi dan misi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata tersebut terlihat begitu besar rencana pemerintah dalam mengembangkan pariwisata. Apabila dibandingkan Kota Padang dengan daerah di Indonesia yang memiliki potensi wisata yang maju seperti Bali, kota padang tidak akan jauh tertinggal, karena kota Padang juga memiliki objek wisata yang lengkap. Kota Padang memiliki beragam objek wisata yang bagus seperti objek wisata pantai, objek wisata gunung, objek wisata darat, objek wisata budaya dan wisata kuliner. Tetapi kenapa Kota Padang belum bisa menjadi kota wisata yang dapat membangun daerah dari pariwisata tersebut, seperti halnya Bali yang mana pariwisata merupakan tulang punggung dalam membangun daerahnya.

Sebenarnya kota Padang dari sektor pariwisata mampu mewujudkan pembangunan. Karena begitu banyak potensi wisata yang belum dikembangkan. Selama ini wisatawan, baik wisatawan lokal maupun asing hanya terpaku dengan kawasan wisata di daerah pantai saja, dan melupakan banyak daerah yang bukan pantai juga menarik untuk dikunjungi.

Objek Wisata Pantai Air Manis merupakan objek wisata unggulan di Kota Padang yang mempunyai cerita yang sangat terkenal dimana-mana, oleh sebab itu banyak turis mancanegara maupun wisatawan lokal yang ingin melihat langsung bukti sejarah yang masih ada pada objek wisata Pantai Air Manis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Tahun 2009-2014 dalam peraturan daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang pembangunan pariwisata menerangkan bahwa Kota Padang memiliki potensi wisata yang beragam, baik berupa wisata alam (pantai, goa, hutan, pegunungan, dan panorama alam), wisata budaya (benda dan bangunan cagar budaya, seni tradisional), wisata buatan (wisata belanja, kuliner, dan kriya yaitu sesuatu yang dapat menjadi souvenir), serta wisata bahari (pulau-pulau) yang semuanya itu dapat dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata yang menarik dan layak dikunjungi.

Kota padang memiliki potensi pariwisata yang besar tersebut akan tetap merupakan potensi apabila tidak dikelola dengan baik. Pengembangan suatu kawasan objek wisata tidak mungkin dapat diwujudkan apabila Pemerintah Kota Padang tidak melakukan langkah-langkah yang proaktif, dari sektor pariwisata. Untuk mengetahui pengembangan objek wisata pantai Air Manis, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul ***“Pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis Padang Sumatra Barat”***

## 1.2. Rumusan Masalah

Bencana gempa yang terjadi beberapa tahun terakhir yang telah menghancurkan banyak bangunan di kota Padang sehingga mengharuskan Kota Padang bangkit lagi dari keterpurukan khususnya dilihat dari bangunan kotanya. Kota Padang harus membangun lagi semua yang hancur akibat musibah gempa tersebut. Dengan demikian daerah sangat membutuhkan dana yang sangat besar, oleh sebab itu sektor pariwisata diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga dapat membantu pembangunan daerah, untuk itu penulis ingin mengetahui beberapa faktor dalam pengembangan objek wisata Pantai Air Manis.

1. Bagaimana pengelolaan objek wisata Pantai Air Manis Padang?
2. Apa kendala yang ditemui dalam pengelolaan objek pariwisata Pantai Air Manis di Kota Padang?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Mendeskripsikan pengelolaan objek wisata pantai Air Manis
2. Mengidentifikasi kendala yang ditemui dalam pengelolaan objek wisata di Pantai Air Manis.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah kota Padang mengenai pengelolaan pariwisata di Kota Padang, khususnya pada objek wisata Pantai Air Manis Padang.

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan **Ferizaldi**, lulusan Pascasarjana Universitas Andalas tahun 2010 dengan tema penelitian yaitu **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Birokrasi Dalam Meningkatkan PAD Pasca Otonomi Khusus Aceh (Studi Kasus Kota Lhokseumawe)**. Fokus penelitian ini pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja birokrasi dalam meningkatkan PAD pasca otonomi khusus Aceh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan deskriptif analisis, untuk validitas dan informen ditetapkan secara purposif sampling. Paradoks yang timbul di Kota Lhokseumawe bahwa Pendapatan Asli Daerah Kontribusinya sangat kecil terhadap Pemerintahan Daerah. Padahal potensi dan peluang untuk menambah kekayaan daerah tersebut pasca pemberian otonomi khusus terbuka lebar. Penelitian ini mencari sebab lemahnya kinerja birokrasi dalam Peningkatan Asli Daerah dengan perspektif teori strategi reformasi dari Osborne dan Plastrik.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa lemahnya kinerja birokrasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada DPKAD Kota Lhokseumawe disebabkan oleh faktor akuntabilitas yang bersifat *peternalistic management* sehingga birokrasi tidak mempunyai tanggung jawab publik selain kepada bidang tugasnya saja. Selanjutnya faktor budaya organisasi yang buruk serta ditemukan

pula faktor bekurangnya insentif yang diterima oleh para pegawai dan pejabat DPKAD. Kemudian ditentukan juga oleh faktor kekuasaan dimana Walikota selaku penanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan dan peningkatan PAD tidak menggunakan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pengendalian kinerja DPKAD Kota Lhokseumawe.

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terlihat pada fokus penelitiannya, walaupun sama-sama menekankan pada peningkatan PAD, namun situasi dan kondisi berbeda karena penelitian ini lebih menekankan pada Strategi Pemerintah Kota Padang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata, sedangkan penelitian terdahulu menekankan pada Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Birokrasi Dalam Meningkatkan PAD Pasca Otonomi Khusus Aceh (Studi Kasus Kota Lhoseumawe).

Penelitian terdahulu yang juga menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh **Rury Febrina**, lulusan Pascasarjana Universitas Andalas Padang Tahun 2010 dengan tema penelitian **Kinerja Pemerintah Kota Dumai Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pelabuhan Periode 2005-2009**.

Penelitian ini bertujuan 1) mendiskripsikan kinerja Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam penngkatkan PADdari sektor pelabuhan periode 2005-2009. 2) mengetahui faktor-factoryang mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam meningkatkan PAD dari sektor pelabuhan periode 2005-2009.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian di Kota Dumai. Unit analisis adalah lembaga. Pemilihan informen dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dan dokumentasi. Pengujian/triangularisasi data menggunakan teknik analisa deret waktu dan teknik penjodohan pola. Hasil penelitian diantaranya terdapat empat sumber penerimaan dan retribusi jasa pelabuhan bagi PAD Kota Dumai yaitu jasa labuh (PD. Pelabuhan Dumai Bersemai), jasa pas pelabuhan (PT. Pelindo), jasa tiket penumpang (Perusahaan Pelayaran), dan jasa dermaga. Dari tahun 2005-2009 terjadi peningkatan penerimaan setiap tahunnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah Kota Dumai dari sektor pelabuhan yaitu kemampuan dari institusi pelaksana yaitu Dinas Perhubungan bidang perhubungan laut diantaranya Pemerintah Kota Dumai melihat banyak permasalahan terkait pengelolaan kepelabuhan yang menunjang peningkatan PAD diantaranya yaitu pemerintah belum memiliki fasilitas yaitu pelabuhan dimana dermaga milik pemda. Selain itu kontribusi PT Pelindo masih dinilai rendah dalam meningkatkan PAD, multiplier efek yang harus diterima oleh Pemerintah Daerah terkait tingginya aktifitas di pelabuhan dumai yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan dan menyebabkan kerawanan sosial sedangkan Pemerintah Daerah tidak mendapatkan keuntungan apapun dari aktifitas yang terjadi tersebut.

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terlihat pada objek penelitiannya, penelitian ini membahas Strategi Pemerintah Kota Padang dalam mengembangkan pariwisata Pantai Air Manis, sedangkan

penelitian terdahulu lebih menekankan tentang Kinerja Pemerintah Kota Dumai Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pelabuhan.

## **2.2. Pengembangan Kawasan Wisata**

Otto Soemarwoto (1993:134) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan kegiatan kompleks menyangkut wisatawan, kegiatan, sarana- prasarana, objek dan daya tarik, fasilitas penunjang, sarana lingkungan dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam pengembangannya harus memperhatikan terbinanya mutu lingkungan. Tata letak peruntukan perlu diperhatikan untuk menghindari benturan antara kepentingan pariwisata dengan kepentingan pencagaran. Melalui zonasi yang baik keanekaragaman dapat dipelihara sehingga wisatawan atau penghujung dapat memilih rekreasi yang baik.

Dengan demikian, bahwa pengembangan sektor pariwisata didalamnya terdapat kegiatan atau usaha yang terkoordinasi untuk mengatur sesuatu yang belum ada serta memajukan atau memperbaiki bahkan meningkatkan sesuatu yang telah ada yang mencakup segi kemasyarakatan dengan melakukan mutu lingkungannya. Pada objek wisata pantai Air Manis terdapat lahan yang luas, yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah. Seperti sekarang baru saja pemerintah membuat budidaya penyu yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Dipihak lain, A.Mathieson dan G.Wall yang dikutip Merpaung (2001:107) menyatakan bahwa karakter suatu kawasan wisata yang penghuninya akan mempengaruhi kapasitas pengembangan dan pelayanan pariwisata dan akan berdampak terhadap kawasan atau komponen lingkungan yang berada disekitarnya seperti pada komponen (a)karakter sifat dan lingkungan alam, (b)

struktur pembangunan dan perkembangan ekonomi, (c) struktur sosial budaya, (d) struktur politik dan institusi dan, (e) tingkat pengembangan dan perencanaan pariwisata.

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata yaitu segala kegiatan atau usaha untuk menarik wisatawan yang menyediakan semua sarana dan prasarana baik berupa barang atau jasa dan fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan.

Menurut Yoeti (1997: 2-3), pengembangan pariwisata perlu memperhatikan beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu:

1) Wisatawan (*Tourist*)

Harus diketahui karakteristik dari wisatawan, dari negara mana mereka datang, usia, hobi, dan pada musim apa mereka melakukan perjalanan

2) Transportasi

Harus dilakukan penelitian bagaimana fasilitas transportasi yang tersedia untuk membawa wisatawan ke daerah tujuan wisata yang dituju.

3) Atraksi/obyek wisata

Atraksi dan objek wisata yang akan dijual, apakah memenuhi tiga syarat seperti: a) Apa yang dapat dilihat (*something to see*), b) Apa yang dapat dilakukan (*something to do*), c) Apa yang dapat dibeli (*something to buy*).

4) Fasilitas pelayanan

Fasilitas apa saja yang tersedia di DTW tersebut, bagaimana akomodasi perhotelan yang ada, *restaurant*, pelayanan umum seperti *Bank/moneychangers*, kantor pos, telepon yang ada di DTW tersebut.

## 5) Informasi dan promosi

Diperlukan publikasi atau promosi, kapan iklan dipasang, kemana *leaflets*/brosur disebarakan sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisata dan wisatawan cepat mengambil keputusan pariwisata di wilayahnya dan harus menjalankan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya, karena fungsi dan tugas dari organisasi pariwisata pada umumnya:

- 1) Berusaha memberikan kepuasan kepada wisatawan kedaerahannya dengan segala fasilitas dan potensi yang dimilikinya.
- 2) Melakukan koordinasi di antara bermacam-macam usaha, lembaga, instansi dan jawatan yang ada dan bertujuan untuk mengembangkan industri pariwisata.
- 3) Mengusahakan memasyarakatkan pengertian pariwisata pada orang banyak, sehingga mereka mengetahui untung dan ruginya bila pariwisata dikembangkan sebagai suatu industri.
- 4) Mengadakan program riset yang bertujuan untuk memperbaiki produk wisata dan pengembangan produk-produk baru guna dapat menguasai pasaran di waktu yang akan datang.
- 5) Merumuskan kebijakan tentang pengembangan kepariwisataan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara teratur dan berencana. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan salah satu hal utama dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut yang dimaksud dengan strategis pengembangan daya tarik wisata dalam penelitian ini adalah usaha-usaha terencana yang disusun secara sistimatis yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam usaha meningkatkan dan memperbaiki daya tarik wisata sehingga keberadaan daya tarik wisata itu lebih diminati oleh wisatawan.

### 2.3. Pengertian Strategi

Definisi Strategi adalah Rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan atau organisasi, dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan/organisasi dapat dicapai, melalui pelaksanaan yang tepat, oleh organisasi. (Glueck dan Jauech, 2004:15).

Kemudian pengertian Strategi dapat diartikan secara Umum dan secara Khusus, adalah sebagai berikut :

#### 1. Pengertian Umum

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin pemecahan yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara, atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

#### 2. Pengertian Khusus

Strategi, merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa mengikat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan dimasa depan.

Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang terjadi, terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pada

konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competences*). Perusahaan/ organisasi perlu mencari kompetensi inti dalam bisnis yang dilakukan. Strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah kedepan, yang dimaksudkan untuk membangun Visi dan Misi organisasi, menetapkan tujuan, strategis, dan keuangan perusahaan/ organisasi, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan *customer value* terbaik. Beberapa langkah untuk merumuskan strategi, yaitu :

1. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan/ organisasi dimasa depan dan menentukan misinya untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang, dan ancaman yang akan dihadapinya dalam menjalankan misinya.
3. Merumuskan faktor-faktor keberhasilan (*key succes faktore*) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
4. Menentukan tujuan, dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
5. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Dengan merujuk pada pandangan *Den Schendel dan Charles Hofer* (1985) dalam *David, Fred R.* (2004), menjelaskan ada empat tingkatan strategi yang disebut dengan *Master Strategy*, yaitu :

### 1. *Enterprise Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkontrol itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain, seperti kelompok penekan, kelompok politik, dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam *Enterprise Strategy* terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu dilakukan, sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menunjukkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam *Enterprise Strategy* kita melihat tanggapan dengan masyarakat lingkungan organisasi itu berada. Didalam hal ini yang berada diluar lingkungannya adalah masyarakat. strategi ini dapat melihat sejauh mana tingkat keterkaitan dan kerjasama dalam hal memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat, apakah adanya kerjasama yang baik yang sama menguntungkan satu sama lainnya, karena didalam masyarakat tersebut banyak lapisan-lapisan masyarakat yang butuh suatu taktik yang bagus dalam hal penyesuaian dengan mereka. Apabila kita membahas mengenai pengelolaan objek wisata , maka pemerintah harus mempunyai cara tersendiri dalam pengelolaannya

## 2. *Corporate Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut dengan *grand strategy*, yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Strategi ini melihat misi suatu organisasi tersebut, dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Padang, apakah dinas tersebut mempunyai suatu misi dalam meningkatkan pariwisata di Kota Padang agar khususnya dalam pengelolaannya.

## 3. *Business Strategy*

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran ditengah-tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi dihati para penguasa, para donor, dan sebagainya, semuanya itu untuk memperoleh keuntungan-keuntungan.

Dalam *Business Strategy* dapat dilihat apakah ada suatu cara yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam mengambil hati para petinggi yang mempunyai *power* dalam hal memajukan pariwisata.

## 4. *Functional Strategy*

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis *functional strategy* (Strategi Fungsional) yaitu :

- a. Strategi Fungsional Ekonomi, yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, yang antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.

- b. Strategi Fungsional Manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen, yakni *Planning, Organizing, Implimentating, Communicating, Decision, Making, Leading, Motivating, Refrepresentating, dan Integrating.*
- c. Strategi Isu Stratejik, fungsi utamanya adalah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungannya yang sudah diketahui, yang belum diketahui, atau yang selalu berubah.

Didalam *Functional Strategy* mencakup semua yang yang dianggap dibutuhkan dalam melihat strategi dalam pengembangan Pendapatan Asli Daerah. Dari sektor pariwisata bisa kita melihat mulai dari segi ekonomi, manajemen, dan isu-isu strateginya. Dapat kita lihat apakah dari segi ekonominya sudah baik, dan apakah dengan manajemennya sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan, dan juga dilihat dari segi strateginya sendiri apakah sudah punya strategi dalam mengelola pariwisata

Tingkat-tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat, dan menjadi isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi, kerapian administratif semata, tetapi hendaknya juga memperhitungkan soal kesehatan organisasi dari sudut Ekonomi.

Menurut Wibawa (1994) dalam tangkilisan (2001 : 20) secara sederhana tujuan dari implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Dan Samodra Wibawa juga mengatakan efektifitas implementasi kebijakan sangat

tergantung pada sejauh mana sumberdaya dan personil yang disediakan oleh sistem kebijakan memiliki jumlah dan kualitas yang memadai.

Model Googin (1990) dalam Tangkilisan melihat kebijakan dari :

1. Bentuk dan isi kebijakan, termasuk didalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi
2. Kemampuan organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun intensif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif
3. Pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecendrungan hubungan antara warga masyarakat, termasuk pola komunikasi.

Model Googin ini melihat bagaimana kemampuan organisasi terkait dalam meningkatkan pariwisata dalam hal ini yaitu Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Padang. disini juga dilihat bagaimana kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya yang ada baik berupa dana, SDA dan SDM. Dan disini juga dilihat bagaimana pendapat dari masyarakat terkait dalam mengembangkan pariwisata, apakah masyarakat dapat menerima atau menolak segala sesuatu tentang usaha dalam menegembangkan pariwisata.

#### 2.4. Pariwisata

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, menyebutkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi:

- 1) semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata,

- 2) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata seperti: kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah: keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai,
- 3) Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, konsultan pariwisata, informasi pariwisata), usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata.

Menurut para ahli bahasa, kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri atas dua suku kata, yaitu pari dan wisatawan. Pari berarti seluruh, semua dan penuh. Wisata berarti perjalanan. Dengan demikian pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan penuh, yaitu berangkat dari suatu tempat, menuju dan singgah, disuatu di beberapa tempat, dan kembali ke tempat asal semula. Menurut Prof. Hunziker dan Prof. K. Kraft, pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing disuatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal disitu untuk suatu pekerjaan yang penting memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara. Menurut Bagyonodalam Spillane (1994) Prasarana pariwisata adalah semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada wisatawan.

Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian pariwisata, antara lain Hunziker dan Kraff (Pendit, 1995:38) menyatakan pariwisata adalah sejumlah

hubungan-hubungan dan gejala-gejala yang dihasilkan dari tinggalnya orang-orang asing, asalkan tinggalnya mereka ini tidak menyebabkan timbulnya tempat tinggal serta usaha-usaha yang bersifat sementara atau permanen sebagai usahamencari kerja penuh. Sejalan dengan ahli tersebut, (Spillane, 1987:21) mengemukakan bahwa pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempatlain, bersifat sementara dilakukan secara perorangan maupun kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya juga alam dan ilmu. Pengertian pariwisata akan terus tidak tepat (*imprecise*), karena begitu banyak bisnis, pemerintah dan peneliti-peneliti terlibat didalamnya, dan juga karena perubahan cepat yang terjadi dalam pariwisata (Lunberg, Stavenga dan Krishnamoorthy, 1997).

### 2.5. Jenis Pariwisata

Seorang wisatawan mengadakan perjalanan wisata karena didorong oleh berbagai motif yang tercermin dalam berbagai macam jenis pariwisata. Bagidaerah sangat perlu mempelajari motif ini karena berhubungan dengan fasilitas yang perlu disiapkan dan program-program promosinya. Spillane (1987) membedakan jenis pariwisata, yaitu : (a) pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*). Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk mengendorkan ketegangansarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, untuk mengetahui hikayat rakyat setempat, untuk mendapatkan ketenangan

dan kedamaian didaerah luar, untuk menikmati hiburan di kota-kota besar, atau untuk ikut serta dalam keramaian pusat-pusat pariwisata, (b) Pariwisata untuk rekreasi (*recreation tourism*). Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan keletihan dan kelelahannya. Biasanya mereka tinggal selama mungkin ditempat-tempat yang dianggapnya benar-benar menjamin.

Tujuan-tujuan rekreasi tersebut (misalnya ditepi pantai, dipegunungan, dipusat-pusat peristirahatan atau pusat-pusat kesehatan) dengan tujuan menemukan kenikmatan yang diperlukan. Dengan lain mereka lebih menyukai *Health Resort*, (c) pariwisata untuk kebudayaan (*cultural tourism*), jenis ini ditandai adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat negeri lain, untuk mengunjungi monumen bersejarah, peninggalan masa lalu atau sebaliknya. Penemuan-penemuan besarmasa kini, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan, atau juga untuk ikut serta dalam festival-festival seni musik, teater rakyat, (d) pariwisata untuk olah raga (*sport tourism*). Jenis ini dibagi dua kategori: (i) *big sport events*, yaitu peristiwa-peristiwa olah raga besar seperti *olimpic games*, kejuaraan ski dunia, kejuaraan sepak bola dunia, dan lain-lain yang menarik perhatian. Tidak hanya atletnya saja, tetapi juga ribuan penonton dan penggemarnya, (ii) *sporting tourism of the practitioners*, yaitu peristiwa olah raga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri, seperti pendakian gunung, berburu, memancing, arung jeram dan lain-lain.

Negara/ daerah yang memiliki fasilitas atau tempat olah raga ini tentu dapat menarik sejumlah penggemarnya, (e)pariwisata untuk usaha dagang (*business tourism*). Menurut beberapa ahli teori, perjalanan usaha ini adalah bentuk profesional travel atau perjalanan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan. Dalam istilah *business tourism* tersirat tidak hanya *profesional trips* yang dilakukan kaum pengusaha atau industrialis.

Tetapi juga mencakup semua kunjungan ke pameran, kunjungan ke instalasi teknis yang bahkan menarik orang-orang di luar profesi ini. Juga harus diperhatikan bahwa kaum pengusaha tidak hanya bersikap dan berbuat sebagai konsumen, tetapi dalam waktu-waktu bebasnya, sering berbuat sebagai wisatawan biasa dalam pengertian sosiologis karena mengambil dan memanfaatkan keuntungan dari atraksi yang terdapat di negara lain tersebut, (f) pariwisata untuk berkonvensi (*convention tourism*). Peranan jenis pariwisata ini makin lama makin penting. Banyak negara yang menyadari besarnya potensi ekonomi dari jenis pariwisata ini sehingga mereka saling berlomba untuk menyiapkan, Sedangkan Pendit (1994:41) membagi jenis pariwisata menjadi empat belas macam yaitu: wisata budaya, wisata kesehatan, wisata olah raga, wisata komersial, wisata industri, wisata politik, wisata konvensi, wisata sosial, wisata pertanian, wisata maritim atau bahari, wisata cagar alam, wisata buru, wisata bulan madu, didirikan bangunan-bangunan yang dilengkapi dengan fasilitas khusus.

## 2.6. Sapta Pesona Wisata

Citra dan mutu pariwisata di suatu daerah atau objek wisata pada dasarnya ditentukan oleh keberhasilan dalam perwujudan Sapta Pesona daerah tersebut. Sapta pesona merupakan tujuh kondisi yang harus diwujudkan dan dibudayakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai salah satu upaya untuk memperbesar daya tarik dan daya saing pariwisata.

- 1) Keamanan, yaitu suatu kondisi dimana wisatawan dapat merasa aman, bebas dari anacaman, gangguan serta tindak kekerasan dan kejahatan pada saat berwisata tersebut
- 2) Ketertiban, yaitu kondisi yang mencerminkan suasana tertib dan teratur serta disiplin dalam semua segi, baik dalam hal lalu lintas, penggunaan fasilitas meupun dalam berbagai perilaku masyarakat lainnya.
- 3) Kebersihan, yaitu kondisi yang memperlihatkan bersih dan sehat baik keadaan lingkungan, fasilitas sarana dan prasarana, maupun manusia yang memberikan pelayanan.
- 4) Kesejukan, yaitu terciptanya suasana yang segar, sejuk dan nyaman dengan adanya penghijauan secara teratur dan indah.
- 5) Keindahan, yaitu segala kondisi yang mencerminkan penataan yang teratur, tertib, dan serasi mengenai sarana dan prasarana, penggunaan tata warna yang serasi dan selaras dengan lingkungan serta menunjukkan sifat kepribadian nasional

- 6) Keramahan, yaitu sikap dan perilaku masyarakat yang sopan dan ramah tamah dalam berkomunikasi memberikan pelayanan serta ringan tangan untuk membantu tanpa pamrih.
- 7) Kenangan, yaitu kesan yang menyenangkan dan akan selalu diingat oleh wisatawan baik berupa barang dan jasa atau kesan sendiri yang didapat selama berkunjung.

Untuk mewujudkan terlaksananya Sapta Pesona dengan baik maka perlu diadakan kebijaksanaan dalam memasyarakatkan unsur-unsur tersebut kepada semua lapisan masyarakat dan dunia usaha. Untuk itu, adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh yaitu :

1. Melaksanakan kampanye Nasional melalui berbagai media massa
2. Melaksanakan kampanye penyuluhan pemantapan citra sadar wisata melalui sapta pesona sesuai dengan tahapan dan sasaran.

## **2.8. Sadar Wisata**

Saat ini industri pariwisata merupakan industri jasa dan merupakan industri terbesar. Indonesia termasuk salah satu negara yang memanfaatkan industri pariwisata untuk menghasilkan dan meningkatkan devisa negara. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ± 17.508 pulau. Indonesia memiliki potensi kepariwisataan yang unik dan beranekaragam. Aset potensi kepariwisataan Indonesia tidak hanya memenuhi unsur keindahan, keaslian, keunikan, dan keutuhan, tetapi juga diperkaya dengan berbagai kekayaan dan keanekaragaman budaya, flora, dan fauna. Ekosistem dan gejala alam yang merupakan daya tarik

dapat dikemas menjadi objek pariwisata yang sangat menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Akan tetapi dalam pengembangan pariwisata tersebut, baik dari pihak pemerintah maupun dalam dunia usaha belum dapat mengantisipasi dampak-dampak negatif yang sering terjadi baik akibat desakan berlebihan terhadap sumber daya alam oleh adanya jumlah pendatang yang membuka usaha tanpa memprioritaskan mutu produk yang mereka jual, maupun jasa yang mereka berikan, minimnya pengertian dalam perihal teknik pengembangan pengolahan, pemeliharaan objek wisata, dan tidak dipergunakannya sistem pengawasan untuk mendeteksi kemunduran kualitas kunjungan yang berlebihan.

Salah satu penyebab terjadinya hal demikian adalah diakibatkan oleh kurangnya sadar wisata baik dikalangan masyarakat lokal, dunia usaha maupun pengunjung. Sadar wisata adalah mengerti, menghargai, dan ikut\ berpartisipasi dalam kegiatan kepariwisataan. Sadar wisata ini dimaksudkan agar masyarakat lokal, dunia usaha, dan pengunjung dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kepariwisataan dikawasan mereka. Partisipasi masyarakat atas pembangunan pariwisata akan lebih serasi bila dilandasi dengan pengertian mengenai kepariwisataan karena pengetahuan akan pariwisata akan lebih mempermudah dalam meningkatkan kesadaran wisata.

Sadar wisata dikalangan masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya hanya dengan melalui penyuluhan, akan tetapi masyarakat akan lebih mudah memahami melalui apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Proses pembangunan pariwisata harus berjalan seiring dengan peningkatan sadar wisata

masyarakat, proses penciptaannya harus sejalan dengan khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Oleh karena itu disini tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan terwujudnya sadar wisata yang didahului dengan penggalangan peran berta masyarakat dengan cara yang mudah dipahami dan dilaksanakan masyarakat.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah menciptakan kondisi atau suasana yang menunjang perwujudan saptya pesona seperti yang telah diterangkan sebelumnya yaitu antara lain:

- 1) Turut serta bersama aparat keamanan dengan saling bahu membahu menanggulangi masalah keamanan lingkungan dari hal-hal yang mengakibatkan suasana tidak aman atau menimbulkan terganggunya keselamatan orang
- 2) Turut memberikan ketertiban umum, berusaha mematuhi peraturan tata tertib baik di jalan raya maupun ditempat umum.
- 3) Membudayakan budaya hidup bersih dimanapun berada
- 4) Turut membangun program penghijauan yang dilaksanakan oleh pemerintah dimasing-masing daerah dalam mewujudkan program saptya pesona
- 5) Turut memelihara keindahan kota masing-masing

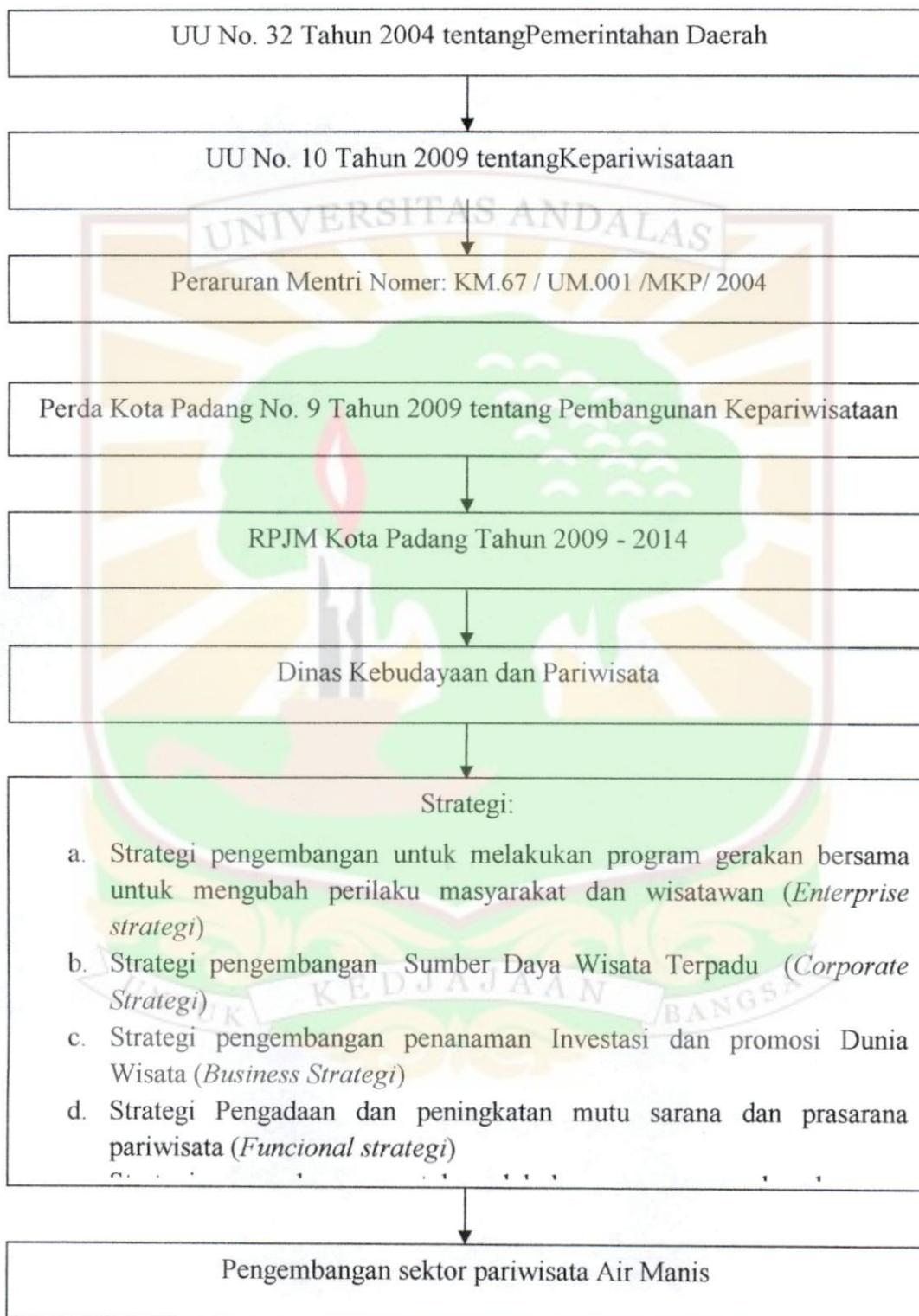
Keramahtamahan merupakan budaya bangsa yang masih tetap dijunjung tinggi dan tercermin dalam tata cara pergaulan sehari-hari, oleh karena itu hendaknya dapat terus dilestarikan dan ditampilkan secara wajar sebagai sikap tuan rumah yang baik dalam melayani wisatawan mancanegara maupun nusantara

Turut menyajikan dan memelihara suasana iklim, kesempatan dan pelayanan yang baik.

Masalah pembinaan sadar wisata merupakan suatu proses yang panjang, yakni proses pendidikan disiplin masyarakat. Lewat proses pendidikan sikap dan tingkah laku peserta didik sejara wajar secara alamiah kearah penghayatan dan pengalaman nilai dan norma yang dituntut oleh manusia modren. Hal ini sangat dituntut untuk bergaul dengan bangsa-bangsa lain didunia dan berupaya menjadi tuan rumah yang baik melalui kegiatan pariwisata.



Bagan1.KerangkaPemikiran



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini memperlihatkan bagaimana langkah-langkah peneliti dalam mencapai tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor dalam Moleong (2004 : 3) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu mencoba menggambarkan, menentukan dan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dalam suatu lingkungan sesuai dengan objek yang sedang berkembang.

Alasan pemilihan metode ini didasari oleh tujuan penelitian ini yaitu mengungkapkan strategi pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini membahas tentang Pengembangan. Jadi Lokasi penelitian ini adalah di Kota di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Sedangkan Objek wisata Pantai Air Manis terletak di Padang Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Air Manis.

Alasan peneliti mengambil penelitian tentang Pengembangan Objek Wisata Pantai Air Manis, karena peneliti melihat di Pantai Air Manis sangat layak Untuk Dikembangkan menjadi objek wisata yang berkelanjutan.

### .3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Pengumpulan data dengan melakukan :

#### 1) Wawancara langsung

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam, tidak terstruktur, bebas, terbuka. Cara ini dilakukan atas pertimbangan para informan kemungkinan merasa canggung jika wawancara dilakukan secara formal, oleh karena itu, wawancara dilakukan secara bebas yang mirip dengan diskusi. Wawancara bebas tersebut direkam dengan *tape recorder*. Meskipun demikian, pedoman wawancara tetap disiapkan secara sistematis. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu informan dipilih sendiri oleh penulis.

Pada awalnya peneliti terlebih dahulu menghubungi setiap informan dengan memberikan surat izin penelitian yang telah diperoleh dari kantor Kesbang Linmas. Tujuannya untuk memberitahu maksud dan tujuan peneliti, serta untuk mengetahui tanggapan dan kesediaan dari masing-masing informan untuk diwawancarai. Proses wawancara dilaksanakan secara langsung yang bertempat di tempat informan berada. Wawancara yang peneliti lakukan adalah untuk mendapatkan informasi dan data mengenai pengembangan Objek Wisata Pantai Air Manis Padang

## 2). Observasi

Observasi adalah metode yang mendasari semua penelitian. Apapun metode yang digunakan oleh peneliti pada berbagai situasi, selalu melibatkan observasi untuk memperoleh membantu memahami konteks penelitian. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu bidang tertentu. Melalui observasi penganalisis dapat memperoleh pandangan-pandangan mengenai apa yang sebenarnya dilakukan. Dengan melakukan observasi dilapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi, dan akan diperoleh pandangan yang holistik dan menyeluruh, akan diperoleh pengamatan langsung. Peneliti akan melihat hal-hal yang kurang/tidak diamati orang lain, peneliti akan memperoleh hak-hal yang kemungkinan tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena merugikan nama lembaga, peneliti akan menemukan hal-hal yang diluar persepsi responden sehingga peneliti akan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

## 3) Dokumentasi

Dalam hal ini penulis memperoleh data dari intruksi atau lembaga yang digunakan, informasi tersebut juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

### 3.4. Teknik Pengambilan Informan

Informan merupakan sumber informasi yang memberikan data-data yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh peneliti. Menurut Spradley dalam Sugiono (2007), informan merupakan pembicara asli (*native speaker*) yang dianggap mengetahui mengenai objek penelitian. Dalam proses penelitian ini, teknik yang digunakan dalam menentukan informan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive (*purposive sampling*), yakni dengan mempertimbangkan bahwa orang-orang yang menjadi informan dianggap benar-benar tahu serta mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga peneliti memilih informan berdasarkan beberapa kriteria yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti.

Menurut Spradley kriteria informan adalah: a) cukup lama dan intensif dengan informasi yang akan mereka berikan, b) masih terlibat penuh dengan kegiatan yang akan mereka informasikan, c) mempunyai cukup banyak waktu untuk memberikan informasi, d) mereka tidak dikondisikan ataupun direayasa dalam pemberian informasinya, dan e) mereka siap memberikan informasi dengan ragam pengalaman. Adapun informan dalam penelitian ini yang penulis ambil adalah seperti yang penulis jabarkan didalam tabel dibawah ini

Tabel 1. Informan dalam penelitian

No	Jabatan
1	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata/ stafnya 2 orang
2	Ketua ASITA (Association of The Tours and Travel Agencies)/ 1 orang
3	Warga / tokoh masyarakat 6 orang
4	Bapak Lurah Kelurahan Air Manis/ stafnya 3 orang

Penulis mengambil informan seperti yang tersebut didalam Tabel 3.4.1 tersebut karena penulis merasa yakin bahwa orang-orang tersebut mengetahui banyak mengenai Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Objek Wisata Pantai Air Manis.

### 3.5. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan aslinya berupa informasi yang berhubungan dengan : a) pengembangan objek wisata pantai Air Manis padang. b) Apa kendala yang ditemukan dalam pengembangan objek wisata pantai Air Manis

b. Data skunder

Data skunder adalah data atau informasi yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data ini biasanya diambil dari dokumen, catatan, laporan sebagai sumber penunjang yang menunjang yang mendukung penelitian ini. Data ini mencakup geografi daerah, jumlah penduduk, agama, mata pencarian, dan tingkat pendidikan. Jadi data skunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain sebagainya.

### 3.6. Unit Analisis Data

Unit analisis pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umumnya dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti objek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi tiga komponen menurut Spradly (dalam Sugiono, 2007 : 68 ) yaitu : (1) *Place*, tempat dimana interaksi dalam penelitian berlangsung, (2) *Aktor*, pelaku atau orang yang sesuai dengan objek penelitian, (3) *Activity*, kegiatan yang dilakukan *aktor* dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Unit analisis akan membantu untuk melakukan wawancara sebagai bahan dalam membuat penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Pemerintah Kota Padang dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Padang.

### 3.7. Triangulasi Data

Triangulasi menurut Moleong adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang lain diluar data tersebut. Untuk keperluan pengecekan sebagai perbandingan terhadap data itu. Beberapa macam Triangulasi ditemukan oleh Dentim yaitu Triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori (Prasetio : 2006 :178)

Dalam menguji keabsahan data, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 triangulasi.

#### 1. Triangulasi Sumber

Teknik triangulasi berdasarkan sumber berarti dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui orang-orang sumber-sumber yang berbeda-beda

## 2. Triangulasi Metode

Teknik triangulasi berdasarkan metode berarti membandingkan studi dokumenter dengan wawancara yang dilakukan dengan informan, yaitu kepala dinas pariwisata, masyarakat, dan lain-lain

Dalam menuji keabsahan data dapat kita bandingkan dengan pendapat para *Stake Holders* di bawah ini antara lain :

1. ASITA (Association of The Tours and Travel Agencies)/ Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia
2. Masyarakat yang berkunjung ke salah satu objek wisata di Kota Padang
3. Petugas lapangan
4. Pemuka Masyarakat
5. Pedagang di objek wisata

### 3.8. Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber di olah dengan analisa kualitatif. Model yang digunakan dalam analisis data adalah model interaktif seperti yang digunakan oleh Miles dan Huberman (1992 : 16-17 )dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

#### 1. Pengumpulan Data

Tahapan pertama dalam analisis data adalah melalui pengumpulan data lapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selama proses pengumpulan data tahapan analisis sebenarnya telah dimulai dengan cara membuat kesimpulan sirkuler dan terus menerus sehingga pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang lebih komprehensif.

## 2. *Reduksi Data*

Data yang dikumpulkan dalam penelitian direduksi guna menajamkan analisis dan fokus penelitian, menonjolkan hal-hal yang penting, menggolongkan data, mengarahkan data kepada tema penelitian, membuang yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna.

## 3. *Penyajian dan penafsiran data (data display and interpretation)*

Setelah data direduksi maka tahapan selanjutnya dalam analisis penelitian ini adalah penyajian data dalam bentuk uraian-uraian deskriptif mengenai tema penelitian serta penyajian tabel dan bagan yang terkait dengan tema atau permasalahan yang diteliti. Seiring dengan penyajian data akan dilakukan penafsiran data secara kualitatif.

## 4. *Penarikan kesimpulan*

Penarikan kesimpulan akhir dalam analisis data penelitian ini akan dilakukan penarikan kesimpulan secara komprehensif. Penarikan kesimpulan secara komprehensif dilakukan setelah data benar-benar telah terkumpul secara lengkap dan telah dilakukan verifikasi data.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

##### 4.1.1. Keadaan Geografis Kota Padang

Kota Padang adalah ibukota Propinsi Sumatra Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatra dan berada antara  $0^{\circ} 44' 00''$  dan  $1^{\circ} 08' 35''$  Lintang Selatan serta antara  $100^{\circ} 05' 05''$  dan  $100^{\circ} 34' 09''$  Bujur Timur. Menurut PP No. 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah  $694,96 \text{ km}^2$  atau setara dengan 1,65 persen dari luas Propinsi Sumatra Barat. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Koto Tangah yang mencapai  $232,25 \text{ km}^2$

Dari keseluruhan luas kota Padang sebagian besar atau 51,01 persen berupa hutan yang dilindungi oleh pemerintah, berupa bangunan dan pekarangan seluas  $51,08 \text{ km}^2$  atau 7,35 persen. Selain daratan pulau Sumatra, Kota Padang memiliki 19 pulau dimana yang terbesar adalah pulau Bintangur seluas 56,78 ha, kemudian pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 48,12 ha dan Pulau Toran di Kecamatan Padang Selatan seluas 33,67 ha. Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0-1853 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 km. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 302. 35 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan

17 hari per bulan pada tahun 2009. Suhu udaranya cukup tinggi yaitu antara  $21,6^{\circ}$ - $31,7^{\circ}$  C. Kelembapan berkisar antara 78-85 persen

#### 4.1.2. Keadaan Geografis Air Manis

Pantai Air Manis terletak di kecamatan Padang Selatan dengan luas wilayah  $10,03 \text{ km}^2$ , dengan Ibu Kota Mata Air. sedangkan jumlah penduduk 64,458 jiwa. Padang Selatan mempunyai tinggi dari permukaan laut yaitu 322 m. Kecamatan Padang Selatan mempunyai 12 kelurahan, objek wisata pantai Air Manis Berada di Kelurahan Air Manis. Jaraknya kurang lebih 15 km dari pusat kota Padang atau sekitar 30 menit perjalanan dengan menggunakan angkutan darat.

Gambar 2. Peta Kelurahan Air Manis



#### 4.1.3. Jumlah penduduk Kelurahan Air Manis

Berdasarkan data yang penulis dapat dari kantor Lurah Air Manis pada tahun 2013 berjumlah sebanyak 1.492 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 729 jiwa dan perempuan sebanyak 764 jiwa.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kelurahan Air Manis

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	63	37	150
2	5-9	52	71	123
3	10-14	42	35	77
4	15-19	29	20	49
5	20-24	35	22	57
6	25-29	53	92	142
7	30-34	60	103	163
8	35-39	47	41	87
9	40-44	51	35	86
10	45-49	63	88	151
11	50-54	72	80	162
12	55-59	47	41	88
13	60-64	24	38	62
14	65-69	21	23	44
15	70-74	11	15	26
16	75+	12	13	25
Jumlah Total		729	764	1492

Data Kelurahan Air Manis Tahun 2013

#### 4.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada Kelurahan Air Manis penduduknya sudah rata-rata memiliki pendidikan yang bagus, pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Penduduk yang tingkat TK berjumlah 50 orang, tingkat SD berjumlah 200 orang, tingkat SLTP berjumlah 50 orang, tingkat SLTA Berjumlah

40 orang, dan perguruan tinggi berjumlah 5 orang, dan putus sekolah berjumlah 1402.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
Tk	150
SD	200
SLTP	50
SLTA	40
Perguruan Tinggi	5
Pascasarjana	-
Putus Sekolah	982
Jumlah	1427

Sumber: Kelurahan Air Manis Tahun 2013

#### 4.1.5 Mata Pencarian Penduduk Air Manis

Penduduk Kelurahan Air Manis memiliki bermacam-macam mata pencarian. Penduduk Air Manis selain pengaguran banyak yang bekerja sebagai nelayan, karena daerah ini merupakan daerah pantai. Selain itu juga ada yang mempunyai pekerjaan selain nelayan diantaranya adalah petani, pedagang, PNS, TNI, Buruh, Swasta, dan sisanya pengaguran.

Tabel 4. Mata Pencarian Penduduk Pantai Air Manis

Jenis mata pencarian	Jumlah
Tani	25
Dagang	15
PNS	27
TNI	5
Swasta	-
Buruh	25
Nelayan	60
Pengangguran	100
Pemandu wisata	1
Wiraswasta	993
Jumlah	1251

Sumber Kantor Kelurahan Air Manis Tahun 2013

#### 4.1.6. Agama di Kelurahan Pantai Air Manis

Kelurahan Air Manis mempunyai beberapa macam agama, diantaranya Islam, Khatolik, dan Protestan. Adanya berbagai macam agama tersebut merupakan dampak dari Pantai Air Manis juga, banyaknya warga asing yang datang ke Objek Wisata Pantai Air Manis mengakibatkan adanya beberapa penduduk asli Air Manis menikah dengan wisatawan asing tersebut. Sehingga adanya bermacam agama yang masuk kewilayah Air Manis. Agama di Air Manis diantaranya adalah Islam sebanyak 1444 jiwa, Khatolik sebanyak 27 jiwa, dan Protestan 21 jiwa.

Tabel 5. Agama di Kelurahan Pantai Air Manis

Agama	Jumlah
Islam	1444
Khatolik	27
Protestan	21
Hindu	-
Budha	-
Jumlah	1492

Sumber: Kantor Kelurahan Air Manis Tahun 2013

#### 4.1.7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

##### 1) SEKRETARIAT

Sekretariat memiliki tugas pokok dan fungsi, membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam urusan umum, urusan

perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

### **Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum memiliki tugas pokok dan fungsi, membantu sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas

### **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Umum memiliki tugas pokok dan fungsi, membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanjadinas, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas

## **2) BIDANG PROGRAM DAN PENGEMBANGAN**

Bagian Program dan Pengembangan memiliki tugas pokok dan fungsi, membantu kepala dinas dibidang program danpen gembangan kebudayaan dan pariwisata serta menyusun rencana anggaran

### **Seksi Pendataan dan Perencanaan**

Seksi Pendataan dan Perencanaan memiliki tugas pokok dan fungsi, membantu kepala bidang dalam melakukan pendataan dan pengumpulan data kepariwisataan, melakukan analisis dan mengolah data statistik kebudayaan dan kepariwisataan untuk penyusunan rencana, penyiapan bahan perumusan rencana dan program kebudayaan dan pariwisata.

### **Seksi Evaluasi dan Pelaporan**

Seksi Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas pokok dan fungsi membantu kepala bidang melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas perkembangan kegiatan dinas kebudayaan dan pariwisata

### **3) BIDANG SENI DAN BUDAYA**

Bidang Seni dan Budaya memiliki tugas pokok dan fungsi membantu kepala dinas di bidang pengembangan, pembinaan dan pelestarian seni dan budaya alam Minangkabau.

#### **Seksi Pelestarian Budaya**

Seksi Pelestarian Budaya memiliki tugas pokok dan fungsi, membantu kepala bidang dalam mejalin kerjasama dengan lembaga - lembaga adat dan melakukan pengawasan serta pengembangan nilai ibudaya dalam rangka pelestarian budaya.

#### **Seksi Pembinaan Seni**

Seksi Pembinaan Seni memiliki tugas pokok dan fungsi, membantu kepala bidang dalam merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan tugas bidang seni dan budaya dalam pembinaan seni khususnya Minangkabau.

### **4) BIDANG OBJEK DAN SARANA WISATA**

Bidang Objek dan Sarana Wisata memiliki tugas pokok dan fungsi, membantu Kepala dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha dibidang pariwisata serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di objek wisata

### **Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata**

Seksi Objek dan Daya Tarik memiliki tugas pokok dan fungsi membantu kepala bidang melakukan pengawasan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang ada di objek wisata.

### **Seksi Perizinan dan Pembinaan**

Seksi Perizinan dan Pembinaan memiliki tugas pokok dan fungsi, membantu kepala bidang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha di bidang pariwisata yang meliputi usaha jasa pariwisata, perusahaan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, serta usaha pariwisata lainnya.

### **5) BIDANG PEMASARAN**

Bidang Pemasaran memiliki tugas pokok dan fungsi, membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pemasaran kepariwisataan yang mencakup penjualan produk - produk wisata kota Padang, bekerja sama dengan pelaku-pelaku wisata dan industri pariwisata serta memberikan pelayanan informasi kepada wisatawan yang datang ke kota padang baik wisatawan nusantara maupun wisatawan luar negeri.

### **Seksi Promosi dan Kerjasama**

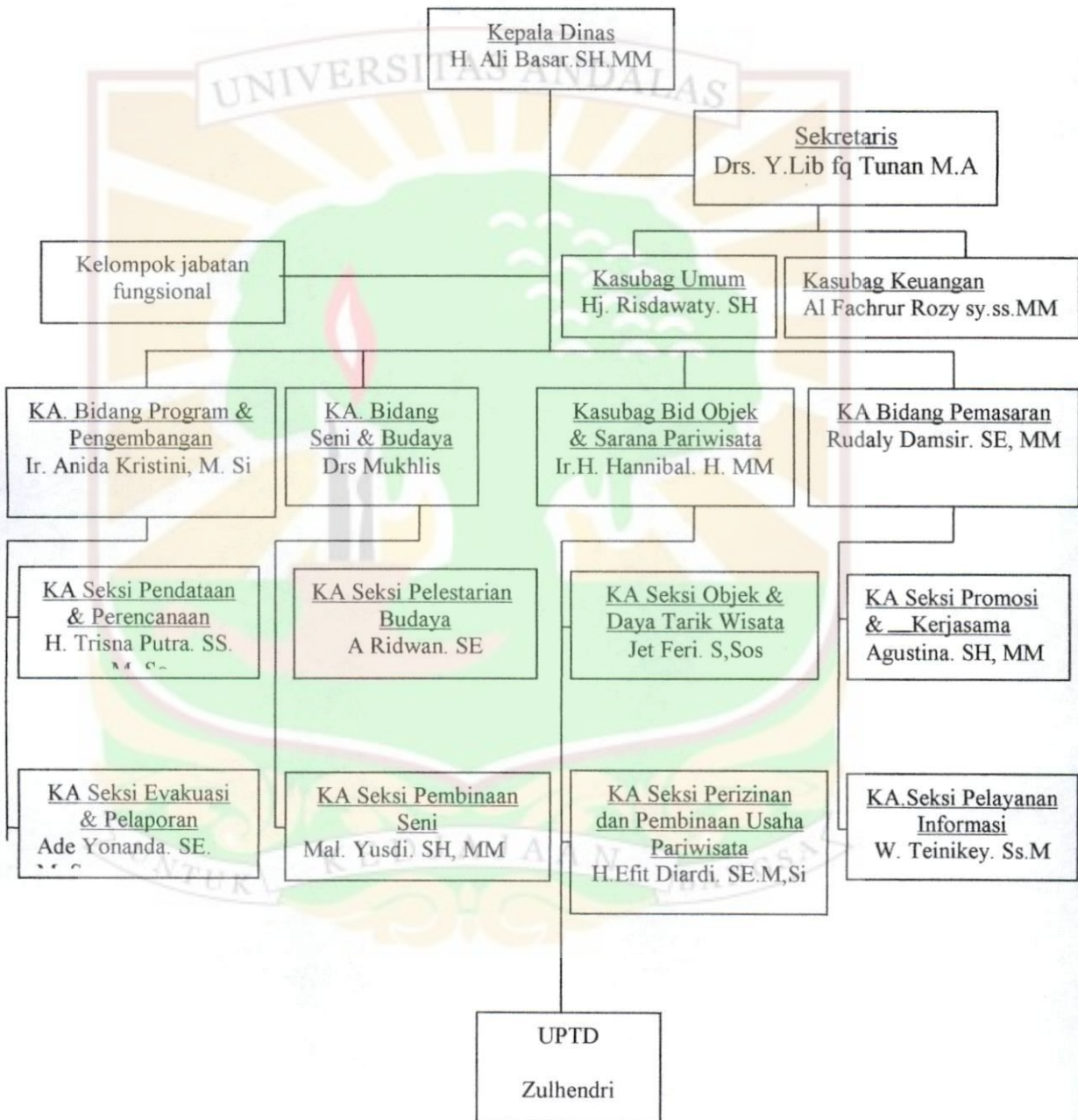
Seksi Promosi dan Kerjasama memiliki tugas pokok dan fungsi, membantu kepala bidang melaksanakan kegiatan secara sistematis untuk promosi wisata dan kerjasama.

### **Seksi Pelayanan Informasi**

Seksi Pelayanan Informasi memiliki tugas pokok dan fungsi, membantu kepala bidang mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan

serta pengembangan pelayanan dan informasi kepada wisatawan, masyarakat dan pelaku wisata serta institusi lain yang membutuhkan

Bagan 2. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Padang



## 4.2. Potensi Objek Wisata Pantai Air Manis

### 4.2.1 Jenis Wisata Pantai Air Manis

Menurut Jamaris (1991: 1) objek wisata berdasarkan sifatnya terbagi tiga yaitu:

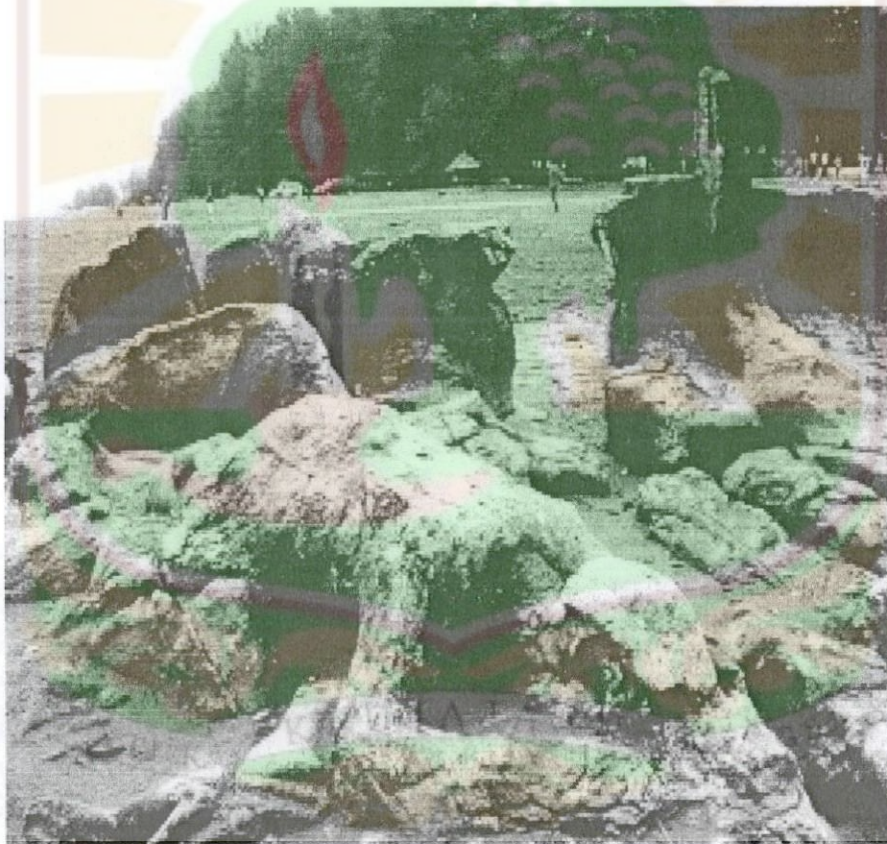
- 1) Objek wisata alam yaitu objek wisata yang benar-benar belum dibentuk oleh kreatifitas tangan manusia misalnya, pantai, air terjun, danau, pegunungan, sungai, dan lain-lain
- 2) Objek wisata budaya yaitu objek wisata yang mengandung usaha budaya misalnya peninggalan-peninggalan sejarah atau tata cara budaya rakyat
- 3) Objek wisata alam budaya atau artifisial yaitu objek wisata yang dimodifikasi dengan kreatifitas tangan manusia agar lebih menarik, seperti taman raya, dan sebagainya.

Berdasarkan sifatnya objek wisata pantai Air Manis dapat dikategorikan sebagai wisata budaya dan wisata alam karena disamping alamnya yang indah juga terdapat batu malin kundang yang merupakan legenda masyarakat minang kabau. Sebagaimana dapat dijelaskan berikut ini:

#### a. Wisata Budaya

Pantai air manis dimana didalamnya terdapat batu malin kundang termasuk kedalam kategori wisata budaya karena batu malin kundang merupakan legenda masyarakat minang kabau yang terkenal baik secara nasional maupun internasional.

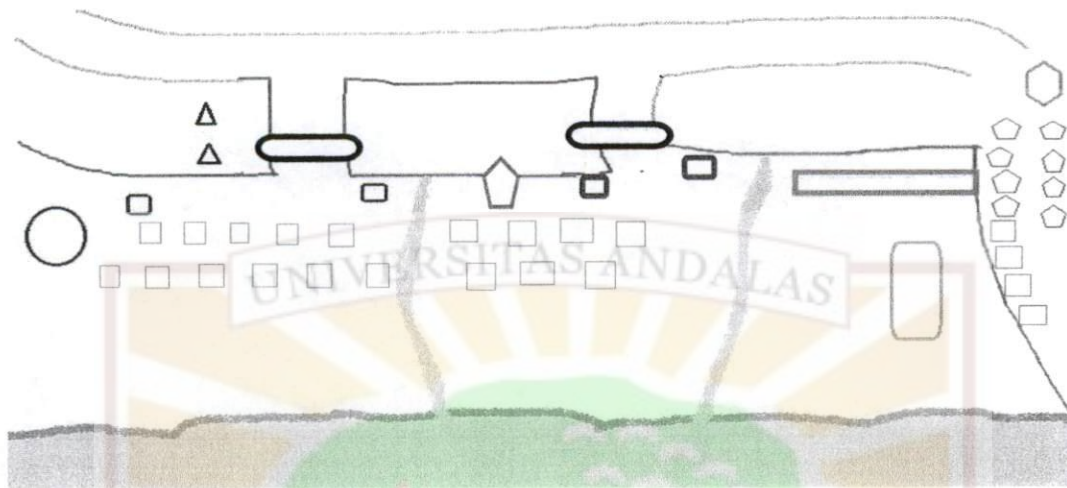
bersama-sama dengan kapalnya, setelah durhaka kepada ibunya. Ditepi pantai, terdapat batu Malin Kundang dan beberapa perlengkapan kapalnya, yang juga berubah menjadi batu. Berdasarkan cerita, Malin Kundang dikutuk oleh ibunya karena menolak untuk mengakui ibunya setelah bepergian ke daerah lain dan menjadi kaya. Setiap pengunjung yang datang ke Pantai Air Manis, kawasan batu Malin Kundang menjadi tempat pertama yang disambangi.



Gambar 3. Batu Malin Kundang

Batu Malin Kundang berlokasi di kelurahan Air Manis, kecamatan Padang selatan. Tepatnya terletak di bagian ujung sebelah kiri Pantai Air Manis. Sebagaimana nampak dalam denah lokasi berikut ini

Gambar 4. Denah Lokasi



Keterangan :

- |   |                                   |   |                            |   |                                |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------------|
| ○ | Tempat Penangkaran Penyu          | ◻ | Kawasan Batu Malin Kundang | ◻ | Gerbang Masuk Pantai Air Manis |
| △ | Kantor pelayanan dinas Pariwisata | ◻ | Kios Souvenir              |   |                                |
| ◻ | WC Umum                           | ◻ | Jembatan                   |   |                                |
| ◻ | Kios Makanan                      | ◻ | Homstay                    |   |                                |

Kondisi batu Malin Kundang saat ini sangat memprihatinkan, dapat kita lihat pada gambar 2, Batu Malin Kundang sudah banyak terkikis oleh air. Dalam rangka untuk menjaga objek wisata batu malin kundang Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Padang akan merenovasi Batu Malin Kundang pada tahun 2013 ini, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah), namun program ini sampai dengan peneliti turun kelapangan bulan september tahun 2013 belum terealisasi.

#### b. Wisata Alam

namun program ini sampai dengan peneliti turun kelapangan bulan september tahun 2013 belum terealisasi.

#### **b. Wisata Alam**

Objek wisata alam adalah ciri khas suatu tempat yang ditunjang oleh keadaan alam suatu daerah. Kokasih (1987 :3) menerangkan objek wisata alam adalah suatu tempat dimana kita dapat bergembira, bersenang-senang tanpa gangguan pihak dalam batasan pemandangan alam (pantai, air terjun, danau, dan pegunungan). Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pantai Air Manis termasuk kedalam objek wisata alam.

Pantai Air Manis adalah tempat wisata favorit bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing karena memiliki gelombang yang rendah dan pemandangan indah Gunung Padang. Ada juga sebuah pulau kecil bernama Pisang Kecil. Kita bisa berjalan kaki ke pulau yang memiliki luas satu hektar ini melalui air dangkal.

Keindahan pantai air manis juga diakui oleh Ketua ASITA Sumbar dengan melihat potensi wisatawan yang datang baik domestik maupun mancanegara, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

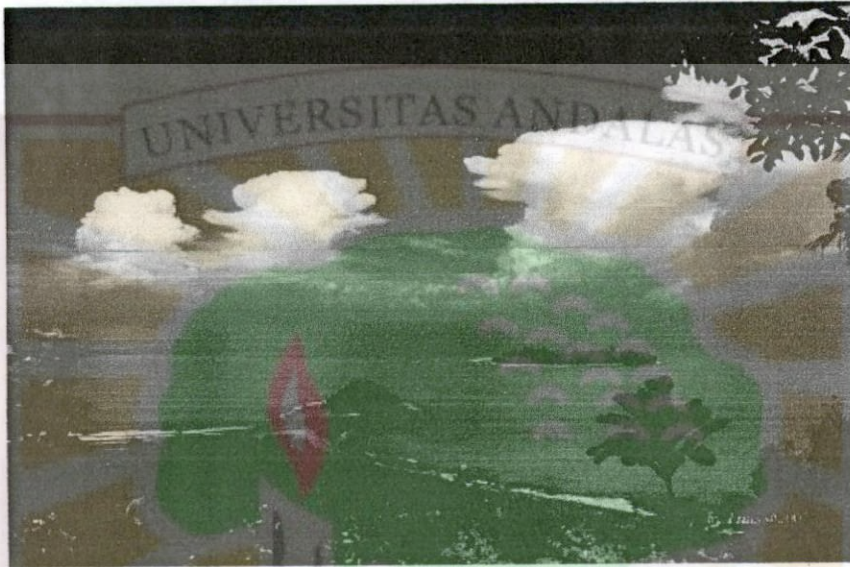
*“Air manis sangat berpotensi sekali untuk wisatawan Dalam negeri dan ASEAN. Dari wisatawan domestik maupun ASEAN rata-rata 90 persen ingin berkunjung kembali ke Pantai Air Manis”*

Hal senada juga diungkapkan oleh pengunjung atau wisatawan yang datang ke pantai air manis berikut ini:

*“Kami sangat senang berada dipantai Air Manis ini. Kami menikmati sekali keindahan pantai Air Manis yang sangat luar biasa ini. Kami sering datang kesini bersama rombongan”*

handalan di Sumatra Barat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wisatawan yang berkunjung ke pantai air manis, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7.

Keindahan Pantai Air Manis dapat kita lihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4. Pemandangan Pantai Air Manis

Untuk menikmati keindahan pantai air manis pengunjung dapat memulai perjalanan ke Pulau Pisang Kecil diseberang pantai dengan berjalan kaki kurang dari 500 meter, karena kedalaman air di antara Pantai Air Manis dan Pulau Pisang Kecil memang tidak terlalu dalam, kedalamannya sekitar 40 cm sehingga bisa ditempuh dengan berjalan kaki, dan ada juga sebagian masyarakat sekitar yang menyewakan perahu kecil untuk menyeberang ke pulau pisang. Hal ini dapat dilakukan sebelum pukul 16.00 WIB, karena apabila sudah lewat dari pukul 16.00 WIB, air pantai biasanya mulai pasang dan air pantai mulai meninggi, maka pengunjung disarankan agar kembali sebelum waktunya.

#### 4.2.2 Wisatawan Pantai Air Manis

#### 4.2.2 Wisatawan Pantai Air Manis

Wisatawan (*Tourist*) menurut Yoeti (1996: 53) adalah Pengunjung yang datang keobjek wisata dengan tujuan untuk menikmati objek wisata ditempat tujuannya. Wisatawan yang datang berkunjung keobjek wisata pantai air manis akan merasa puas setelah menyaksikan keindahan alam dan batu malin kundang yang terdapat di air manis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu meri salah seorang wisatawan yang berkunjung ke pantai air manis.

*“saya sangat kagum dengan keindahan pantai air manis. Apalagi ditambah dengan adanya batu malin kundang. Kami sering membawa keluarga untuk bermain ke pantai air manis ini.*

Pendapat ibu Meri senada dengan pendapat yang diungkapkan oleh Ira yang merupakan wisatawan yang berkunjung ke pantai air manis sebagai berikut.

*“Saya bersama teman-teman sering datang berkunjung kepantai air manis ini, karena keindahan nya yang sangat luar biasa dan juga bisa melihaat batu malin kundang, disini kita juga dapat menikmati makanan-makanan sambil menikmati suasana pantai.*

Ditambah lagi oleh pendapat Ibu Dian yang mengatakan seperti brikut ini.

*“saya bersama keluarga sering mengunjungi pantai air manis ini, selain keindahan alam pantainya dan juga adanya batu malin kundang, pantai air manis udaranya sejuk tidak terlalu panas, sehingga saya sering membawa keluarga saya untuk bermain kesini”*

Dari beberapa pendapat wisatawan diatas dapat kita simpulkan bahwa pantai air manis adalah tempat wisata yang banyak diminati oleh wisatawan. Disamping keindahan alamnya yang bagus, ditambah dengan adanya batu malin kundang yang banyak dikagumi wisatawan. Kawasan objek wisata pantai air manis selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan.

Tabel 6. Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Pantai Air Manis Tahun 2008-2012

No	Tahun	Jumlah Wisatawan
1	2008	2.902
2	2009	2.702
3	2010	2.613
4	2011	7.193
5	2012	20.929

*Sumber: Diolah dari data realisasi retribusi objek wisata kota padang*

Dari tabel.6 dapat dilihat dalam lima tahun terakhir 2008-2012. Pada tahun 2008 jumlah pengunjung yang datang ke pantai air manis sebanyak 2.902 orang, 2009 sebanyak 2.707 orang dan tahun 2010 sebanyak 2.613 orang. Berdasarkan uraian diatas kunjungan wisatawan yang berkunjung ke pantai air manis mengalami penurunan yang disebabkan adanya gempa bumi yang melanda Kota Padang.

Untuk tahun 2011 terjadi peningkatan jumlah pengunjung dari tahun sebelumnya sebanyak 4.580 orang dimana pada tahun 2010 berjumlah 2.613 orang naik menjadi 7.193 orang, dan pada tahun 2012 terjadi kenaikan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2011 hanya 7.193 orang menjadi 20.929 orang pada tahun 2012, dengan kenaikan sebanyak 13.736 orang pengunjung.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan dari tahun 2008 sampai 2012 terjadi ketidak merataan. Pada Tahun 2010 terjadinya penurunan jumlah pengunjung, ini disebabkan karena bencana gempa yang melanda kota Padang. dan pada Tahun 2011 jumlah kunjungan wisatawan sudah

mulai meningkat lagi, ini disebabkan rasa trauma terhadap gempa sudah mulai hilang.

Berdasarkan data diatas dapat pula kita lihat penerimaan dari objek wisata pantai Air Manis padang seperti berikut ini

Tabel 7. Daftar penerimaan dari objek wisata Pantai Air Manis Dari Tahun 2008-2012

No	Tahun	Target Pendapatan	Pendapatan Akhir Tahun
1	2008	11,184,000	14,511,000
2	2009	13,500,000	13,509,000
3	2010	18,000,000	13,062,500
4	2011	40,000,000	35,967,000
5	2012	85,000,000	104,647,000

*Sumber: Diolah dari data realisasi retribusi objek wisata kota padang*

Dari tabel 8 tersebut dapat kita lihat bahwa pendapatan akhir tahun jarang yang mencukupi dari target yang direncanakan. Pada tabel diatas pada tahun 2008 pendapatan akhir tahun melebihi dari target yang direncanakan, dan pada tahun 2009 pendapatan juga melebihi dari target yang di anggarkan, tetapi pada tahun 2010 dengan 2011 pendapatan jauh dibawah target yang rencanakan, sedangkan pada tahun 2012 pendapatan sangat jauh lebih tinggi dari target yang sudah dianggarkan.

Ada beberapa jenis pola kunjungan wisatawan di objek wisata Pantai Air Manis adalah sebagai berikut:

- 1) Perorangan, bisa terdiri dari satu dan dua kebanyakan menggunakan sepeda motor

- 2) Keluarga kecil, biasanya terdiri dari empat dan lima orang dengan menggunakan mobil sedan
- 3) Keluarga besar atau rombongan, biasanya terdiri dari sembilan sampai lima belas orang, biasanya menggunakan mobil L300.
- 4) Rombongan besar biasanya terdiri dari dua puluh, tiga puluh atau empat puluh dengan menggunakan kendaraan bus atau truk

Berdasarkan hasil wawancara dengan wisatawan dan pengamatan penulis di pantai air manis, aktifitas pengunjung dapat dibagi kedalam beberapa bagian yaitu:

- 1) Ingin menikmati pemandangan alam dan suasana pantai Air Manis
- 2) Ingin melihat batu Malin Kundang
- 3) Ingin makan dengan suasana pantai
- 4) Ingin mandi dilaut
- 5) membawa tamu atau teman

Aktivitas pengunjung mulai dirasakan ramai pada jam 10.00 WIB (hari minggu dan hari-hari besar), jam 12.00 WIB (hari-hari biasa) yang berakhir pada jam 18.00 atau 19.00 WIB. Wisatawan yang berkunjung ke objek wisata pantai Air Manis kebanyakan adalah muda-mudi yang berumur 35 tahun ke bawah. Kebanyakan dari mereka yang datang kesana adalah dengan tujuan untuk pacaran. Tidak seberapa kita temui pengunjung diatas umur 35 tahun.

#### 4.3. Kondisi Objek Wisata Air Manis

Pengembangan sektor pariwisata didalamnya terdapat kegiatan atau usaha yang terkoordinasi untuk mengatur sesuatu yang belum ada serta memajukan atau memperbaiki bahkan meningkatkan sesuatu yang telah ada yang mencakup segi kemasyarakatan dengan melakukan mutu lingkungannya. Yoeti (1996: 13) menyatakan perlunya pengembangan pariwisata atau objek wisata sebagai berikut

- 1) Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu diperhitungkan keuntungan dan manfaatnya bagi rakyat banyak.
- 2) Pengembangan pariwisata lebih bersifat non ekonomis sebab motivasi utama wisatawan mengunjungi suatu kawasan objek wisata adalah untuk menyaksikan dan melihat keindahan-keindahan alam daerah yang dikunjungi.
- 3) Untuk menghilangkan kepicikan berfikir, mengurangi salah pengertian dan mengetahui tingkah laku wisatawan yang datang berkunjung terutama bagi masyarakat didaerah tujuan wisata yang bersangkutan.

Adanya suatu objek wisata Pantai Air Manis ini merupakan anugrah yang tidak ternilai harganya bagi daerah setempat. Objek wisata dapat membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat, dan dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat. Bahkan dengan adanya objek wisata ini dapat menambah devisa negara. Untuk melihat pengembangan pantai air manis tentunya tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang ada, sehingga dengan mengetahui sarana dan prasarana yang ada akan mudah menentukan strategi pengembangannya.

### 4.3.1. Sarana Prasarana

#### a. Sarana

Sarana menurut Yoeti (1997) adalah fasilitas yang secara langsung dibutuhkan wisatawan di daerah tujuan wisata, baik berupa produk maupun jasa seperti sarana angkutan, restoran, sarana akomodasi, dan lain-lain. Adapun sarana yang terdapat pada pantai air manis dapat dilihat dalam Tabel 8.

Tabel 8. Aspek Pengembangan Objek wisata dipantai Air Manis

No	Sarana dan prasarana	Jumlah	Rute	Jenis	Keterangan
1	Transportasi - Angkutan umum	3	Pasar raya- Air Manis Simpang kantor camat padang selatan. Simpang koto kaciak mata air- kelurahan air manis	Mobil	2 kali sehari
	- Ojek	17		Motor	Dari pagi sampai jam 10 malam
2	Akomodasi	0			-Punya palfy george 2 kamar -punya Rini 2 kamar
	-Hotel -Homstey	2			
3	Komunikasi			-telkomsel -XL	-
4	Konsumsi -Rumah Makan	2			Spesifik ikan bakar menjual pmie rebus, pop mie, soto, lontong, sate,
	-Warung	42			
5	Tempat ibadah				
	-Mesjid -Musholla	1 -			
6	WC umum	4			2 unit berfungsi dan 2 unit tidak berfungsi
7	Tempat sampah	-	-	-	Tidak ada
8	Energi -listrik				Ada
9	Keamanan				Ada
10	Toko cendramata	3			Menjual pernak- pernik dari terumbu karang

Dari tabel diatas dapat diketahui sarana yang terdapat pada pantai air manis adalah sebagai berikut :

### 1. Transportasi

Sarana transportasi yang lancar dapat memudahkan wisatawan untuk datang ke Objek wisata dan juga akan berpengaruh terhadap kunjungan. Sarana transportasi merupakan salah satu sarana terpenting yang dapat meningkatkan minat wisatawan. Sarana transportasi yang terdapat pada objek wisata pantai Air Manis adalah angkutan umum dan ojek. Angkutan umum pada objek wisata pantai Air Manis berjumlah sebanyak 3 (tiga) unit. Sarana angkutan umum pada objek wisata pantai Air manis mempunyai rute dari Pasar Raya ke Air Manis, yang beroperasi 2 kali sehari pagi jam 06.00 Wib dan sore jam 18.00 Wib, sedangkan untuk tarif angkutan umum dari pasar raya ke air manis adalah untuk umum sebanyak Rp.5000 (lima ribu rupiah), sedangkan tarif angkutan umum untuk anak sekolah adalah sebanyak Rp.3000 (tiga ribu rupiah).

Sarana transportasi ojek juga dapat digunakan untuk mengunjungi pantai air manis dengan rute yang dilalui melalui jalan dari simpang Koto Kaciak terus menuju jalan raya air manis, adapun biaya untuk sewa ojek bagi masyarakat umum sebesar Rp.6.000 (enam ribu rupiah) perorang, dan biaya sewa ojek untuk anak sekolah sebesar Rp.3000 (tiga ribu rupiah) perorang.

### 2. Sarana akomodasi

Sarana akomodasi pada suatu objek wisata menjadi salah satu faktor penunjang bagi wisatawan. Bila akomodasinya lengkap dan memuaskan maka wisatawan akan betah tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata. Wisatawan yang

biasanya menginap di tempat penginapan seperti homestay biasanya wisatawan mancanegara.

Hasil dari wawancara dan pengamatan penulis yang ditemui dilokasi objek wisata pantai Air Manis, terdapat 2 (dua) buah penginapan diantaranya adalah milik Palfy George (om blex), dan milik Uni Reni. Penginapan milik Om Blex ini mempunyai 2 buah kamar, biaya sewa untuk satu malam ditempat Om Blex ini adalah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), rata-rata lama wisatawan menginap di penginapan Om Blex ini paling lama 2 (dua) minggu. Dan dipenginapan ditempat uni Reni juga mempunyai 2 (dua) kamar, dengan biaya sewa untuk satu kamar adalah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).Di penginapan ini wisatawan yang menginap setiap bulannya rata-rata berjumlah 2 orang, dengan lama tinggal satu minggu.

### 3. Komunikasi

Sarana komunikasi sangat diperlukan di daerah pengembangan pariwisata. Dengan tersedianya sarana komunikasi dapat memudahkan wisatawan dalam mendapatkan berbagai informasi untuk kebutuhan berwisata. Di pantai air manis sudah terdapat jaringan telepon seluler baik BUMN maupun yang dibangun pihak swasta yaitu Telkomsel dan XL.

### 4. Konsumsi

Konsumsi juga merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi wisatawan. Dengan adanya konsumsi yang lengkap disuatu kawasan objek wisata, maka wisatawan yang datang berkunjung akan merasa betah untuk lebih lama untuk menikmati menu yang tersedia di lokasi tempat wisata sambil menikmati

indahny pemandangan pantai air manis. Berikut ini dapat penulis gambarkan menu-menu yang terdapat di warung-warung makanan yang ada di pantai air manis dalam Tabel 9.

Tabel 9. Macam-macam Konsumsi di Pantai Air Manis

No	Jenis konsumsi	Harga
1	Nasi, ikan bakar, rendang padang, gulai kepala ikan, dll	Rp. 18.000,-
2	Mie rebus/ mie goreng	Rp. 10.000,-
3	Lontong gulai	Rp. 7.000,-
4	Pop mie	Rp. 6.500
5	Soto ayam, soto daging	Rp. 12.000,-
6	Sate ayam, lokan, daging	Rp. 12.000,-
7	Es kelapa muda, es campur dan minuman siap saji lainnya.	Rp. 5.000-10.000,-

Berdasarkan Tabel 9. Pantai air manis terdapat 2 rumah makan, dan 42 warung yang menjual makanan seperti mie rebus, mie siap saji, soto, lontong, es kelapa muda dengan harga makanan yang terjangkau, mulai dari harga Rp. 6.500,- sampai dengan Rp. 18.000,-. Dan untuk minumannya mulai dari harga Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 10.000,-.

#### 5. Tempat ibadah

Tempat ibadah juga disediakan di kawasan pantai air manis, tempat ibadah yang ditemukan di kawasan pantai Air Manis hanya 1 (satu) buah yaitu mesjid Ar-Raudah. Mesjid Ar-Raudah terletak agak jauh dari pantai Air Manis kira-kira sekitar 200 (meter) dari Pantai Air Manis, wisatawan yang beragama islam bisa kemesjid ini dengan berjalan kaki.

#### 6. WC umum

WC merupakan sarana yang mendukung pada suatu objek wisata yang mempunyai banyak fungsi bagi wisatawan, selain untuk tempat membuang Air, WC juga digunakan sebagai tempat untuk mengganti pakaian apabila mereka mandi dilaut. Pada objek wisata pantai Air Manis penulis menemukan 4 (empat) unit WC yang mana cuma 2 (unit) WC yang berfungsi, yang 2 (dua) unit yang lain tidak berfungsi lagi. 2 (dua) unit WC yang berfungsi tersebut itupun disediakan oleh masyarakat setempat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8. Dan bagi pengunjung yang menggunakan fasilitas WC umum dikenakan biaya Rp. 2.000,-

#### 7. Tempat sampah

Sampah merupakan salah satu masalah yang akan timbul dari sebuah Aktivitas, dalam hal ini aktivitas wisata. Pada suatu kawasan wisata tempat sampah sangat dibutuhkan sekali, karena dengan disediakannya tempat sampah maka tidak akan ada sampah yang berserakan. Pada objek wisata Pantai Air Manis tempat sampah yang tersedia masih minim sekali, namun kios atau warung ada juga ada yang menyediakannya secara swadaya. Oleh karena itu dikawasan pantai Air Manis masih ditemukan sampah yang bertumpuk dan telah membusuk.

#### 8. Energi

Sumber daya listrik yang tersedia di Kelurahan Air Manis sehari-hari dimanfaatkan oleh penduduk setempat berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sejauh ini sumber daya listrik tersebut sudah didistribusikan dengan baik dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat disamping untuk memenuhi kebutuhan

rumah tangga sendiri, juga telah dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan wisatawan khususnya khususnya bagi wisatawan yang mengiap di homstay penduduk

#### 9. Toko cendramata

Wisatawan yang berkunjung ke suatu tempat objek wisata biasanya membawa oleh-oleh sebagai cendramata dan ketersediaan toko cendramata menjadi suatu kebutuhan. Dipantai air manis terdapat 3 buah toko cendramata yang menyediakan berbagai oleh-oleh, diantaranya terumbu karang, pernak-pernik kerajinan yang terbuat dari kerang laut, lokan laut, siput laut dan lain-lain. Wisatawan dapat membeli oleh-oleh khas laut pantai Air Manis. Pedagang yang menjual terumbu karang tersebut pada umumnya adalah masyarakat asli di pantai air manis tersebut. Harga terumbu karang dan pernak pernik dari binatang laut tersebut bervariasi, harganya dimulai dari Rp. 10.000 sampai dengan Rp 50.000. Banyak juga wisatawan yang berminat membeli cendramata yang disediakan dipantai air manis tersebut. Wisatawan yang membeli cendramata tersebut kebanyakan berasal dari luar kota padang, Pedagang cendramata dipantai air manis tersebut rata-rata meraih keuntungan sebesar Rp 3.000.000/ bulan.

#### 10. Keamanan

Keamanan merupakan suatu faktor penting untuk menarik wisatawan berkunjung. Sesuai informasi dari informan di lapangan keamanan di pantai air manis dua tahun terakhir ini sudah membaik. Dua tahun sebelumnya memang terjadi satu kasus pemerkosaan terhadap pengunjung. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan sebagai berikut :

“Masalah keamanan di pantai air manis sekarang ini memang sudah lebih baik, dulu beberapa tahun yang lalu memang pernah terjadi pemerkosaan terhadap pengunjung, paling-paling sekarang masih ditemukan pengompasan.”

Hasil wawancara diatas menunjukkan keamanan objek wisata air manis relatif sudah mulai membaik namun masih juga ditemukan kekerasan pengompasan yang dilakukan oleh pemuda terhadap pengunjung.

#### **b. Prasarana.**

Prasarana menurut Yoeti (1997) semua fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian berjalan lancar sehingga dapat memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wistawan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang beraneka ragam. Dari penelitian yang dilakukan pada objek wisata Pantai Air Manis masih banyak terdapat prasarana yang masih belum memadai dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang datang berkunjung diantaranya adalah

##### **1. Jalan**

Jalan merupakan sarana terpenting bagi suatu objek wisata. Dikelurahan Air Manis ini dapat dilihat jalan menuju keobjek wisata tersebut jalannya kecil sehingga susah untuk dimasuki truk-truk dan juga susah bagi kendaraan roda empat untuk berselisih. Seperti yang diterangkan oleh Bapak ketua ASITA kota Padang :

*“jalan menuju keobjek wisata Pantai Air Manis sangat kecil, sehingga apabila kita melakukan perbaikan dipantai Air Manis, truk-truk besar*

*yang mengangkut pasir susah untuk memasuki daerah tersebut karena jalannya kecil*

Jalan yang layak sangat dibutuhkan sekali untuk mengembangkan objek wisata. Karena jalan merupakan sarana penghubung yang dapat melancarkan proses transportasi, dengan adanya proses transportasi yang lancar maka akan memudahkan dalam mengembangkan suatu kawasan wisata.

Untuk menuju Pantai Air manis dapat juga ditempuh melalui jembatan SitiNurbaya yang membentang diatas Sungai Batang Arau menuju bukit Gado-gado atau disebut juga Bukit Padang atau Gunung Padang. Jalan ini hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor atau jalan kaki ,sebab dari Bukit Padang menuju Pantai Air Manis belum bisa dilalui oleh kendaran roda empat (mobil). Dinamakan Jembatan SitiNurbaya karena di Bukit Padang ini terdapat makam Siti Nurbaya sebagaimana diceritakan dalam novel SitiNurbaya karangan Marah Rusli. Perjalanan ke Pantai Air Manis melalui jalur *tracking* diatas bukit dari Bukit Padang ini sangat mengasyikkan karena kita dapa menikmati pemandangan alam yang mempesona. Di kiri jalur terdapat hutan yang masih belum terambah, sedangkan di sebelah kanan adalah jurang dengan laut biru menghampar di bawahnya. Dari jauh sudah bisa kelihatan Pantai Air Manis dengan Pulau Pisang yang indah. Jarak tempuh perjalanan dari Gunung Padang kePantai Air Manis melalui jalan ini diperkirakan sekitar 5 Km atau sekitar 2 jam perjalanan dengan berjalan kaki dengan ketinggian bukit yang dilalui sekitar 500 meter diatas permukaan laut.

## 2. Tempat parkir

Tempat parkir merupakan salah satu fasilitas pendukung pariwisata yang tidak kalah penting dibandingkan dengan fasilitas lainnya. Diareal parkir kendaraan yang terdapat pada Pantai Air Manis belum terdapat tempat parkir yang memadai. Tempat parkir kendaraan pada objek wisata Pantai Air belum tertata rapi, penulis temukan parkir kendaraan yang berserakan. Padahal setiap orang yang masuk ke daerah pantai Air Manis tersebut membayar uang parkir, tetapi tempat parkir tidak disediakan dengan layak. Kendaraan roda dua dan roda empat bercampur. Dimana-mana terdapat kendaraan yang terparkir. Seperti yang diterangkan oleh wisatawan pantai Air Manis

## 3. Kebersihan

Kebersihan merupakan salah satu yang dapat menarik minat wisatawan dalam berkunjung ke objek wisata. Pada objek Wisata Pantai Air Manis penulis melihat kebersihan sangat kurang terjaga sekali. Disana kita temukan sampah yang bertebaran dimana-mana. Sampah tersebut telah membusuk, sehingga kalau kesana kita mencium bau busuk disepanjang pantai Air Manis tersebut. Menurut penelitian yang sudah penulis lakukan dalam masalah sampah, pemerintah sudah menugaskan tiga orang masyarakat disana dalam memungut sampah-sampah yang terbawa ombak. Seperti keterangan masyarakat pantai Air Manis yang diwawancarai pada tanggal 29 juli 2013 yang mengatakan :

*“pemerintah sudah menunjuk tiga orang yang bertugas memungut sampah-sampah yang berserak disepanjang pantai Air Manis ini. petugas tersebut digaji sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) oleh pemerintah. Petugas tersebut tidak rutin melakukannya, mereka merasa gaji sebesar tersebut tadi terlalu kecil, sehingga mereka tidak setiap hari memungut sampah-sampah tersebut”*

Pendapat warga Air Manis diatas sesuai dengan yang disampaikan pendapat yang disampaikan oleh Bapak KA Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha Pariwisata:

*“Masalah sampah kami sudah menunjuk tiga orang masyarakat disana yang bertugas untuk mengumpulkan sampah, dengan biaya Rp 500.000/ bulan. Saya rasa biaya sebanyak sudah cukup untuk upah memungut sampah, karena dalam memungut sampah tidak dibutuhkan waktu dari pagi sampai sore. Paling waktu yang dibutuhkan hanya 1 jam dipagi hari dan 1 jam lagi disore hari.*

Pemerintah sudah menunjuk tiga orang warga sebagai petugas memungut sampah-sampah di pantai Air Manis dengan gaji sebesar Rp 500.000/ bulan dan sekarang sudah tidak lagi, karena petugas tersebut merasa gajinya terlalu kecil sehingga sampah-sampah sekarang tidak dipungut lagi. Padahal bapak KA Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha Pariwisata mengatakan gaji Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah besar, karena menurut beliau kerjanya tidak menghabiskan waktu sehari penuh, paling-paling satu jam di pagi hari, dan satu jam disore hari, sampai sekarang belum ada penyelesaiannya.

Jadi dapat disimpulkan kebersihan dipantai Air Manis terutama masalah sampah belum terjaga dengan baik, padahal kebersihan suatu objek wisata adalah penunjang kunjungan wisatawan untuk berwisata. Dengan adanya lingkungan objek wisata yang bersih maka wisatawan akan merasa betah untuk berlam-lama menikmati keindahan yang dimiliki oleh suatu objek wisata tersebut. Tetapi sebaliknya apabila ditemukan lingkungan wisata yang tidak bersih maka wisatawan tidak akan datang kembali mengunjungi objek wisata tersebut.

#### 4.3.2. Organisasi Pengelola Pantai Air Manis

Menurut James D. Mooney, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya organisasi dalam mengelola pariwisata maka usaha pengembangan suatu objek wisata akan dapat berjalan dengan baik. Pengembangan suatu objek wisata sangat ditentukan oleh kemampuan dari pihak-pihak pengelola wisata daerah yang bersangkutan dengan kata lain berhasil atau tidaknya suatu daerah dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata ditentukan oleh pihak pengelola yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

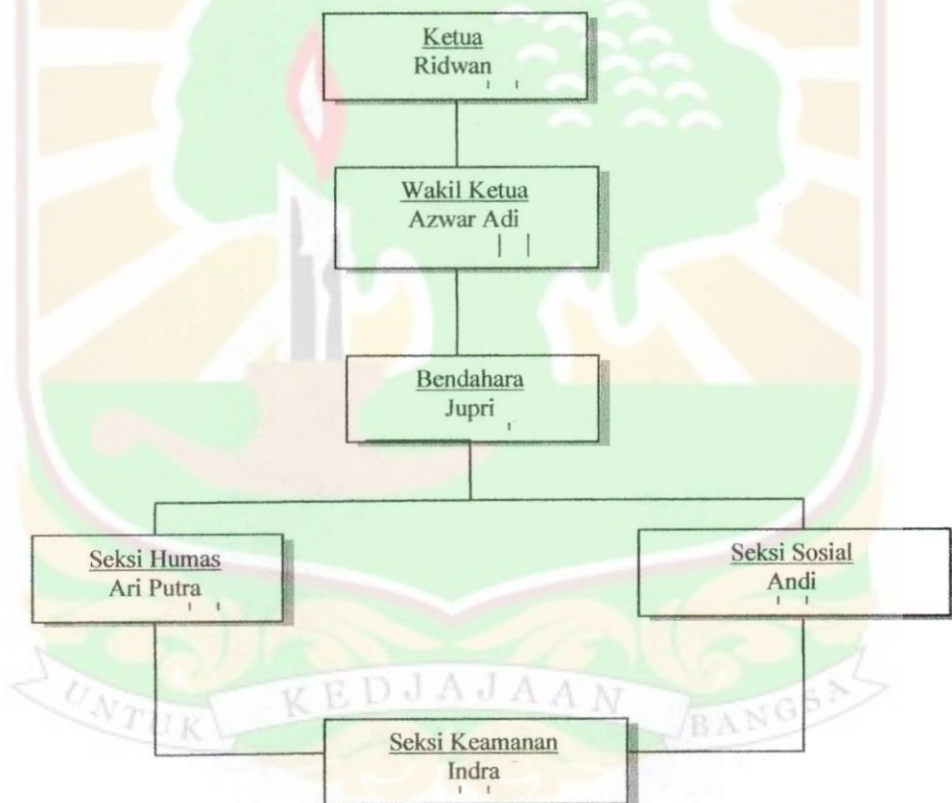
Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pada objek wisata pantai Air Manis ditemukan adanya sebuah organisasi yang dibentuk oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Padang bersama dengan masyarakat setempat. Organisasi tersebut dikelola oleh masyarakat setempat dan diberi nama “**anak nagari Air Manis**”. Adapun tujuan dibentuknya organisasi ini adalah agar tercitanya tujuh unsur sapta pesona dilingkungan objek wisata tersebut. Ketujuh unsur sapta pesona tersebut antara lain keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan.

Kelompok organisasi anak nagari air manis ini dipimpin oleh Bapak Ridwan sebagai ketua, Bapak Azwar Adi sebagai wakil ketua dan, Bapak Jupri sebagai bendahara. Mereka bertiga ini diangkat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Padang, mereka dapat diangkat karena mereka dahulunya merupakan pemilik wilayah pantai Air Manis. Sedangkan anggota dari kelompok anak nagari ini adalah para pemuda Air Manis yang belum mempunyai pekerjaan yang tetap.

Kelompok organisasi anak nagari Air Manis ini terdiri dari 17 kelompok, yang mana perkelompok mempunyai anggota sebanyak 5 atau 6 orang. Setiap tahunnya anggota kelompok ini lebur dan dipilih lagi secara acak oleh ketua kelompok. Sehingga semua anggota anak nagari air manis mempunyai kesempatan untuk saling bekerjasama didalam kelompok mereka natinya.

Struktur organisasi anak nagari Air Manis ini dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Bagan. 3 Struktur organisasi “anak nagari Air Manis”



Tugas masing-masing jabatan antara lain ketua bertugas mengendalikan semua anggota organisasinya, agar semua pekerjaan dalam pengelolaan obek wisata, dan setiap minggu ketua ini harus mengontrol pekerjaan anggotanya. Wakil ketua mempunyai tugas yang sama dengan ketua, dan apabila ketua ada keperluan lain maka wakil ketua harus menggantikannya. Bendahara bertugas mengumpulkan uang yang didapat dari sewa parkir dan sewa warung. Seksi hubungan masyarakat bertugas menjaga hubungan antar anggota dan menjaga hubungan dengan masyarakat supaya tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan. Seksi social, mempunyai tugas mengatur apabila ada yang harus diberi bantuan baik kemasyarakat maupun anggota organisasi, sedangkan seksi keamanan bertugas menjaga keamanan di lingkungan objek wisata bersama-sama dengan anggota organisasi.

Dalam pembagian tugasnya kelompok anak nagari Air Manis tersebut bertugas dua kelompok untuk setiap minggunya (hari senin sampai hari minggu). Keduas kelompok anak nagari Air Manis tersebut harus mengkoordinir semua bentuk kegiatan pada objek wisata pantain Air Manis. Adapun tugas Anak nagari Air Manis tersebut dapat dirincikan sebagai berikut ini:

- 1) Menjaga gerbang pertama dan gerbang kedua dengan memungut karcis masuk
- 2) Mengatur parkir mobil dan motor dengan memungut uang parkir
- 3) Meminta uang harian dari sewa warung dipantai air manis
- 4) Menjaga keamanan dilingkungan objek wisata

- 5) Menjaga keamanan dari bahaya laut (kecelakaan laut) pada hari senin sampai hari jumat. Sedangkan dihari sabtu dan hari minggu keamanan laut dari kecelakaan laut dijaga oleh dua orang anggota AIRUT.

Anggota kelompok anak nagari Air Manis tersebut harus mempunyai keberanian yang tinggi, sebab mereka harus siap siaga apabila ada kecelakaan dilaut, dan apabila ada terjadi kecelakaan dilaut mereka wajib menolong sesuai batas kemampuan mereka, setelah itu mereka harus secepatnya melaporkan kejadian ke AIRUT.

Setiap minggu kedua kelompok yang bertugas harus menyetorkan hasil pendapatannya ke bendahara anak nagari Air. yang mana pendapatan yang diperoleh adalah dari sewa warung dan uang parkir. Tetapi uang parkir hanya diambil setengah dari pendapatan jasa parkir, setengahnya lagi masuk ke kas kelompok anak nagari Air manis. sedangkan uang hasil sewa warung diambil semuanya untuk gaji anggota kelompok anak nagari Air Manis. Uang kas yang terkumpul mereka pergunakan apabila nantinya mengadakan acara seperti perayaan HUT RI, penyambutan tahun baru, dan acara-acara yang lain-lain.

Setelah pendapatan dari objek wisata pantai Air Manis diterima oleh bendahara anak nagari Air Manis maka bendahara tersebut harus menyetorkan juga ke bendahara penerima di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang dan setelah itu baru disetorkan ke rekening kas daerah.

Dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan warga Air Manis maka pengembangan objek wisata pantai Air Manis dapat berjalan dengan baik sehingga ketujuh unsur sapata pesona tersebut dapat terwujud, tetapi

dalam pengelolaan ditemukannya pungutan-pungutan liar yang seharusnya tidak ada.

Dari penelitian yang dilakukan dapat dikatakan pengelolaan objek wisata Air Manis oleh anak nagari Air Manis belum berjalan dengan baik, masih ditemukan pungutan-pungutan liar dilokasi objek wisata. Seperti sewaktu kita mau menyeberang diatas jembatan kita harus membayar ke anak kecil yang berdiri dipangkal jembatan, alasan mereka meminta adalah untuk pembangunan jembatan padahal jembatan dari tahun ketahun tidak ada kelihatan direnovasi.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dilapangan bahwa dipantai Air Manis tidak terdapat pemandu wisata. Hal tersebut juga diterangkan oleh kepala perizinan dan pembinaan usaha pariwisata yang mengatakan sebagai berikut

*“dipantai air manis tidak diperlukan pemandu wisata, karena dipantai air manis tidak terlalu banyak tempat yang tersembunyi. Saya rasa semua wisatawan yang datang ke objek wisata pantai air manis akan langsung mengetahui posisi batu malinkundang.*

Menurut informasi dari kepala perizinan dan pembinaan usaha pariwisata kota Padang bahwa dipantai Air Manis tidak diperlukan pemandu wisata, karena di objek wisata pantai air manis tersebut tidak terlalu banyak tempat yang harus dikunjungi oleh wisatawan, paling kawasan batu malin kundang yang pertama dikunjunginya. Wisatawan akan langsung mengetahui dimana posisi batu malinkundang.

#### **4.3.3. Strategi Pengembangan Pantai Air Manis**

Pengembangan suatu objek wisata bukan merupakan hal yang tidak mudah karena dalam suatu pengembangan dibutuhkanlah kerjasama yang kuat. Disini dapat kita lihat bahwa kerjasama dalam pengembangan objek wisata antara lain

adalah kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, tanpa adanya kerjasama yang baik antara ketiga *stake holders* tersebut maka pengembangan objek wisata tidak akan berjalan dengan lancar.

Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pengembangan pariwisata yang diiringi dengan regulasinya tentunya. Kemudian pihak swasta yang secara professional menyediakan jasa pelayanan bagi pengembangan pariwisata tersebut, maka tugas masyarakat adalah selain senantiasa membangkitkan kesadaran tentang pentingnya pariwisata juga menumbuhkan kreativitas yang melahirkan berbagai kreasi segar yang mengundang perhatian untuk kemudian menjadi daya pikat pariwisata.

Seperti yang penulis temukan dilapangan dan akan penulis uraikan satu persatu

### **1. Pemerintah**

Didalam usaha pengembangan objek wisata pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar sekali, karena tanpa adanya dorongan dari pemerintah setempat maka pembangunan tidak akan terlaksana dengan sendirinya. Adapun program-program dalam pengembangan pariwisata Kota Padang adalah

- 1) Program pengembangan rencana strategis pemasaran kawasan pariwisata
- 2) Program pengembangan sumber daya manusia
- 3) Program kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan hubungan masyarakat
- 4) Program pembinaan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata
- 5) Program perencanaan dan pelestarian lingkungan

6) Program pembangunan sarana pariwisata

Pengembangan pariwisata tersebut erat kaitannya dengan visi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata kota Padang, bahwa menjadikan kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang berkualitas, yang menjunjung tinggi adat dan budaya Minangkabau (*Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah*). Visi tersebut sangat cocok sekali untuk menerangkan kota Padang yang mempunyai beragam objek wisata. Beragam objek wisata itu antara lain objek wisata alam, objek wisata budaya dan objek wisata alam budaya atau artifisial. Pantai air manis termasuk ke objek wisata alam (alam pantai Air Manis) dan objek wisata budaya (batu Malin Kundang). Dalam pengembangan objek wisata sangat ditentukan sekali oleh kemampuan dari pihak-pihak pengelola pariwisata daerah yang bersangkutan, dengan kata lain berhasil atau tidaknya suatu daerah dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata ditentukan oleh pihak pengelola dan sikap masyarakat (Yoeti 1996: 123)

Untuk meningkatkan hasil produk wisata yang baik dituntut adanya pengelola dan pelaksana yang profesional dalam mengembangkan pariwisata, dengan kata lain tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait. Adapun kiat-kiat yang dapat dilakukan adalah seperti dibawah ini

***a. Strategi Pengembangan Untuk Melakukan Program Gerakan Bersama Untuk Mengubah Perilaku Masyarakat dan Wisatawan***

Disini adanya *Enterprise strategi* yang mana disini ada dua program pemerintah yaitu

### 1. Program Pengembangan sumber daya manusia

Meningkatkan Kualitas SDM di semua tingkatan dan semua bidang sebagai ujung tombak untuk mensukseskan pembangunan pariwisata

Langkah yang dilakukan antara lain:

- a) Meningkatnya kualitas profesionalisme aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata usaha bidang pariwisata.
- b) Meningkatnya pengetahuan pelaku pariwisata dalam rangka pengembangan kreatifitas dalam melihat peluang.
- c) Meningkatnya skil tenaga kerja pariwisata dalam rangka peningkatan pelayanan dan produktifitas dalam lingkup kerja masing-masing individu masyarakat.
- d) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan pariwisata bagi perkembangan ekonomi, sosial dan budaya.
- e) Meningkatnya inisiatif dan upaya pelaku pariwisata dalam menggali dan mengembangkan potensi wisata

Tabel 10. Tingkat Pendidikan Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang

No	Jenjang Pendidikan	Persentase	Keterangan
1	SMA	5%	-
2	D3	0 %	-
3	S1	28 %	-
4	S2	67 %	-
5	S3	0 %	-

Berdasarkan tabel diatas dapat penulis analisis bahwa tingkat SDM di kantor aparatur dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, menunjukan SDM

yang bagus, hal ini dibuktikan dengan 18 aparatur dimana terdapat strata dua (S2) berjumlah 12 orang, sedangkan strata satu (S1) berjumlah 5 orang. Ini menunjukkan tingkat kemampuan aparatur tersebut dalam pengembangan pariwisata dikota padang khususnya di Pantai Air Manis dapat dikelola dengan baik. Hal ini juga dilakukan dalam peningkatan kualitas SDM, dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Priwisata Kota Padang dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut para aparaturnya melakukan studi banding ke daerah yang mempunyai pariwisata yang berkembang sukses, studi banding tersebut dilakukan setiap tahun. Seperti yang diterangkan oleh kepala seksi perizinan dan usaha pariwisata berikut ini:

*"kami setiap tahunnya melakukan studi banding kedaerah-daerah yang bisa menjadi panutan dalam pengembangan objek wisata. Tujuannya agar mendapat pengetahuan yang baru dibidang pariwisata.*

Pada tahun 2011 program pengembangan Sumber Daya Manusia dana yang dialokasikan sebesar Rp.11.840.400 (dapat dilihat pada DPA), tapi dapat dilihat hasil yang dicapai belum adanya pengembangan pariwisata yang sukses dikota padang ini. Padahal objek wisata dikota Padang ini tidak kalah indahnya dari pariwisata yang terdapat didaerah lain. Berarti pemerintah kota Padang belum berhasil mengembangkan ilmu yang didapat dari hasil studi bandingnya.

## **2. Program kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan hubungan masyarakat**

Dalam pengembangan pariwisata perilaku masyarakat sangat penting, dengan adanya perilaku positif dari masyarakat maka akan berdampak positif bagi dunia pariwisata umumnya dan objek wisata Pantai Air Manis khususnya.

Sehingga pihak terkait perlu diajak untuk terus berpartisipasi dalam mendukung program-program paket wisata yang ada.

Yoeti, 1997:123 mengatakan pengembangan objek wisata sangat ditentukan oleh kemampuan dari pihak-pihak pengelola wisata daerah setempat dengan kata lain berhasil atau tidaknya suatu daerah dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata ditentukan oleh pihak-pihak pengelola dan sikap masyarakat. dalam pengembangan objek wisata masyarakat merupakan lingkungan terdekat yang dapat mewujudkan pembangunan objek wisata.

Keterlibatan masyarakat bertujuan untuk membantu memberdayakan sumber daya masyarakat dengan memberikan peluang pekerjaan atau membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, menghindari munculnya konflik kepentingan antara masyarakat lokal dengan pihak pengembang daya tarik wisata, kesenjangan sosial, dan eksploitasi sumber daya alam dan budaya-budaya masyarakat lokal secara berlebihan. Hal ini merupakan upaya baik yang dilakukan agar kehidupan masyarakat lokal kesejahteraannya.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam hal pembangunan objek wisata yang terdapat didaerahnya maka masyarakat akan merasa bertanggung jawab dalam usaha yang dapat dilakukakannya. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala seksi pembinaan dan perizinan usaha pariwisata kota Padang menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sudah ada, tetapi kadang-kadang masih saja masyarakat berperilaku kurang baik terhadap wisatawan.

Berikut ini merupakan usaha-usaha dapat dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata, dalam hal mensukseskan program pemerintah

tentang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan hubungan masyarakat dalam usaha pengembangan objek wisata khususnya objek wisata Pantai Air Manis.

Tabel 11. kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan hubungan masyarakat.

No	Kegiatan	Ada	Tidak	keterangan
1	Memberikan pelayanan serta penerangan kepada masyarakat di bidang kepariwisataan		✓	-
2	Merencanakan, membina, melaksanakan bimbingan masyarakat, pariwisata dan hubungan masyarakat		✓	-
3	Mengadakan rutinitas penyuluhan setiap bulan		✓	-
4	Mengadakan penyuluhan tentang sapta pesona wisata		✓	-

Dalam usaha kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan hubungan masyarakat dapat dilakukan berbagai macam kegiatan seperti yang siterangkan pada tabel 12s. Kegiatan pada tabel diatas sangat berpengaruh sekali terhadap usaha pengembangan pariwisata. Pada objek wisata pantai Air Manis pemerintah belum ada melakukan kegiatan tersebut.

Sikap masyarakat yang saat ini terjadi di kawasan objek wisata pantai Air Manis adalah masih lemahnya kesadaran akan sapta pesona. Sapta pesona merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan pariwisata. Apabila pelaksanaan sapta pesona berjalan baik, maka para pengunjung akan merasa nyaman dan betah berada dikawasan objek wisata. Masyarakat yang tinggal

disekitar objek wisata memegang peranan besar dalam dalam pelaksanaan sapta pesona seperti : keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, keramah-tamahan atau atraksi wisata. Sapta pesona merupakan suatu komponen yang harus ada dalam setiap objek wisata karena dapat mempengaruhi minat wistawan yang datang.

Program pengembangan sumber daya manusia dapat dilaksanakan dengan cara memberi pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya sapta pesona pariwisata. Sikap masyarakat yang ramah, sopan, dan santun terhadap wisatawan sangat diperlukan sekali dalam rangka membangun suatu objek wisata. Tetapi pada kenyataannya, dikawasan objek wisata Pantai Air Manis masih ditemukan perilaku masyarakat yang kurang menyenangkan

#### ***b. Strategi Pengembangan Sumber Daya Wisata Terpadu***

Strategi ini berkaitan dengan *Corporate Strategi* yaitu adanya suatu misi organisasi, yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Didalam strategi pengembangan sumber daya wisata terpadu merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pengelola wisata dalam melakukan keterpaduan objek wisata yang akan menjadikan para wisatawan tidak hanya kesatu objek wisata saja tetapi juga berkunjung ke objek-objek wisata sekitarnya sehingga wisatawan merasakan pengalaman yang berbeda-beda.

Dalam hal ini pemerintah Kota Padang membuat dua bentuk program dalam pelaksanaan starategi pengembangan Sumber Daya Manusia :

- 1. Program pembinaan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata**

Dalam melakukan pengembangan Pemerintah Daerah dan instansi terkait hendaknya tidak hanya mengembangkan objek wisata pokok saja tetapi juga mengembangkan arena-arena wisata yang mungkin dapat menunjang peningkatan kualitas objek wisata utama. Seperti yang diterangkan oleh Bapak Ketua ASITA Sumbar bahwa:

*“pada objek wisata Pantai Air Manis dapat diadakan atraksi-atraksi wisata yang dapat menghibur wisatawan yang berkunjung kesana. Seperti permainan anak nagari contohnya tokoh lele, takraw, tarik tambang, bola voli, dan lain sebagainya.”*

Dalam program pembinaan dan daya tarik objek wisata pada Tahun 2011 dana yang teralokasikan sebesar Rp.913.671.295 (lebih jelasnya dapat dilihat pada DPA tahun 2011). Untuk mensukseskan *Program pembinaan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata* pemerintah sudah melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah seperti diterangkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 12. Program Kegiatan yang dilakukan pemerintah kota Padang tentang pembinaan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata.

No	Kegiatan	Ada	Tidak	Keterangan
1	Atraksi sky air	✓		-
2	Menyelenggarakan budi daya penyu	✓		-
3	Tempat persinggahan tour de singkarak	✓		-

Berdasarkan tabel 12 diatas, pada objek wisata pantai Air Manis sudah diadakan beberapa ivent wisata, diantaranya sky air yang ditampilkan oleh wisatawan mancanegara. Kemudian pada objek wisata pantai Air Manis juga telah

diadakannya budi daya penyu, yang diadakan acara pelepasan tukik penyu. Budidaya penyu ini dikelola oleh kelompok masyarakat Air Manistujuan diadakannya budi daya penyu ini adalah agar dapat membuka lapangan usaha bagi kelompok masyarakat di Air Manis.

Syarat-syarat atraksi wisata yang harus dipenuhi, menurut Soekadjo (1996: 16) dalam kepariwisataan, segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat disebut atraksi wisata, baik yang hadir secara alami maupun yang dibuat oleh manusia. Dalam kepariwisataan atraksi-atraksi harus dikoordinasi dalam penyajiannya, agar dapat menarik wisatawan.

Dalam rangka mengembangkan objek wisata pantai Air Manis berbagai macam atraksi yang dapat disediakan untuk menarik wisatawan datang berkunjung kepantai Air Manis tersebut. Seperti yang diterangkan oleh Bapak ketua ASITA Kota Padang bahwa Banyak atraksi yang dapat ditampilkan seperti yang diungkapkan dibawah ini:

*“kami disini sangat senang sekali apabila ada pihak luar yang mengadakan atraksi-atraksi yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung keobjek wisata pantai Air Manis ini, atraksi yang baru ada sekarang cuma berupa sky air yang dilakukan oleh bule-bule pada setiap sore, dan kami tidak memungut biaya karcis masuk bule-bule tersebut, kemudian menyelenggarakan budi daya penyu”*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah ada beberapa atraksi yang disediakan oleh masyarakat dalam menarik minat wisatawan tetapi baruhnya beberapa saja, masih banyak atraksi-atraksi lain yang dapat ditampilkan.

Menurut informasi dari dinas pariwisata Kota Padang bahwa pada Tahun 2013 ini sudah teralokasi dana sebesar 1 milyar yang akan digunakan untuk merehap batu Malin Kundang, tetapi dana tersebut sampai sekarang belum juga

turun, padahal sekarang sudah akan memasuki tahun 2014. Sebaiknya pemerintah lebih cepat membangun atau merehab batu Malin Kundang, karena kawasan batu Malin Kundang merupakan tempat pertama yang akan dituju oleh wisatawan apabila berkunjung ke Pantai Air Manis

## 2. Program Perencanaan dan Pelestarian Lingkungan

Pelestarian lingkungan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, karena lingkungan pariwisata merupakan tempat yang nantinya ditemui oleh para wisatawan. Adapun cara yang diterapkan oleh dinas pariwisata adalah:

Tabel 13. Program Kegiatan Tentang Perencanaan dan Pelestarian Lingkungan

No	Kegiatan	Ada	Tidak	Keterangan
1	Pengembangan usaha yang ramah lingkungan		✓	-
2	Peningkatan kesadaran lingkungan di objek dan daya tarik wisata		✓	-
3	Peningkatan dan pemantapan kawasan-kawasan yang rentan terhadap perubahan		✓	-
4	Peningkatan kebersihan di objek wisata	✓		-

Pengembangan usaha pariwisata yang ramah lingkungan merupakan suatu cara yang harus diberikan oleh masyarakat yang berada di lingkungan objek wisata terhadap wisatawan yang datang berkunjung baik itu dari cara melayani wisatawan maupun dari segi kebersihan lingkungan objek wisata tersebut.

Yang ditemui di Objek wisata Pantai Air Manis sebagian dari masyarakat sudah menunjukkan pelayanan yang baik terhadap wisatawan, tetapi ada juga ditemui pelayanan yang tidak memuaskan. Berarti belum terealisainya pelayanan

lingkungan yang baik di kawasan wisata Pantai Air Manis. Dan apabila kita melihat kebersihan pantai Air Manis tersebut masih tergolong kurang bersih, sewaktu dilakukan penelitian dilapangan banyak ditemui sampah yang bertumpuk dimana-mana. Padahal menurut informasi yang ditemukan dilapangan bahwa sudah adanya ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang petugas yang bertugas memungut sampah, petugas diambil dari masyarakat setempat sebanyak tiga orang. Petugas yang bertugas memungut sampah dilingkungan objek wisata tersebut diberi honor sebesar 500.000/ bulan. Tapi menurut masyarakat dilingkungan objek wisata tersebut pemungutan sampah tersebut tidak berjalan lancar. Menurut informasi akibat kurang aktifnya petugas tersebut yaitu petugas tersebut merasa honor nya terlalu kecil.

**c. Strategi Pengembangan Penanaman Investasi dan Promosi Dunia Wisata**

Strategi ini berkaitan dengan *Business Strateg* pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran ditengah-tengah semua lapisan masyarakat. Adapun programnya adalah

➤ **Program pengembangan rencana strategis pemasaran kawasan pariwisata**

Dalam *strategi pengembangan penanaman investasi dan promosi* disini promosi dan publikasi merupakan hal yang sangat vital dalam kepariwisataan. Seorang wisatawan tidak akan mengetahui bagaimanapun indahnya objek wisata kalau tidak ada suatu informasi yang diterima tentang daerah objek wisata tersebut (Kodhyat: 1980).

Dibawah ini dapat kita lihat kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang dalam program pengembangan rencana strategis pemasaran kawasan wisata pantai Air Manis Padang.

Tabel 14. kegiatan yang dilakukan tentang pengembangan rencana strategis pemasaran kawasan wisata

No	Kegiatan	Ada	Tidak	Keterangan
1	Melaksanakan dan mengarahkan pembuatan rencana bahan-bahan promosi dan informasi termasuk periklanan di internet, surat kabar, dan majalah.		✓	-
2	Menyelenggarakan dokumentasi dan publikasi serta penyimpanan bahan-bahan promosi dan informasi juga meneliti bahan-bahan penerbitan dalam rangka pembinaan publikasi		✓	-
3	Menyusun rencana distribusi, menyelenggarakan sistem kode bahan promosi dan informasi pariwisata serta menyelenggarakan pengiriman bahan-bahan promosi, informasi dan publikasi			-

Dalam program pengembangan rencana pemasaran strategis pemasaran kawasan pariwisata pada tahun 2011 dana yang terrealisasi sebesar Rp. 33.190.000,- hasil yang dicapai adalah adanya iklan-iklan di internet dan dikoran, serta dibeberapa majalah.

Menurut keterangan dari Bapak kepala seksi perizinan dan pembinaan pariwisata kota Padang mengatakan:

*“kami sudah berupaya untuk melakukan promosi terhadap objek wisata pantai air manis ini, kami sudah mengambil foto-fotonya dan sudah mengumpulkan kedalam buku kumpulan objek wisata kota Padang serta telah kami promosikan juga lewat internet”*

Dari pengamatan dilapangan, promosi dan publikasi oleh Pemerintah Daerah atau Dinas terkait untuk memperkenalkan objek wisata ini secara khusus masih kurang. Kenyataannya belum ada kita lihat baliho-baliho yang mempromosikan keindahan pantai air manis. Pemerintah beralasan bahwa objek wisata Pantai Air Manis tidak perlu dipromosikan lagi karena objek wisata ini sudah terkenal dimana-mana. Dari hasil penelitian penulis hanya menemukan promosi dari internet yang mana bukan dinas yang membuatnya, tetapi masyarakat yang kagum akan keindahan pantai Air Manis.

Sebenarnya promosi dan publikasi sangat dibutuhkan untuk menunjang kedatangan wisatawan ke objek wisata. Promosi dan publikasi dapat dilakukan misalnya dengan membuat iklan-iklan di media massa, seperti koran, internet, dan lain sebagainya. Dan promosi dapat juga dilakukan dengan memasang *Baliho* digerbang pintu masuk ke Kelurahan Air Manis.

#### *d. Strategi Pengadaan dan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pariwisata*

Strategi ini merupakan *functional strategiy*aitu adanya sarana penunjang pariwisata yang merupakan fasilitas yang secara langsung dibutuhkan wisatawan di Daerah Tujuan Wisata (DTW), baik berupa produk wisata atau jasa seperti transportasi, restoran/ kedai/ warung.

➤ **Adapun program pemerintah adalah: Program pembangunan sarana pariwisata**

Sarana merupakan komponen penting dalam pariwisata, dengan adanya sarana dan prasarana pengunjung akan bertahan serta betah untuk berlama-lama dikawasan objek wisata tersebut. Seperti yang penulis sebutkan sebelumnya masih minimnya sarana pokok yang dapat menghambat minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata Pantai Air Manis.

Pada objek wisata Air Manis hendaknya harus dibangun jalan yang layak, dalam artian jalan yang dapat memudahkan proses transportasi berjalan lancar, karena seperti yang dapat kita lihat saat ini jalan menuju keobjek wisata kurang memadai, dapat kita lihat jalannya kecil, sehingga menyulitkan mobil untuk selisih. Seperti yang diterangkan oleh Bapak Ketua ASITA kota Padang:

*“Jalan menuju ke Pantai Air Manis sangat harus dibenahi karena sama-sama kita lihat jalannya sangat kecil sekali, sehingga menyulitkan bagi mobil berselisih, apalagi truk yang mengangkut batu dan pasir kalau dilakukan perbaikan di Pantai Air Manis nantinya.seharusnya akses jalan menuju pantai air manis terlebih dahulu dibangun agar tidak menggagu proses transportasi.”*

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Bapak ketua seksi perizinan dan pembinaan usaha pariwisata kota Padang:

*“pemerintah sudah berupaya untuk membangun objek wisata Pantai Air Manis, baik dari segi jalan maupun sarana dan prasarana yang lain, tetapi semua nya itu tidak terlepas dari segi dana, sekarang hanya ada dana yang diuntukkan untuk membenahi batu Malin Kundang saja. Dana itupun sampai sekarang belum turun”*

Sarana penunjang pariwisata seperti jalan dan sarana - sarana lain sangat dibutuhkan dalam pengembangan objek wisata, tetapi hal tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk

membangun kelengkapan sarana tersebut karena kalau sarana tersebut dilengkapi maka keuntungan yang diperoleh akan sangat besar pula.

Pada objek wisata pantai air masih banyak kekurangan sarana yang dapat menunjang kedatangan wisatawan, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan sarana pariwisata tersebut, karena dengan adanya sarana yang lengkap maka akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pantai Air Manis.

## **2.Swasta**

Peran sektor swasta dipilih sebagai salah satu upaya pemerintah dalam pemenuhan infrastruktur dan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Keterlibatan pihak swasta diharapkan akan mengurangi biaya (teknis, proses, bisnis, keahlian dan manajerial) yang diperlukan untuk pembangunan daerah. Kewirausahaan swasta diharapkan mampu menggali potensi dari kerjasamadengan pemerintah menjadi suatu keuntungan yang pada akhirnya mampu menambah pendapatan daerah tersebut.

Keterlibatan sektor swasta dapat mengurangi resiko yang harus dihadapi pemerintah, menurunkan biaya dalam melakukan kegiatan bisnis, dan dapat menentukan harga yang efisien dan adil, meningkatkan pengelolaan yang berprinsip kemanusiaan dalam masalah pemindahan penduduk, serta membantu perlindungan terhadap lingkungan. Peran sektor swasta juga penting dalam pengembangan pariwisata. Dilibatkannya sektor swasta dalam rencana pengembangan kawasan wisata sebagai bagian yang integral dari rencana pembangunan regional bisa menjadi salah satu syarat kesuksesan pengembangan kawasan pariwisata. Swasta dapat dilibatkan untuk berkontribusi dalam upaya-

upaya strategis untuk memanfaatkan ruang dari suatu wilayah secara optimal untuk mengakomodasi kegiatan sosial, ekonomi maupun budaya yang diharapkan menjadi komoditas dan prasarana di bidang pariwisata.

Pada objek wisata Pantai Air Manis padang belum ditemui adanya pihak swasta yang ingin membantu dalam pengembangan objek wisata tersebut. Seperti yang diterangkan oleh warga Air Manis berikut ini:

*“saya adalah warga asli Air Manis, sampai sekarang belum ada pihak swasta yang ingin membantu dalam pengembangan objek wisata. Dahulu pernah terdengar kabar bahwa adanya investor asing yang ingin membuat waterboom dipantai air manis ini, tetapi itu tidak terlaksana sampai sekarang”*

Berdasarkan keterangan warga Air Manis diatas dapat kita simpulkan bahwa sampai saat ini belum adanya pihak swasta yang ingin membantu dalam pengembangan objek wisata Pantai Air Manis tersebut.

### **3. Masyarakat**

Pengembangan sektor pariwisata tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya peran serta pihak lain, manfaat yang optimal hanya dapat dicapai bila pertumbuhannya selaras dengan usaha pemeliharaan dan pengembangan sektor lain. Dalam hal ini masyarakat merupakan salah satu unsur yang dapat mendukung tercapainya satu hasil yang optimal tersebut. Oleh karena itu peran serta dari masyarakat sangat dibutuhkan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung

Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini lebih di titik beratkan pada peningkatan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan, tidak lain adalah usaha membuka akses atas kekuasaan, sumber daya, dan kerjasama dengan pemerintah serta pihak swasta.

Usaha tersebut mulai memunculkan keadilan dan masyarakat terkait dengan pembangunan kepariwisataan. Namun, peningkatan partisipasi masyarakat tersebut haruslah diikuti dengan reformasi atau perubahan kelembagaan sehingga membuka kesempatan bagi berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat untuk mengorganisasikan dan mempersentasikan dirinya masing-masing dan meningkatkan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan menggiatkan sektor pariwisata selain dengan mengadakan pembenahan fisik, juga perlu menumbuhkan sikap dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata, mengingatkan kesadaran masyarakat, hal ini mengingatkan faktor ini ikut menentukan berhasil tidaknya pendayagunaan potensi wisata. Selanjutnya partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata

Ada sebagian masyarakat yang telah ikut serta dalam membangun objek wisata dipantai Air Manis ini dengan cara:

- 1) Peran serta masyarakat untuk melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Peran serta masyarakat yang pertama ini bertujuan untuk melayani para wisata Lokal dengan sebaik-baiknya agar mereka betah tinggal ditempat itu. Dengan demikian para wisata Lokal tersebut akan membelanjakan uangnya sebanyak-banyaknya di daerah tujuan wisata itu. Dari sekian banyak bentuk peran serta masyarakat, sebagian besar berupa pelayanan jasa. Sementara itu peran serta masyarakat dalam bentuk menjual produk atau hasil kerajinan (hasil karya, lukisan, kerajinan) bisa dikatakan tidak ada. Jadi, yang ditonjolkan di daerah ini adalah benar-benar keindahan

Pantai dan Batu Malin Kundang. Peran serta penduduk di daerah ini untuk tujuan melayani tamu atau para wisata Lokal yang berkunjung, pada umumnya dilakukan dengan mengambil bagian bekerja dibidang jasa dalam rangka meraih peluang ekonom dari perjalanan wisata. Hal itu diwujudkan dengan menjadi tenaga produkti yang mandiri seperti membuka tempat penginapan, rumah makan, dan warung.

- 2) Peran serta masyarakat untuk mempertahankan identitas diri wujud kepedulian masyarakat setempat dalam upaya menghadapi pengaruh buruk yang kemungkinan bisa ditimbulkan oleh pariwisata teraktualisasi dalam bentuk peran serta masyarakat dalam upaya mempertahankan identitas diri. Paling tidak sebagai orang Minangkabau yang kuat memegang adat serta sebagai orang yang beragama, Islam khususnya, dalam hal mempertahankan kemurnian kehidupan beragama juga mereka lakukan. Seperti tertuang dalam falsafah hidup mereka, yaitu : Adat basandi syarak, Syarak basandi Kitabullah. Artinya adat berlandaskan pada Islam (Syarak), sementara itu Islam berazaskan pada Kitabullah (Al-Quran). Dengan demikian adat Minangkabau selaras dengan Al-Quran.

#### **4.4. Kendala-Kendala Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Air Manis**

##### **1. Masyarakat**

Prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai

kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukan bagi masyarakat. Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Disini Pemda berperan sebagai fasilitator pengembangan kepariwisataan.

Adapun beberapa contoh kendala yang ditemui di lingkungan masyarakat antara lain:

- 1) Masih ada stigma pandangan bahwa pariwisata dapat mempengaruhi kehidupan yang kurang baik atau akan berpengaruh buruk pada proses pembentukan moral masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, bahwa melalui pariwisata terjadi proses akulturasi budaya yang sesungguhnya juga di balik itu semua banyak memberikan nilai tambah.
- 2) Masih adanya sikap yang berlebihan terhadap turis. Sehingga kewaspadaan yang berlebihan dapat saja berakibat kurang kondusifnya bagi para turis tatkala mereka mengunjungi obyek wisata.
- 3) Belum tumbuhnya sikap masyarakat untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada para turis minimal dengan mengucapkan selamat dan memberi senyuman sehingga masih terjadi insiden-insiden ketidak amanan di berbagai daerah yang menjadi obyekwisata.
- 4) belum terbentuknya sikap dan cara pandang bahwa pariwisata, seperti banyak terbukti di berbagai Negara, menjanjikan pula bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Dengan prinsip kepariwisataan berbasis masyarakat, hendaknya pemda dapat mensosialisasikan konsepsi kepariwisataan kepada masyarakat setempat dengan melibatkan para ahli. Tujuan sosialisasi itu adalah untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang pengembangan kepariwisataan berbasis budaya dan berbasis

masyarakat, maksudnya lebih menonjolkan budaya masyarakat setempat, seperti permainan anak nagari. dengan demikian tidak terjadi kesalahpahaman pengertian objek wisata. Setelah itu barulah untuk menyamakan persepsi masyarakat tentang tujuan pembangunan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa antara pemerintah dengan masyarakat belum terjadi hubungan kerjasama yang baik. Padahal dengan adanya kerja sama yang bagus dapat mensukseskan pembangunan pariwisata tersebut

#### **4. Keterbatasan Dana**

Minimnya dana yang dianggarkan untuk sektor pariwisata menjadi kendala pengembangan potensi wisata yang ada dipantai air manis. Kondisi ini dapat dirasakan dengan lambannya perkembangan sektor tersebut yang seakan-akan tak mengalami kemajuan dari tahun ke tahun.

Adapun dana yang terkumpul dari objek wisata air manis bersumber dari karcis masuk. Yang mana untuk masuk ke objek wisata Pantai Air Manis kita bisamelewati pintu gerbang pertama dan pintu gerbang ke dua. Digerbang satu dan digerbang dua tempat kita membayar karcis masuk. Pada objek wisata pantai air manis Kita membayar uang karcis sebesar Rp 5000/ kepala. Tetapi apabila kita pergi berombongan maka kita tidak akan mendapat karcis sebanyak yang kita bayar/ kepala, tetapi kita hanya akan mendapat satu buah karcis padahal kita membayar sebanyak jumlah rombongan kita. jadi kemana saja uang pungutan masuk yang diminta tersebut. Disini penulis lihat kurangnya perhatian pemerintah, pemerintah seharusnya dapat mengontrol keadaan pengunjung. Sehingga dana yang terkumpul sesuai dengan banyaknya pengunjung wisata.

Yang sama-sama kita ketahui bahwa dalam pengembangan suatu objek wisata sangat dibutuhkan banyak alokasi dana.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata terletak pada dana, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata belum ada bekerja sama dengan investor untuk menanamkan modalnya untuk pengembangan pariwisata. Dinas kepariwisataan berharap adanya pihak swasta yang mau menanamkan modalnya untuk meningkatkan kualitas objek wisata Pantai Air Manis agar dapat meningkatkan juga jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Air Manis. Adapun dana sebelumnya yang digunakan untuk memperbaiki jalan masuk dari gerbang pertama dan, Pada Tahun 2012 yang lalu ada alokasi dana sebesar Rp 100.000.000 telah digunakan untuk memperbaiki jalan di gerbang pertama menuju kepantai Air Manis. Sedangkan pada tahun 2013 sekarang ada lagi dana sebesar 2 milyar yang nantinya akan digunakan memperbaiki Batu Malin Kundang sebesar 1 Milyar dan untuk memperbaiki jalan sebesar 1 Milyar. Tetapi menurut informasi yang ditemukan dilapangan dana yang 2 Milyar tersebut sampai sekarang belum juga cair. Padahal sekarang sudah akhir tahun, dana tersebut belum juga cair.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Pengelolaan objek wisata pada objek wisata pantai Air Manis Padang merupakan suatu hal yang sangat perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, swasta, dan masyarakat, karena dengan adanya pengelolaan yang baik kawasan wisata maka akan meningkatkan kunjungan wisata.

Pantai Air Manis merupakan aset yang tidak ternilai harganya dimana disana terdapat potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Potensi tersebut antara lain adalah legenda malin kundang yang sangat terkenal dimana-mana dan keindahan pantai air manis yang tiada tandingannya dan apabila kita melihat sebelah kanan terdapatnya dua buah pulau yaitu pulau pisang kecil dan pulau pisang besar dan potensi lain-lain.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 10 (2) tersebut maka pemerintah daerah berwenang untuk mengatur sendiri urusan pemerintahandaerahnya. Dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut setiap daerah mampu berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan pada berbagai sektor.

Sumatra Barat sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Indonesia, juga mempunyai peranan penting dalam hal ini wilayah yang cukup luas dan terdiri dari Kabupaten/ Kota yang mempunyai objek wisata yang bagus sehingga menjadikan Sumatra Barat menjadi tujuan wisata handalan. Lain dari pada itu Kota Padang

merupakan Ibu Kota Propinsi Sumatra Barat memiliki beberapa objek wisata yang menarik untuk dikunjungi, yang mana salah satunya adalah objek Wisata Pantai Air Manis.

Objek wisata Pantai Air Manis sangat layak untuk dikembangkan, alasan perlunya pengembangan objek wisata Air Manis adalah (a)Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu diperhitungkan keuntungan dan manfaatnya bagi rakyat banyak.(b)Pengembangan pariwisata lebih bersifat non ekonomis sebab motivesi utama wisatawan mengunjungi suatu kawasan objek wisata adalah untuk menyaksikan dan melihat keindahan-keindahan alam daerah yang dikunjungi. (c)Untuk menghilangkan kepicikan berfikir, dan mengetahui tingkah laku wisatawan yang datang berkunjung terutama bagi masyarakat didaerah tujuan wisata yang bersangkutan.

Berbagai potensi yang terdapat di Objek Wisata Pantai Air Manis sudah diberdayakan dan dikembangkan sebagai dayatarik wisata oleh pihak-pihak terkait, khususnya Pemerintah daerah tetapi belum begitu maksimal.Upaya pemberdayaan tersebut antara lain dalam bentuk menyediakan dan mengembangkan berbagai amenitas (sarana penunjang) pariwisata, memperbaiki aksesibilitas menuju obyek yaitu pada tahun 2012 kemaren adanya dana sebesar 100 juta rupiah yang diupergunakan untuk memperbaiki jalan.

Dalam mengembangkan berbagai potensitersebut terdapat beberapa hambatan atau kendala antara lain kurang intensifnya pembinaankelompok sadar wisata, rendahnya kunjungan wisatawan, terbatasnya anggaran pengembangan. Rendahnya kepedulian pemerintah daerah, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut dirumuskan strategi untuk

mengembangkan potensi pariwisata yang terdapat di Air Manis yaitu (1) Strategi pengembangan sumber daya wisata terpadu. (2) strategi pengembangan penanaman investasi dan promosi dunia wisata. (3) strategi pengadaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana pariwisata. (4) strategi pengembangan untuk melakukan program gerakan bersama untuk mengubah perilaku masyarakat dan wisatawan.

## 5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis Padang masih belum ditanggapi serius oleh pemerintah, dimana masih terdapatnya beberapa kekurangan sarana dan prasarana yang ditemukan dilapangan.

Dengan lengkapnya semua yang dibutuhkan dalam usaha pengelolaan pariwisata maka dengan sendirinya akan meningkatkan kunjungan wisatawan pada objek wisata Pantai Air Manis, sehingga pembangunan Pantai Air manis bejalan lancar. Sehingga dapat membantu pembangunan didaerah yang bersangkutan

Dari sisi objek wisata disarankan kepada Pemerintah daerah: (a) memperbanyak aktivitas-aktivitas/ atraksi-atraksi di obyek-obyek wisata yang dapat membuat wisatawan betah dan lama tinggal diobjek wisata sekaligus memperbesar retribusi obyek wisata, pajak hiburan dan restoran. Atraksi tersebut dapat berupa hiburan berbagai macam permainan anak nagari dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak swasta, dan masyarakat. (b) membuat program paket wisata yang menarik untuk ditawarkan kepada biro-biro atau agen-agen perjalanan. (c) Fasilitas transportasi umum yang melewati atau menuju obyek wisata perlu disempurnakan terutama obyek wisata yang jauh

dari jalan besar, misalnya dengan melancarkan angkutan ke daerah tujuan.

(d) Produk-produk wisata yang ada agar dijaga dan dipelihara keaslian agar tetap lestari dan tidak punah. (e) Program paket wisata dan promosi terus ditingkatkan dan digalakkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bakaruddin. (1987) *Pengembangan Objek-Objek Wisata Alam dan permasalahannya di Kota Padang*. IKIP Padang
- David, Fred R. 2004. *Manajemen Strategis: Konsep-konsep*. PT Indeks Kelompok Gramedia. ISBN 979-683-700-5.
- Halim, Abdul. 2002. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Kodhyat, H. (1980). *Sejarah Pariwisata Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Gramedia Rasindo.
- Lundberg, E Donald., Stavenga, Mink H., dan Krishnamoorthy, M. 1997. *Ekonomi Pariwisata*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Mahi. 2000. Prospek Desentralisasi di Indonesia ditinjau Dari Segi Pemerataan Antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi Analisis CSI 8 Tahun XXIX/2000 Nomor I, 55 – 66.
- Marpaung, Happy. 2000. *Pengetahuan Pariwisata*. Bandung: Alfabeta
- Miled dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. UI. Press
- Moleong, Lexi J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Yayasan Obor Indonesia.
- Pendit, S Nyoman. 1994. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Prasetio, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. : PT Raja Grafindo Persada.
- Salusu, J, 2000, *Pengambilan Keputusan Strategik: untuk Organisasi Publik & Organisasi Nonprofit*, Jakarta : PT. Grasindo
- Soemarwoto, Otto. 1993. *Pengembangan Pariwisata Dan Dampak Yang Ditimbulkannya*. Yogyakarta: Andi
- Spillane, J James. 1994. *Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Soekadjo, R. G. 1997. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka. Utama

Spillane, J James. 1987. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*.  
Kanisius.Yogyakarta

Soleh, Chabib. 2010. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*. FOKUSMEDIA.  
Bandung

Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta

Tangkilisan, Hessel Nogi. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Jakarta : Kerjasama  
Lukman Offset dan YayasanPembaharuanAdministrasi Publik Indonesia.

Yoeti, Oka A.1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*.PT.Angkasa. Bandung

Yoeti, Oka A.1997.*Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata*.Jakarta.

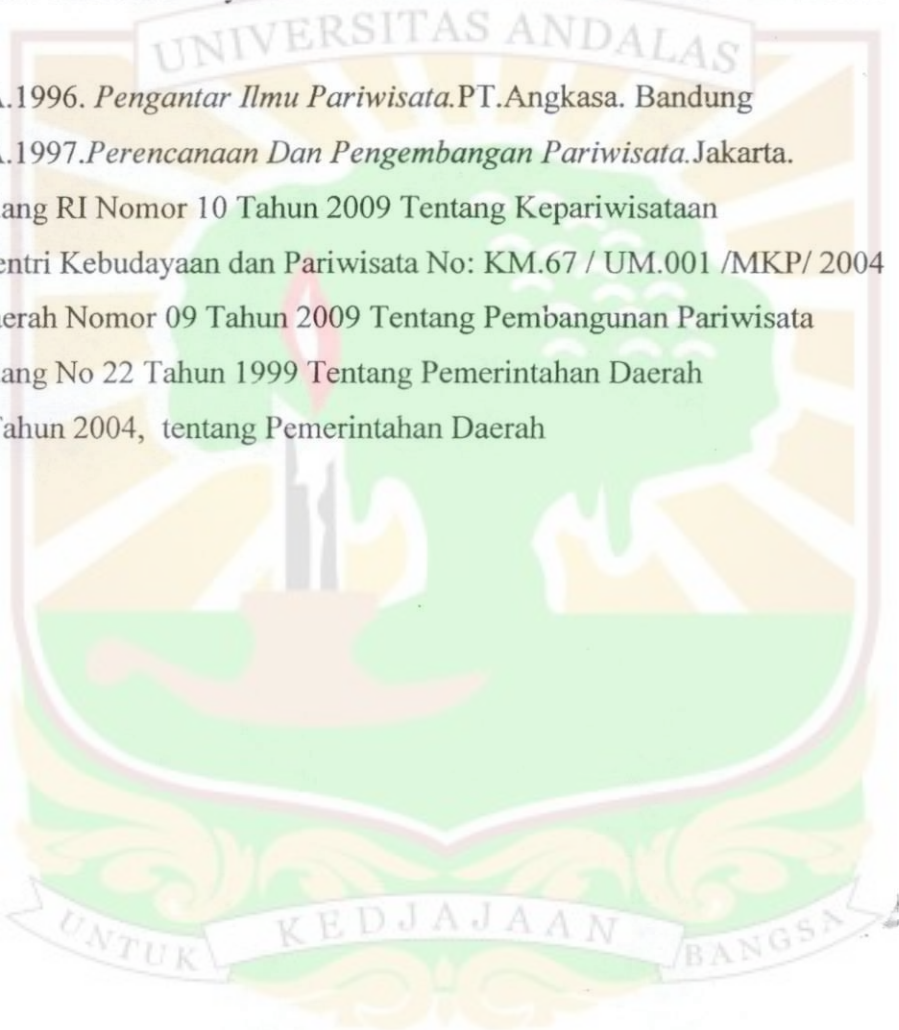
Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No: KM.67 / UM.001 /MKP/ 2004

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Pariwisata

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 34 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah



## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dan Pariwisata

1. Apa ada Peraturan daerah mengenai pengembangan objek wisata air manis?
2. Apakah ada usaha yang dilakukan pemerintah dalam hal pengembangan objek wisata pantai air manis ?
3. Terobosan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang?
4. Bagaimana keadaan pengunjung objek wisata dari tahun ketahun?
5. Apakah ada dilakukan promosi?
6. Apakah ada kendala dalam pengembangan objek wisata pantai air manis?

### 2. Masyarakat

1. Menurut anda bagaimana keadaan objek wisata sekarang?
2. Apa usaha yang dilakukan pemerintah dalam hal pengembangan objek wisata?
3. Bagaimana keadaan pengunjung sebelum dan sesudah gempa besar yang melanda kota Padang?
4. Apa ada kendala dalam hal pengembangan objek wisata?

### 3. Pengunjung

1. Apa pendapat anda tentang objek wisata pantai air manis?
2. Menurut anda bagaimana sarana dan prasarana pada objek wisata pantai air manis?
3. Apa tanggapan anda mengenai kebersihan pada objek wisata pantai air manis?
4. Apakah anda puas setelah datang berkunjung ke objek wisata pantai air manis?
5. Apakah anda ingin berkunjung kembali ke objek wisata pantai air manis?

### 4. ASITA (Assosiation of The Tours and Travel Agencies)

1. Apakah ada usaha yang dilakukan pemerintah dalam hal pengembangan objek wisata pantai air manis ?

2. Terobosan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang?
3. Apakah ada dilakukan promosi?
4. Apakah ada kendala dalam pengembangan kobjek wisata pantai air manis?



UNIVERSITAS ANDALAS

( 2.04.01 )

**DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA**

UNTUK KEDJAJAAN

PEMERINTAH KOTA PADANG  
 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,  
 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN : 2.04 - PARIWISATA  
 : 2.04.01 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp.)	%	
		3	4	5=4-3	6	
	2					7
	PENDAPATAN	500,750,000.00	259,222,500.00	(241,527,500.00)	51.77	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	500,750,000.00	259,222,500.00	(241,527,500.00)	51.77	
	Hasil Retribusi Daerah	500,000,000.00	258,472,500.00	(241,527,500.00)	51.69	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	750,000.00	750,000.00	-	100.00	
	Jumlah Pendapatan	500,750,000.00	259,222,500.00	(241,527,500.00)	51.77	
	BELANJA DAERAH	5,726,706,470.00	5,594,965,633.00	(131,740,837.00)	97.70	
	Belanja Tidak Langsung	2,042,736,670.00	2,009,472,329.00	(33,264,341.00)	98.37	
	Belanja Pegawai	2,042,736,670.00	2,009,472,329.00	(33,264,341.00)	98.37	
	Belanja Langsung	3,683,969,800.00	3,585,493,304.00	(98,476,496.00)	97.33	
	PROGRAM PELAYANAN ADIMINSTRASI PERKANTORAN	997,253,000.00	948,419,534.00	(48,833,466.00)	95.10	
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3,330,000.00	3,232,500.00	(97,500.00)	97.07	
	Belanja Barang dan Jasa	3,330,000.00	3,232,500.00	(97,500.00)	97.07	
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	108,940,000.00	69,573,514.00	(39,366,486.00)	63.86	
	Belanja Barang dan Jasa	108,940,000.00	69,573,514.00	(39,366,486.00)	63.86	
	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	52,575,000.00	51,841,000.00	(734,000.00)	98.60	
	Belanja Pegawai	1,150,000.00	1,150,000.00	-	100.00	
	Belanja Barang dan Jasa	1,250,000.00	950,000.00	(300,000.00)	76.00	
	Belanja Modal	50,175,000.00	49,741,000.00	(434,000.00)	99.14	
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1,325,000.00	1,115,000.00	(210,000.00)	84.15	
	Belanja Barang dan Jasa	1,325,000.00	1,115,000.00	(210,000.00)	84.15	
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	20,000,000.00	19,963,300.00	(36,700.00)	99.82	
	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	19,963,300.00	(36,700.00)	99.82	
	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35,000,000.00	34,911,100.00	(88,900.00)	99.75	
	Belanja Barang dan Jasa	35,000,000.00	34,911,100.00	(88,900.00)	99.75	
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15,000,000.00	14,986,500.00	(13,500.00)	99.91	
	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	14,986,500.00	(13,500.00)	99.91	
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7,500,000.00	6,099,500.00	(1,400,500.00)	81.33	
	Belanja Barang dan Jasa	6,540,000.00	5,619,000.00	(921,000.00)	85.92	
	Belanja Modal	960,000.00	480,500.00	(479,500.00)	50.05	
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	60,000,000.00	59,801,150.00	(198,850.00)	99.67	
	Belanja Barang dan Jasa	60,000,000.00	59,801,150.00	(198,850.00)	99.67	
	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	375,285,440.00	374,349,150.00	(936,290.00)	99.75	
	Belanja Barang dan Jasa	375,285,440.00	374,349,150.00	(936,290.00)	99.75	
	RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	10,000,000.00	4,830,000.00	(5,170,000.00)	48.30	
	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	4,830,000.00	(5,170,000.00)	48.30	
	PENYEDIAAN ALAT KEBERSIHAN	25,000,000.00	24,990,100.00	(9,900.00)	99.96	
	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000.00	24,990,100.00	(9,900.00)	99.96	
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PUBLIK	106,347,560.00	106,249,220.00	(98,340.00)	99.91	
	Belanja Pegawai	106,347,560.00	106,249,220.00	(98,340.00)	99.91	
	PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	176,950,000.00	176,477,500.00	(472,500.00)	99.73	

REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5=4-3	6	7
01 01 22 5 2 1	Belanja Pegawai	176.950.000,00	176.477.500,00	(472.500,00)	99,73	
01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	266.391.800,00	265.714.800,00	(677.000,00)	99,75	
01 02 22	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	14.665.900,00	(334.100,00)	97,77	
01 02 22 5 2 1	Belanja Pegawai	5.290.000,00	5.027.500,00	(262.500,00)	95,04	
01 02 22 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9.710.000,00	9.638.400,00	(71.600,00)	99,26	
01 02 24	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	221.391.800,00	221.309.400,00	(82.400,00)	99,96	
01 02 24 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	221.391.800,00	221.309.400,00	(82.400,00)	99,96	
01 02 26	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	29.739.500,00	(260.500,00)	99,13	
01 02 26 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.739.500,00	(260.500,00)	99,13	
01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	12.150.000,00	11.840.400,00	(309.600,00)	97,45	
01 03 05	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	12.150.000,00	11.840.400,00	(309.600,00)	97,45	
01 03 05 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	11.840.400,00	(309.600,00)	97,45	
01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.000.000,00	8.460.000,00	(1.540.000,00)	84,60	
01 06 01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.000.000,00	8.460.000,00	(1.540.000,00)	84,60	
01 06 01 5 2 1	Belanja Pegawai	5.376.000,00	5.340.000,00	(36.000,00)	99,33	
01 06 01 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.624.000,00	3.120.000,00	(1.504.000,00)	67,47	
01 16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	82.375.000,00	82.375.000,00	-	100,00	
01 16 14	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN	82.375.000,00	82.375.000,00	-	100,00	
01 16 14 5 2 1	Belanja Pegawai	80.200.000,00	80.200.000,00	-	100,00	
01 16 14 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	2.175.000,00	-	100,00	
01 20	PROGRAM PEMBINAAN SENI DAN BUDAYA DAERAH	643.100.000,00	632.269.000,00	(10.831.000,00)	98,32	
01 20 01	PENAMPILAN SENI TRADISIONAL MINANGKABAU SECARA RUTIN DAN BERKALA	190.000.000,00	183.828.000,00	(6.172.000,00)	96,75	
01 20 01 5 2 1	Belanja Pegawai	34.175.000,00	29.093.000,00	(5.082.000,00)	85,13	
01 20 01 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	155.825.000,00	154.735.000,00	(1.090.000,00)	99,30	
01 20 03	PELAKSANAAN EVENT-EVENT KESENIAN DALAM DAN LUAR NEGERI	100.700.000,00	99.780.000,00	(920.000,00)	99,09	
01 20 02 5 2 1	Belanja Pegawai	2.875.000,00	2.875.000,00	-	100,00	
01 20 02 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	97.825.000,00	96.905.000,00	(920.000,00)	99,06	
01 20 06	FESTIVAL SITTI NURBAYA	205.400.000,00	202.674.000,00	(2.726.000,00)	98,67	
01 20 06 5 2 1	Belanja Pegawai	14.425.000,00	14.399.000,00	(26.000,00)	99,82	
01 20 06 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	190.975.000,00	188.275.000,00	(2.700.000,00)	98,59	
01 20 07	FESTIVAL KESENIAN TRADISIONAL MINANGKABAU (PENDUKUNG KEGIATAN FESTIVAL SITTI NURBAYA)	147.000.000,00	145.987.000,00	(1.013.000,00)	99,31	
01 20 07 5 2 1	Belanja Pegawai	17.785.000,00	17.745.000,00	(40.000,00)	99,78	
01 20 07 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	129.215.000,00	128.242.000,00	(973.000,00)	99,25	
01 15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	15.000.000,00	14.914.000,00	(86.000,00)	99,43	
01 15 68	INVENTARISASI DAN LABELISASI ASET TETAP SKPD	15.000.000,00	14.914.000,00	(86.000,00)	99,43	
01 15 68 5 2 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	11.314.000,00	(86.000,00)	99,25	
01 15 68 5 2 1	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	34.800.000,00	33.190.000,00	(1.610.000,00)	95,37	
01 15 09	PENGEMBANGAN WEBSITE RESMI PARIWISATA KOTA PADANG	34.800.000,00	33.190.000,00	(1.610.000,00)	95,37	
01 15 09 5 2 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
01 15 09 5 2 1	Belanja Barang dan Jasa	33.700.000,00	32.090.000,00	(1.610.000,00)	95,22	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5=4-3	6	7
4.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	930.000.000,00	913.671.295,00	(16.328.705,00)	98,24	
4.01.16.13	MASTER PLAN PENGEMBANGAN KAWASAN PANTAI PADANG	816.100.000,00	806.662.155,00	(7.237.845,00)	99,11	
4.01.16.13.5.2.1	Belanja Pegawai	15.350.000,00	12.725.000,00	(2.625.000,00)	82,90	
4.01.16.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	800.750.000,00	796.137.155,00	(4.612.845,00)	99,42	
4.01.16.14	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BANGUNAN OBYEK WISATA KOTA PADANG	60.000.000,00	59.434.800,00	(565.200,00)	99,06	
4.01.16.14.5.2.1	Belanja Pegawai	17.357.500,00	17.335.000,00	(22.500,00)	99,87	
4.01.16.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.642.500,00	42.099.800,00	(542.700,00)	98,73	
4.01.16.15	PEMBINAAN USAHA PARIWISATA KOTA PADANG DAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA	53.900.000,00	45.374.340,00	(8.525.660,00)	84,18	
4.01.16.15.5.2.1	Belanja Pegawai	29.985.000,00	21.709.340,00	(8.275.660,00)	72,40	
4.01.16.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.915.000,00	23.665.000,00	(250.000,00)	98,95	
4.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	629.650.000,00	620.145.975,00	(9.504.025,00)	98,49	
4.01.17.10	PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN LUAR NEGERI	101.450.000,00	100.584.875,00	(865.125,00)	99,15	
4.01.17.10.5.2.1	Belanja Pegawai	9.725.000,00	9.575.000,00	(150.000,00)	98,46	
4.01.17.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.725.000,00	91.009.875,00	(715.125,00)	99,22	
4.01.17.12	PELAKSANAAN KEGIATAN TOUR DE SINGKARAK	373.200.000,00	369.107.100,00	(4.092.900,00)	98,90	
4.01.17.12.5.2.1	Belanja Pegawai	29.960.000,00	29.960.000,00	-	100,00	
4.01.17.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	343.240.000,00	339.147.100,00	(4.092.900,00)	98,81	
4.01.17.13	TALK SHOW KEPARIWISATAAN DAN TIC	80.000.000,00	76.654.000,00	(3.346.000,00)	95,82	
4.01.17.13.5.2.1	Belanja Pegawai	43.463.000,00	41.057.000,00	(2.406.000,00)	94,46	
4.01.17.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.537.000,00	35.597.000,00	(940.000,00)	97,43	
4.01.17.14	PEMBUATAN BAHAN-BAHAN PROMOSI PARIWISATA	75.000.000,00	73.800.000,00	(1.200.000,00)	98,40	
4.01.17.14.5.2.1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
4.01.17.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.950.000,00	70.750.000,00	(1.200.000,00)	98,33	
4.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK KEPARIWISATAAN DAERAH	63.250.000,00	54.493.300,00	(8.756.700,00)	86,16	
4.01.18.01	REVISI PERDA NO.25 TAHUN 2002 DAN NO.4 TAHUN 2004	38.250.000,00	34.366.800,00	(3.883.200,00)	89,85	
4.01.18.01.5.2.1	Belanja Pegawai	22.915.000,00	21.807.000,00	(1.108.000,00)	95,16	
4.01.18.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.335.000,00	12.559.800,00	(2.775.200,00)	81,90	
4.01.18.02	EVALUASI KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	25.000.000,00	20.126.500,00	(4.873.500,00)	80,51	
4.01.18.02.5.2.1	Belanja Pegawai	4.270.000,00	3.654.000,00	(616.000,00)	85,57	
4.01.18.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.730.000,00	16.472.500,00	(4.257.500,00)	79,46	
	Jumlah Belanja	5.726.706.470,00	5.594.965.633,00	(131.740.837,00)	97,70	
	Surplus/(Defisit)	(5.225.956.470,00)	(5.335.743.133,00)	(109.786.663,00)	102,10	

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH OBJEK WISATA KOTA PADANG  
KEADAAN : 2008**

No.	Jenis Penerimaan	Target Thn 2008	Realisasi			%
			Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	
<b>I.</b>	<b>Retribusi Tempat dan Rekreasi Olahraga</b>	<b>260,369,000</b>	<b>109,908,100</b>	<b>19,927,000</b>	<b>129,835,100</b>	<b>49.9</b>
1.	Air Manis	11,184,000	13,827,000	684,000	14,511,000	129.7
2.	Pasir Jambak	8,791,500	2,223,000	228,000	2,451,000	27.9
3.	Siti Nurbaya	4,353,000	3,700,000	950,000	4,650,000	106.8
4.	Lubuk Peraku	2,010,000	1,298,100	-	1,298,100	64.6
5.	Pantai Padang					
a	* Dewasa	24,428,000	-	-	-	0.0
b	* Anak-anak	3,478,500	-	-	-	0.0
6.	Taman Hutan Raya Bung Hatta	2,016,000	480,000	-	480,000	23.8
7.	Lubuk Minturun/Air Dingin	2,010,000	855,000	-	855,000	42.5
8.	Pemakaian Kios PEMDA	15,180,000	7,406,000	2,334,000	9,740,000	64.2
9.	Pedagang Gerobak	7,158,000	6,782,000	1,060,000	7,842,000	109.6
10.	Pemakaian WC/Kamar Mandi	9,614,000	7,475,000	2,150,000	9,625,000	100.1
11.	Pemakaian Pentas	600,000	350,000	-	350,000	58.3
12.	Pemakaian Gusset House Tahura	126,418,000	27,990,000	8,930,000	36,920,000	29.2
13.	Perkemahan di Taman Raya Bung Hatta	3,000,000	738,000	247,000	985,000	32.8
14.	Taman Ria Pantai Padang	40,128,000	36,784,000	3,344,000	40,128,000	100.0
<b>II.</b>	<b>Izin Usaha Penyelenggara Pariwisata</b>	<b>107,550,000</b>	<b>69,250,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>71,550,000</b>	<b>66.5</b>
1.	Travel Biro Perjalanan	28,500,000	21,000,000	-	21,000,000	73.7
2.	Hotel Bintang II	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	100.0
3.	Hotel Melati	2,000,000	5,000,000	500,000	5,500,000	275.0
4.	Rumah Makan/Resto Tipe A	9,000,000	5,250,000	-	5,250,000	58.3
5.	Rumah Makan/Resto Tipe B	11,000,000	3,500,000	-	3,500,000	31.8
6.	Rumah Makan Tipe C	7,700,000	1,750,000	-	1,750,000	22.7
7.	Rumah Makan Tipe D	7,000,000	4,000,000	750,000	4,750,000	67.9
8.	Bopet dan Warung Kopi	1,500,000	300,000	-	300,000	20.0
9.	Café/Bakery		500,000	-	500,000	
10.	Jasa Boga/Catering	6,750,000	5,250,000	750,000	6,000,000	88.9
11.	Taman Rekreasi	1,000,000	-	-	-	0.0
12.	Jasa Impresariat (EO)	1,000,000	3,000,000	-	3,000,000	300.0
13.	Gelanggang permainan ketangkasan	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	100.0
14.	Panti pijat bukan di hotel	1,200,000	400,000	-	400,000	33.3
15.	Pantai Untuk Wisata	1,500,000	-	-	-	0.0
16.	Rumah Billyard	900,000	300,000	-	300,000	33.3
17.	Musik hidup/Panggung Remaja	1,000,000	-	-	-	0.0
18.	Wisata Tirta	5,000,000	7,500,000	-	7,500,000	150.0
19.	Pondok Wisata	300,000	300,000	-	300,000	100.0
20.	Karaoke	4,500,000	4,000,000	-	4,000,000	88.9
21.	Jasa konvensi	500,000	500,000	-	500,000	100.0
22.	Jasa informasi pariwisata	500,000	500,000	-	500,000	100.0
23.	Salon kecantikan tipe A	3,000,000	-	-	-	0.0
24.	Salon kecantikan tipe B	5,500,000	1,000,000	-	1,000,000	18.2
25.	Salon kecantikan tipe C	4,200,000	1,200,000	300,000	1,500,000	35.7
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>367,919,000</b>	<b>179,158,100</b>	<b>22,227,000</b>	<b>201,385,100</b>	<b>54.7</b>

Padang, 31 Desember 2008

Mengetahui :  
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Kota Padang

Bendaharawan Penerima  
Diparbud Kota Padang

**Drs. DIDI ARYADI, M. Si**  
NIP. 010213141

**MASRUL**  
NIP. 410005656

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH OBJEK WISATA KOTA PADANG  
KEADAAN : 2009**

JENIS PENERIMAAN	TARGET	Realisasi			%
	TAHUN 2009	Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	
<b>Retribusi Tempat dan Rekreasi Olahraga</b>	<b>240,852,000</b>	<b>168,491,780</b>	<b>9,166,000</b>	<b>177,657,780</b>	<b>73.8</b>
Air Manis	13,500,000	13,281,000	228,000	13,509,000	100.1
Pasir Jambak	8,502,000	7,239,000	1,539,000	8,778,000	103.2
Siti Nurbaya	6,024,000	7,305,500	380,000	7,685,500	127.6
Lubuk Peraku	3,285,000	1,064,760	144,000	1,208,760	36.8
Taman Hutan Raya Bung Hatta	4,698,000	1,960,800	-	1,960,800	41.7
Lubuk Minturun/Air Dingin	2,010,000	1,460,720	-	1,460,720	72.7
Pemakaian Kios PEMDA	15,180,000	30,859,000	4,255,000	35,114,000	231.3
Pedagang Gerobak	7,158,000	5,016,000	1,500,000	6,516,000	91.0
Pemakaian WC/Kamar Mandi	9,617,000	9,480,000	720,000	10,200,000	106.1
Pemakaian Pentas	600,000	500,000	-	500,000	83.3
Pemakaian Guest House Tahura	126,000,000	55,105,000	-	55,105,000	43.7
Pemakaian Guest House Tahura untuk umum	410,000	1,890,000	400,000	2,290,000	558.5
Lintas alam/camping	1,508,000	1,060,000	-	1,060,000	70.3
Taman Ria Pantai Padang	42,360,000	31,770,000	-	31,770,000	75.0
Perahu Lebaran Pantai Padang	-	500,000	-	500,000	
<b>Izin Usaha Penyelenggara Pariwisata</b>	<b>109,300,000</b>	<b>37,250,000</b>	<b>5,550,000</b>	<b>42,800,000</b>	<b>39.2</b>
Travel Biro Perjalanan	46,500,000	27,000,000	-	27,000,000	58.1
Jasa konvensi,perjalanan insentif/pameran	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100.0
Hotel Melati	1,000,000	1,500,000	1,000,000	2,500,000	250.0
Rumah Makan/Resto Tipe A	4,500,000	750,000	-	750,000	16.7
Rumah Makan/Resto Tipe B	8,000,000	-	-	-	0.0
Rumah Makan Tipe C	3,500,000	-	-	-	0.0
Rumah Makan Tipe D	4,500,000	500,000	-	500,000	11.1
Bopet dan Warung Kopi	900,000	450,000	-	450,000	50.0
Jasa Boga/Catering	6,000,000	2,250,000	-	2,250,000	37.5
Penyediaan Sarana Wisata Tirta	5,000,000	-	2,500,000	2,500,000	50.0
Karaoke	5,000,000	-	1,000,000	1,000,000	20.0
Panti pijat tradisional	800,000	-	-	-	0.0
Rumah bola	2,100,000	-	-	-	0.0
Pusat kesegaran jasmani	4,500,000	1,500,000	-	1,500,000	33.3
Salon kecantikan tipe A	3,000,000	1,000,000	-	1,000,000	33.3
Salon kecantikan tipe B	3,000,000	1,000,000	-	1,000,000	33.3
Salon kecantikan tipe C	3,000,000	300,000	-	300,000	10.0
Musik hidup/panggung remaja	2,500,000	-	-	-	0.0
Gelanggang ketangkasan anak	4,000,000	-	-	-	0.0
Jasa informasi	500,000	-	-	-	0.0
Rumah Bilyard	-	-	300,000	300,000	0.0
Bar dan sejenisnya	-	-	750,000	750,000	0.0
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>350,152,000</b>	<b>205,741,780</b>	<b>14,716,000</b>	<b>220,457,780</b>	<b>63.0</b>

Padang, 31 Desember 2009

Mengetahui :

An. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang  
Sekretaris

Pembantu Bendaharawan Penerima  
Disbudpar Kota Padang

**SUARDI, SH. M. Hum**  
NIP. 19610905 198203 1 008

**DWI YULIANI**  
NIP. 19670722 200701 2 004

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH OBJEK WISATA KOTA PADANG  
KEADAAN : 2010**

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET TAHUN 2010	Realisasi			%
			Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	
<b>I.</b>	<b>Retribusi Tempat dan Rekreasi Olahraga</b>	<b>285,270,000</b>	<b>168,455,600</b>	<b>20,367,400</b>	<b>188,823,000</b>	<b>66.2</b>
1.	Air Manis	18,000,000	13,062,500		13,062,500	72.6
2.	Pasir Jambak	10,000,000	6,802,000	1,520,000	8,322,000	83
3.	Siti Nurbaya	6,200,000	6,080,000	285,000	6,365,000	102.7
4.	Lubuk Peraku	2,000,000	1,026,000		1,026,000	51.3
5.	Taman Hutan Raya Bung Hatta	6,000,000	988,000	258,400	1,246,400	20.8
6.	Lubuk Minturun/Air Dingin	2,600,000	710,100		710,100	27.3
7.	Pemakaian Kios Pemda Lama	14,070,000	7,136,000	1,484,000	8,620,000	61.3
8.	Pemakaian Kios Pemda Baru	67,000,000	26,025,000	6,930,000	32,955,000	49.2
9.	Pedagang Gerobak	33,500,000	7,699,000	200,000	7,899,000	24
10.	Pemakaian WC/Kamar Mandi Pasir Jambak	1,200,000	485,000	440,000	925,000	77.1
11.	Pemakaian WC/Kamar Mandi Pantai Padang I	4,800,000	2,400,000		2,400,000	50
12.	Pemakaian WC/Kamar Mandi Pantai Padang II	4,800,000	2,400,000	3,200,000	5,600,000	117
13.	Pemakaian WC/Kamar Mandi Pantai Padang III	8,640,000	7,200,000	720,000	7,920,000	91.7
14.	Pemakaian Pentas	500,000	1,300,000		1,300,000	260
15.	Pemakaian Guest House Tahura	60,000,000	39,950,000	1,600,000	41,550,000	69.3
16.	Lintas alam/camping	1,200,000	632,000		632,000	52.7
17.	Taman Ria Pantai Padang	44,760,000	44,560,000	3,730,000	48,290,000	107.9
<b>II.</b>	<b>Izin Usaha Penyelenggara Pariwisata</b>	<b>75,500,000</b>	<b>56,900,000</b>	<b>20,500,000</b>	<b>77,400,000</b>	<b>102.5</b>
1.	Travel Biro Perjalanan	25,500,000	24,000,000	9,000,000	33,000,000	129.4
2.	Hotel Bintang I	1,000,000	2,000,000		2,000,000	200
3.	Hotel Bintang II	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	100
4.	Hotel Bintang III	3,000,000	3,000,000		3,000,000	100
5.	Hotel Bintang IV	4,000,000	4,000,000		4,000,000	100
6.	Hotel Bintang V	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	100
7.	Hotel Melati	6,500,000	5,500,000	500,000	6,000,000	92.3
8.	Rumah Makan/Resto Tipe A	1,500,000	750,000	750,000	1,500,000	100
9.	Rumah Makan/Resto Tipe B	2,000,000	500,000		500,000	25
10.	Rumah Makan Tipe C	3,500,000	350,000		350,000	10
11.	Rumah Makan Tipe D	2,000,000	-	-	-	0
12.	Jasa Boga/Catering	1,500,000	2,250,000	750,000	3,000,000	200
13.	Penyediaan Sarana Wisata Tirta	5,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	150
14.	Salon kecantikan tipe A	2,000,000	2,000,000		2,000,000	100
15.	Salon kecantikan tipe B	4,500,000	500,000		500,000	11.1
16.	Salon kecantikan tipe C	1,500,000	300,000		300,000	20
17.	Karaoke	1,000,000	2,000,000		2,000,000	200
18.	Café	1,500,000	500,000		500,000	33.3
19.	Konsultan Pariwisata	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100
20.	Objek Wisata	1,500,000			-	0
21.	Pusat kesegaran jasmani		750,000		750,000	
22.	Gelanggang Olahraga			1,500,000	1,500,000	
23.	Jasa Informasi Pariwisata			1,000,000	1,000,000	
	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>360,770,000</b>	<b>225,355,600</b>	<b>40,867,400</b>	<b>266,223,000</b>	<b>73.8</b>

Padang, 30 Desember 2010

Mengetahui :  
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Padang

Bendaharawan Penerima  
Disbudpar Kota Padang

**DR. H. EDI HASYMI, M.Si**  
NIP.19660131 198602 1 001

**RINI FITRIA, SS**  
NIP. 19850127 200901 2 006

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH OBJEK WISATA KOTA PADANG  
KEADAAN : 2011**

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET TAHUN 2011	Realisasi			%
			Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	
<b>I</b>	<b>Retribusi Tempat dan Rekreasi Olahraga</b>	<b>500,000,000</b>	<b>237,573,000</b>	<b>20,899,500</b>	<b>258,472,500</b>	<b>52</b>
1	Objek Wisata Pantai Air Manis	40,000,000	31,027,000	4,940,000	35,967,000	90
2	Objek Wisata Pantai Pasir Jambak	20,000,000	8,930,000	380,000	9,310,000	47
3	Objek Wisata Gunung Padang	15,000,000	8,360,000	1,710,000	10,070,000	67
4	Pemandian Lubuk Minturun/Air Dingin	7,000,000	1,711,900	-	1,711,900	24
5	Pemandian Lubuk Peraku	4,000,000	2,338,900	-	2,338,900	58
6	Taman Hutan Raya Bung Hatta	70,000,000	55,822,700	1,880,000	57,702,700	82
7	Taman Ria Pantai Padang	47,250,000	43,312,500	3,937,500	47,250,000	100
8	Pemakaian MCK Pantai Padang I	4,800,000	4,400,000	-	4,400,000	92
9	Pemakaian MCK Pantai Padang II	4,800,000	3,600,000	800,000	4,400,000	92
10	Pemakaian MCK Pantai Padang III	8,640,000	7,200,000	-	7,200,000	83
11	Pemakaian MCK Pantai Pasir Jambak	1,200,000	710,000	-	710,000	59
12	Pemakaian MCK Pantai Air Manis	1,200,000	375,000	-	375,000	31
13	Pemakaian Kios Pemda Lama	7,200,000	8,580,000	1,882,000	10,462,000	145
14	Pemakaian Kios Pemda Baru	108,000,000	57,580,000	5,120,000	62,700,000	58
15	Pedagang Gerobak Danau Cimpago	43,200,000	3,000,000	250,000	3,250,000	8
16	Pedagang Gerobak Pantai Padang	14,400,000	625,000	-	625,000	4
17	Pemakaian Fasilitas Lainnya	103,310,000	-	-	-	0
<b>II</b>	<b>Retribusi Izin Usaha Pariwisata</b>	<b>750,000</b>	<b>750,000</b>	<b>-</b>	<b>750,000</b>	<b>100</b>
	Catering		750,000	-	750,000	
<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>500,750,000</b>	<b>238,323,000</b>	<b>20,899,500</b>	<b>259,222,500</b>	<b>51.8</b>

Padang, 30 Desember 2011

Mengetahui :  
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Padang

Bendaharawan Penerima  
Disbudpar Kota Padang

**DR. H. EDI HASYMI, M.Si**  
NIP.19660131 198602 1 001

**RINI FITRIA, SS**  
NIP. 19850127 200901 2 006

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH OBJEK WISATA KOTA PADANG  
KEADAAN : DESEMBER 2012**

JENIS PENERIMAAN	TARGET TAHUN 2012	Realisasi			%
		Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	
<b>Retribusi Tempat dan Rekreasi Olahraga</b>					
Objek Wisata Pantai Air Manis	85,000,000	98,147,000	6,500,000	104,647,000	123
Objek Wisata Pantai Pasir Jambak	35,000,000	16,890,000	1,500,000	18,390,000	53
Objek Wisata Gunung Padang	25,000,000	42,475,000	2,000,000	44,475,000	178
Pemandian Lubuk Minturun/Air Dingin	5,000,000	3,040,000	-	3,040,000	61
Pemandian Lubuk Peraku	5,000,000	3,150,000	-	3,150,000	63
Pemandian Hutan Raya Bung Hatta					
Parkir Masuk	500,000	1,200,000	-	1,200,000	240
Parkir VIP	11,400,000	-	-	-	0
Parkir Biasa	114,000,000	37,200,000	30,800,000	68,000,000	60
Pajak Pertemuan	10,800,000	5,850,000	5,400,000	11,250,000	104
Pajak Perkemahan	500,000	850,000	-	850,000	170
Pajak Riam Pantai Padang	49,877,000	24,967,500	25,020,000	49,987,500	100
Pajak MCK Pantai Padang I	4,800,000	6,640,000	1,760,000	8,400,000	175
Pajak MCK Pantai Padang II	4,800,000	3,040,000	1,760,000	4,800,000	100
Pajak MCK Pantai Padang III	8,000,000	7,250,000	1,470,000	8,720,000	109
Pajak MCK Pantai Pasir Jambak	1,000,000	830,000	340,000	1,170,000	117
Pajak MCK Pantai Air Manis	1,500,000	840,000	-	840,000	56
Pajak Kios Pemda Lama	132,000,000	10,287,000	1,000,000	11,287,000	9
Pajak Kios Pemda Baru	198,000,000	36,070,000	1,100,000	37,170,000	19
Pajak Gerobak Danau Cimpago	107,250,000	43,373,000	1,590,000	44,963,000	42
Pajak Gerobak Pantai Padang	33,000,000	12,640,000	250,000	12,890,000	39
Pajak Lokasi Objek Wisata					
Pajak Hiburan / Pameran / Promosi	3,000,000	1,750,000	-	1,750,000	58
Pajak Sound System	700,000	300,000	-	300,000	43
Pajak Orgeon Tunggal	1,800,000	700,000	-	700,000	39
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>837,927,000</b>	<b>357,489,500</b>	<b>80,490,000</b>	<b>437,979,500</b>	<b>52.3</b>

Padang, 28 Desember 2012

Mengetahui :

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Padang

Bendaharawan Penerima  
Disbudpar Kota Padang

**Ir. A S N E L, M.Si**  
NIP.19590114 198509 1 001

**GUSMIZAL, SH**  
NIP. 19700816 200801 1 001

UNIVERSITAS ANDALAS

( 2.04.01 )

**DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA**

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

PEMERINTAH KOTA PADANG  
 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,  
 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2011

PERKANTORAN : 2.04 - PARIWISATA  
 : 2.04.01 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp.)	%	
	2	3	4	5=4-3	6	7
	PENDAPATAN	500,750,000.00	259,222,500.00	(241,527,500.00)	51.77	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	500,750,000.00	259,222,500.00	(241,527,500.00)	51.77	
	Hasil Retribusi Daerah	500,000,000.00	258,472,500.00	(241,527,500.00)	51.69	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	750,000.00	750,000.00	-	100.00	
	Jumlah Pendapatan	500,750,000.00	259,222,500.00	(241,527,500.00)	51.77	
	BELANJA DAERAH	5,726,706,470.00	5,594,965,633.00	(131,740,837.00)	97.70	
	Belanja Tidak Langsung	2,042,736,670.00	2,009,472,329.00	(33,264,341.00)	98.37	
	Belanja Pegawai	2,042,736,670.00	2,009,472,329.00	(33,264,341.00)	98.37	
	Belanja Langsung	3,683,969,800.00	3,585,493,304.00	(98,476,496.00)	97.33	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN	997,253,000.00	948,419,534.00	(48,833,466.00)	95.10	
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3,330,000.00	3,232,500.00	(97,500.00)	97.07	
	Belanja Barang dan Jasa	3,330,000.00	3,232,500.00	(97,500.00)	97.07	
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	108,940,000.00	69,573,514.00	(39,366,486.00)	63.86	
	Belanja Barang dan Jasa	108,940,000.00	69,573,514.00	(39,366,486.00)	63.86	
	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	52,575,000.00	51,841,000.00	(734,000.00)	98.60	
	Belanja Pegawai	1,150,000.00	1,150,000.00	-	100.00	
	Belanja Barang dan Jasa	1,250,000.00	950,000.00	(300,000.00)	76.00	
	Belanja Modal	50,175,000.00	49,741,000.00	(434,000.00)	99.14	
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1,325,000.00	1,115,000.00	(210,000.00)	84.15	
	Belanja Barang dan Jasa	1,325,000.00	1,115,000.00	(210,000.00)	84.15	
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	20,000,000.00	19,963,300.00	(36,700.00)	99.82	
	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	19,963,300.00	(36,700.00)	99.82	
	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	35,000,000.00	34,911,100.00	(88,900.00)	99.75	
	Belanja Barang dan Jasa	35,000,000.00	34,911,100.00	(88,900.00)	99.75	
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15,000,000.00	14,986,500.00	(13,500.00)	99.91	
	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	14,986,500.00	(13,500.00)	99.91	
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7,500,000.00	6,099,500.00	(1,400,500.00)	81.33	
	Belanja Barang dan Jasa	6,540,000.00	5,619,000.00	(921,000.00)	85.92	
	Belanja Modal	960,000.00	480,500.00	(479,500.00)	50.05	
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	60,000,000.00	59,801,150.00	(198,850.00)	99.67	
	Belanja Barang dan Jasa	60,000,000.00	59,801,150.00	(198,850.00)	99.67	
	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	375,285,440.00	374,349,150.00	(936,290.00)	99.75	
	Belanja Barang dan Jasa	375,285,440.00	374,349,150.00	(936,290.00)	99.75	
	RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	10,000,000.00	4,830,000.00	(5,170,000.00)	48.30	
	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	4,830,000.00	(5,170,000.00)	48.30	
	PENYEDIAAN ALAT KEBERSIHAN	25,000,000.00	24,990,100.00	(9,900.00)	99.96	
	Belanja Barang dan Jasa	25,000,000.00	24,990,100.00	(9,900.00)	99.96	
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PUBLIK	106,347,560.00	105,249,220.00	(98,340.00)	99.91	
	Belanja Pegawai	106,347,560.00	106,249,220.00	(98,340.00)	99.91	
	PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	176,950,000.00	176,477,500.00	(472,500.00)	99.73	

REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5=4-3	6	7
401 01 22 5 2 1	Belanja Pegawai	176.950.000,00	176.477.500,00	(472.500,00)	99,73	
401 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	266.391.800,00	265.714.800,00	(677.000,00)	99,75	
401 02 22	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	14.665.900,00	(334.100,00)	97,77	
401 02 22 5 2 1	Belanja Pegawai	5.290.000,00	5.027.500,00	(262.500,00)	95,04	
401 02 22 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	9.710.000,00	9.638.400,00	(71.600,00)	99,26	
401 02 24	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	221.391.800,00	221.309.400,00	(82.400,00)	99,96	
401 02 24 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	221.391.800,00	221.309.400,00	(82.400,00)	99,96	
401 02 26	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	29.739.500,00	(260.500,00)	99,13	
401 02 26 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.739.500,00	(260.500,00)	99,13	
401 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	12.150.000,00	11.840.400,00	(309.600,00)	97,45	
401 03 05	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	12.150.000,00	11.840.400,00	(309.600,00)	97,45	
401 03 05 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	11.840.400,00	(309.600,00)	97,45	
401 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.000.000,00	8.460.000,00	(1.540.000,00)	84,60	
401 06 01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.000.000,00	8.460.000,00	(1.540.000,00)	84,60	
401 06 01 5 2 1	Belanja Pegawai	5.376.000,00	5.340.000,00	(36.000,00)	99,33	
401 06 01 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	4.624.000,00	3.120.000,00	(1.504.000,00)	67,47	
401 16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	82.375.000,00	82.375.000,00	-	100,00	
401 16 14	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN	82.375.000,00	82.375.000,00	-	100,00	
401 16 14 5 2 1	Belanja Pegawai	80.200.000,00	80.200.000,00	-	100,00	
401 16 14 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	2.175.000,00	-	100,00	
401 20	PROGRAM PEMBINAAN SENI DAN BUDAYA DAERAH	643.100.000,00	632.269.000,00	(10.831.000,00)	98,32	
401 20 01	PENAMPILAN SENI TRADISIONAL MINANGKABAU SECARA RUTIN DAN BERKALA	190.000.000,00	183.828.000,00	(6.172.000,00)	96,75	
401 20 01 5 2 1	Belanja Pegawai	34.175.000,00	29.093.000,00	(5.082.000,00)	85,13	
401 20 01 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	155.825.000,00	154.735.000,00	(1.090.000,00)	99,30	
401 20 03	PELAKSANAAN EVENT-EVENT KESENIAN DALAM DAN LUAR NEGERI	100.700.000,00	99.780.000,00	(920.000,00)	99,09	
401 20 02 5 2 1	Belanja Pegawai	2.875.000,00	2.875.000,00	-	100,00	
401 20 02 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	97.825.000,00	96.905.000,00	(920.000,00)	99,06	
401 20 06	FESTIVAL SITTI NURBAYA	205.400.000,00	202.674.000,00	(2.726.000,00)	98,67	
401 20 06 5 2 1	Belanja Pegawai	14.425.000,00	14.399.000,00	(26.000,00)	99,82	
401 20 06 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	190.975.000,00	188.275.000,00	(2.700.000,00)	98,59	
401 20 07	FESTIVAL KESENIAN TRADISIONAL MINANGKABAU (PENDUKUNG KEGIATAN FESTIVAL SITTI NURBAYA)	147.000.000,00	145.987.000,00	(1.013.000,00)	99,31	
401 20 07 5 2 1	Belanja Pegawai	17.785.000,00	17.745.000,00	(40.000,00)	99,78	
401 20 07 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	129.215.000,00	128.242.000,00	(973.000,00)	99,25	
401 15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	15.000.000,00	14.914.000,00	(86.000,00)	99,43	
401 15 68	INVENTARISASI DAN LABELISASI ASET TETAP SKPD	15.000.000,00	14.914.000,00	(86.000,00)	99,43	
401 15 68 5 2 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	11.314.000,00	(86.000,00)	99,25	
401 15 68 5 2 1	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
401 15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	34.800.000,00	33.190.000,00	(1.610.000,00)	95,37	
401 15 09	PENGEMBANGAN WEBSITE RESMI PARIWISATA KOTA PADANG	34.800.000,00	33.190.000,00	(1.610.000,00)	95,37	
401 15 09 5 2 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
401 15 09 5 2 1	Belanja Barang dan Jasa	33.700.000,00	32.090.000,00	(1.610.000,00)	95,22	

KEREKENING	URAIAN	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5=4-3	6	7
2401 16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	930.000.000,00	913.671.295,00	(16.328.705,00)	98,24	
2401 16 13	MASTER PLAN PENGEMBANGAN KAWASAN PANTAI PADANG	816.100.000,00	808.862.155,00	(7.237.845,00)	99,11	
2401 16 13 5 2 1	Belanja Pegawai	15.350.000,00	12.725.000,00	(2.625.000,00)	82,90	
2401 16 13 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	800.750.000,00	796.137.155,00	(4.612.845,00)	99,42	
2401 16 14	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BANGUNAN OBYEK WISATA KOTA PADANG	60.000.000,00	59.434.800,00	(565.200,00)	99,06	
2401 16 14 5 2 1	Belanja Pegawai	17.357.500,00	17.335.000,00	(22.500,00)	99,87	
2401 16 14 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	42.642.500,00	42.099.800,00	(542.700,00)	98,73	
2401 16 15	PEMBINAAN USAHA PARIWISATA KOTA PADANG DAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA	53.900.000,00	45.374.340,00	(8.525.660,00)	84,18	
2401 16 15 5 2 1	Belanja Pegawai	29.985.000,00	21.709.340,00	(8.275.660,00)	72,40	
2401 16 15 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	23.915.000,00	23.665.000,00	(250.000,00)	98,95	
2401 17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	629.650.000,00	620.145.975,00	(9.504.025,00)	98,49	
2401 17 10	PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN LUAR NEGERI	101.450.000,00	100.584.875,00	(865.125,00)	99,15	
2401 17 10 5 2 1	Belanja Pegawai	9.725.000,00	9.575.000,00	(150.000,00)	98,46	
2401 17 10 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	91.725.000,00	91.009.875,00	(715.125,00)	99,22	
2401 17 12	PELAKSANAAN KEGIATAN TOUR DE SINGKARAK	373.200.000,00	369.107.100,00	(4.092.900,00)	98,90	
2401 17 12 5 2 1	Belanja Pegawai	29.960.000,00	29.960.000,00	-	100,00	
2401 17 12 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	343.240.000,00	339.147.100,00	(4.092.900,00)	98,81	
2401 17 13	TALK SHOW KEPARIWISATAAN DAN TIC	80.000.000,00	76.654.000,00	(3.346.000,00)	95,82	
2401 17 13 5 2 1	Belanja Pegawai	43.463.000,00	41.057.000,00	(2.406.000,00)	94,46	
2401 17 13 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	36.537.000,00	35.597.000,00	(940.000,00)	97,43	
2401 17 14	PEMBUATAN BAHAN-BAHAN PROMOSI PARIWISATA	75.000.000,00	73.800.000,00	(1.200.000,00)	98,40	
2401 17 14 5 2 1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00	-	100,00	
2401 17 14 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	71.950.000,00	70.750.000,00	(1.200.000,00)	98,33	
2401 18	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK KEPARIWISATAAN DAERAH	63.250.000,00	54.493.300,00	(8.756.700,00)	86,16	
2401 18 01	REVISI PERDA NO.25 TAHUN 2002 DAN NO.4 TAHUN 2004	38.250.000,00	34.366.800,00	(3.883.200,00)	89,85	
2401 18 01 5 2 1	Belanja Pegawai	22.915.000,00	21.807.000,00	(1.108.000,00)	95,16	
2401 18 01 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	15.335.000,00	12.559.800,00	(2.775.200,00)	81,90	
2401 18 02	EVALUASI KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	25.000.000,00	20.126.500,00	(4.873.500,00)	80,51	
2401 18 02 5 2 1	Belanja Pegawai	4.270.000,00	3.654.000,00	(616.000,00)	85,57	
2401 18 02 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	20.730.000,00	16.472.500,00	(4.257.500,00)	79,46	
	Jumlah Belanja	5.726.706.470,00	5.594.965.633,00	(131.740.837,00)	97,70	
	Surplus/(Defisit)	(5.225.956.470,00)	(5.335.743.133,00)	(109.786.663,00)	102,10	



*T. Opih Dafa Muband.*

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

KEPARIWISATAAN

UNIVERSITAS ANDALAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
- c. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
- d. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
- e. bahwa . . .

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepariwisataaan;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPARIWISATAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

2. Wisatawan . . .

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

9. Industri . . .

9. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.

BAB II  
ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus . . .

- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

### BAB III

#### PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

##### Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;

d. memelihara . . .

- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### BAB IV

#### PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

#### Pasal 7A

Pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran . . .

- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 9

- (1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.
- (3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

(5) Rencana . . .

- (5) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 11

Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Pasal 12

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

a. sumber . . .

- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
  - b. potensi pasar;
  - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
  - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
  - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

#### Pasal 13

- (1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.

(2) Kawasan . . .

- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Kawasan strategis pariwisata nasional ditetapkan oleh Pemerintah, kawasan strategis pariwisata provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (4) Kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-undang.

## BAB VI

### USAHA PARIWISATA

#### Pasal 14

- (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa . . .

- i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. spa.
- (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 15

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 16

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

#### Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat . . .

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

UNIVERSITAS ANDALAS

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Setiap orang berhak:

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

(2) Setiap . . .

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

(2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:

- a. menjadi pekerja/buruh;
- b. konsinyasi; dan/atau
- c. pengelolaan.

Pasal 20

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 21

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 22

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;

b. membentuk . . .

- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 23

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.

UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 24

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 25

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 26 . . .

Pasal 26

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan . . .

- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pemerintah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;

b. mengoordinasikan . . .

- b. mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi;
- c. menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan daya tarik wisata nasional;
- e. menetapkan destinasi pariwisata nasional ;
- f. menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- g. mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
- h. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- i. melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional;
- j. memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan;
- k. memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- l. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat;
- m. mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan; dan
- n. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 29

Pemerintah provinsi berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
- e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;
- f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
- h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 30

Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;

f. memfasilitasi . . .

- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

#### Pasal 31

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah atau lembaga lain yang tepercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Dalam menyediakan dan penyebarluaskan informasi, Pemerintah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB IX  
KOORDINASI

Pasal 33

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina;
  - b. bidang keamanan dan ketertiban;
  - c. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
  - d. bidang . . .

- d. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
- e. bidang promosi pariwisata dan kerja sama luar negeri.



- (1) Pemerintah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang berkedudukan di ibu kota negara.

(2) Badan . . .

- (2) Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 37

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Indonesia terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

#### Pasal 38

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
  - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
  - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
  - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
  - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia diusulkan oleh Menteri kepada Presiden untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

(4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

## UNIVERSITAS ANDALAS

### Pasal 39

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

### Pasal 40

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Pasal 41 . . .

Pasal 41

(1) Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai tugas:

- a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

(2) Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai fungsi sebagai:

- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
- b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

(1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Indonesia berasal dari:

- a. pemangku kepentingan; dan

b. sumber . . .

- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

## Bagian Kedua

### Badan Promosi Pariwisata Daerah

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 44 . . .

Pasal 44

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 45

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
  - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
  - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
  - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
  - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 46 . . .

Pasal 46

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 47

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 48

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
  - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
  - b. meningkatkan . . .

- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
  - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
  - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
  - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 49

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
- a. pemangku kepentingan; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelolaan . . .

- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

## UNIVERSITAS ANDALAS

### BAB XI

#### GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA

##### Pasal 50

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuk satu wadah yang dinamakan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia terdiri atas:
  - a. pengusaha pariwisata;
  - b. asosiasi usaha pariwisata;
  - c. asosiasi profesi; dan
  - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
- (4) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.

(5) Gabungan . . .

(5) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia melakukan kegiatan, antara lain:

- a. menetapkan dan menegakkan Kode Etik Gabungan Industri Pariwisata Indonesia;
- b. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
- c. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata Indonesia dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;
- d. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
- e. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah di bidang kepariwisataan.

#### Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XII . . .

BAB XII  
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI,  
SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA



Pasal 52

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 53

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.

(2) Standar . . .

- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketiga

#### Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

#### Pasal 56

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XIII  
PENDANAAN

Pasal 57

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

Pasal 58

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 59

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 60

Pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil diberikan insentif yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 61 . . .

Pasal 61

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 63

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

(3) Teguran . . .

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB XVI . . .

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus telah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 66

- (1) Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 untuk pertama kalinya difasilitasi oleh Pemerintah.
- (2) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah dibentuk dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 68 . . .

Pasal 68

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3427), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 70

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Nomer: KM.67 / UM.001 / MKP / 2004

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PARIWISATA  
DI PULAU-PULAU KECIL

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- Menimbang :**
- a. bahwa pulau-pulau kecil dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, keunikan biofisik dan kekhasan budaya masyarakatnya memiliki potensi besar sebagai salah satu sumberdaya penggerak pembangunan pariwisata.
  - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya wisata pulau-pulau kecil melalui pengelolaan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dan budaya serta pembangunan daerah, dipertukan adanya pengaturan pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil dalam bentuk pedoman umum
  - c. bahwa sehubungan hal tersebut, perlu ditetapkan Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau Kecil dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-undang nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3247);
  3. Undang-Undang nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  5. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
7. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
8. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
10. Keputusan Presiden nomor 187/M tahun 2004 tentang Kahinet Indonesia Bersatu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PULAU-PULAU KECIL
- PERTAMA Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau Kecil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- KEDUA Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan acuan bagi instansi Pemerintah di pusat dan daerah, swasta, organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kegiatan pariwisata di pulau-pulau kecil.
- KETIGA Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 November

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

LAMPIRAN : Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata

NOMOR : KM.67/UM.001/MKP/2004

TANGGAL : 30 November 2004

-----

## PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PULAU-PULAU KECIL

### B A B I

#### PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.504 buah pulau, dengan garis pantai membentang sepanjang 81.000 km. Dari sejumlah pulau tersebut lebih dari 10.000 pulau merupakan pulau-pulau kecil, bahkan sangat kecil, belum bernama dan tidak dihuni penduduk.

Pulau-pulau kecil memiliki potensi sumber daya terbaru yang seringkali dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Potensi pulau-pulau kecil dari segi keanekaragaman hayati, keindahan panorama alam dan budaya dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, termasuk pariwisata.

Pulau-pulau kecil memiliki potensi ketautan yang cukup besar. Potensi perikanan didukung oleh adanya ekosistem terumbu karang, padang lamun dan hutan bakau yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi serta bernilai ekonomi. Pulau-pulau kecil juga memiliki potensi bagi pengembangan wisata bahari.

Pulau kecil mempunyai tangkapan air (catchment) yang relatif kecil sehingga kebanyakan air dan sedimen hilang ke dalam air. Dari segi budaya, masyarakat yang mendiami pulau kecil mempunyai budaya yang berbeda dengan pulau kontinen dan daratan (Dahuri, 1998). Pulau kecil dapat dipandang sebagai sebuah ekosistem dimana setiap karakter alam berada dalam jalinan kesalingterhubungan (McElroy and Klaus, 1990).

Tiga kriteria yang dapat digunakan dalam membuat batasan suatu pulau kecil :

1. Batasan fisik (luas pulau).
2. Batasan ekologis (proporsi spesies endemik dan terisolasi).
3. Keunikan budaya.

Pulau kecil memiliki karakteristik biofisik yang menonjol, yaitu:

1. tangkapan air yang terbatas dan sumberdaya / cadangan air tawar yang sangat rendah dan terbatas
2. peka dan rentan terhadap berbagai tekanan (*stressor*) dan pengaruh eksternal baik alami maupun akibat kegiatan manusia, seperti badai dan gelombang besar serta pencemaran;
3. memiliki sejumlah besar jenis-jenis (organisme) endemik dan keanekaragaman yang tipikal

dan bernilai tinggi (Bengen, 2000; Ongkosongo 1998; Sugandhy, 1998)

Meningkatnya kecenderungan pasarpariwisata internasional untuk berwisata di kawasan yang masih alami memberikan peluang bagi pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil. Kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap upaya pemeliharaan dan kelestarian lingkungan berdampak pada perlunya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan yang lebih luas.

Pulau-pulau kecil perlu diberdayakan secara optimal dan lestari sesuai dengan karakteristik dan potensinya masing-masing.

Dilain pihak pulau-pulau kecil memiliki daya dukung yang terbatas, yang perlu dipertimbangkan dalam pemanfaatannya untuk suatu kegiatan, termasuk kegiatan pariwisata. Karakteristik fisik pulau yang kecil, umumnya berakibat pada keterbatasan sumber daya air, kerentanan terhadap ancaman bencana alam, penduduk yang relatif miskin, serta keterisolasian dari wilayah lain.

Pengembangan kegiatan pariwisata di pulau-pulau kecil berpotensi memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Dampak tersebut dapat dilihat dari segi fisik alami, binaan, sosial budaya dan ekonomi. Dampak positif perlu dioptimalkan sementara dampak negatif tentunya harus diminimasi bahkan jika memungkinkan dihilangkan.

Dengan berlakunya Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah diwajibkan untuk dapat mengembangkan dan mengelola potensi daerahnya masing-masing. Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan kebijakan makro sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah. Untuk itu diperlukan satu "pedoman" bagi pemerintah daerah dalam mengelola pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil yang termasuk dalam wilayahnya, termasuk dalam penyusunan peraturan, pengawasan, pemantauan dan pengelolaan pariwisata pulau-pulau kecil tersebut.

## B. Tujuan

Sesuai dengan perkembangan dan pergeseran paradigma dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan serta dalam upaya optimalisasi pendapatan Pemerintah Daerah dari sektor pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pedoman pengembangan kawasan pariwisata di pulau-pulau kecil ini adalah " Mengembangkan potensi pulau-pulau kecil melalui pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang berdaya saing global, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dan budaya serta pembangunan daerah dalam bingkai NKRI ".

## C. Sasaran

Sasaran dari pedoman ini adalah : Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil yang terarah dan bertanggung jawab.

Pedoman ini memuat prinsip-prinsip beserta rambu-rambu umum dalam pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil. Pemerintah Daerah dapat berinisiatif dan mengatur

hal-hal yang bersifat implementatif dalam pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil, dengan memanfaatkan kekhasan daerahnya.

#### D. Batasan Peristilahan

**Pulau** : Masa daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air dan selalu berada/muncul di atas air pasang tinggi (UNCLOS, 1982).

**Pulau Kecil** : pulau yang memiliki luas daratan kurang atau sama dengan 10.000 km<sup>1</sup> dengan jumlah penduduknya kurang atau sama dengan 100.000 orang (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 jo. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2002).

**Pulau untuk kepentingan kepariwisataan** : pulau dengan luas kurang atau sama dengan 2000 km<sup>1</sup> (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau Kecil ( Yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat).

**Pulau-pulau kecil** : kumpulan pulau-pulau (gugusan pulau) yang secara fungsional saling berinteraksi dari sisi ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya, baik secara individual maupun secara sinergis dapat meningkatkan skala ekonomi dari pengelolaan sumber dayanya.

**Pengembangan Pariwisata di pulau-pulau kecil** : pengembangan pariwisata melalui pola pembangunan usaha sarana akomodasi, makan dan minum, angkutan wisata (darat dan air), penyediaan sarana wisata alam dan minat khusus, yang dikembangkan dan dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu di satu pulau kecil.

**Ekosistem** : sebuah entitas yang terdiri dari tumbuhan, hewan serta lingkungan di sekitarnya, serta pertukaran energi dan materi pada lingkungan tersebut (Barbour, 1998). Ekosistem merupakan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan hukum menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan hidup.

**Konservasi sumber daya alam** : pengelolaan sumber alam terbaharui dan tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

**Daya dukung lingkungan** : kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

**Pengelolaan berkelanjutan** : pengelolaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan

aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang. Pada kondisi-kondisi ekologis tersebut seharusnya ditambahkan faktor-faktor sosial yang berpengaruh langsung pada berkelanjutannya interaksi antara kelompok masyarakat dan lingkungan fisiknya (Dutton and Hal, 1989).

**Pariwisata berkelanjutan** :penyelenggaraan pariwisata bertanggung jawab yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang, dengan menerapkan prinsip-prinsip, layak secara ekonomi (*economically feasible*) dan lingkungan (*environmentally viable*). cinema secara sosial (*socially acceptable*) dan tepat guna secara teknologi (*technologically appropriate*).

**Pembangunan pariwisata berkelanjutan**: adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat di daerah tujuan saat ini dengan tetap menjaga dan meningkatkan kesempatan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dicitrakan menjadi patokan dalam pengaturan sumber daya sehingga kebutuhan ekonomi, sosial dan estetis tercapai, dengan tetap menjaga integritas budaya, proses-proses dan keanekaragaman hayati.



## PRINSIP PRINSIP PENGEMBANGAN

Prinsip pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil tidak dapat dilepaskan dari konsepsi pembangunan kepariwisataan nasional. Dengan demikian pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus memperkuat nilai kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Pada hakekatnya pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus berlandaskan pada agama dan budaya lokal, dengan memperhatikan dan menghormati hak-hak ulayat masyarakat di sekitarnya.

Penyelenggaraan pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus menggunakan prinsip berkelanjutan di mana secara ekonomi memberikan keuntungan, memberikan kontribusi pada upaya pelestarian sumber daya alam, serta sensitif terhadap budaya masyarakat lokal. Oleh karena itu pengembangan pariwisata di pulau-pulau harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

**A. Prinsip Keseimbangan**

*Pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus didasarkan pada komitmen pola keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial budaya dan konservasi.*

Konsep pembangunan yang konvensional, yaitu pembangunan dengan penekanan hanya pada aspek ekonomi, harus dibayar mahal dengan ketimpangan dan kerusakan sosial budaya dan lingkungan. Oleh karena itu pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dimana aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertentangkan.

Dalam konteks ini, selain mampu berkembang secara ekonomi, pariwisata di pulau-pulau kecil juga harus mampu mengembangkan aspek sosial-budaya masyarakat di sekitarnya, serta meningkatkan kualitas atau upaya konservasi lingkungan hidup. Dengan demikian manfaat dan pengembangan ini bukan hanya dirasakan oleh pengembang, namun juga oleh masyarakat di pulau-pulau kecil tersebut.

**B. Prinsip Partisipasi Masyarakat**

*Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan usaha pariwisata*

Proses pelibatan masyarakat, baik secara aktif maupun pasif, harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga tahap pengelolaan dan pengembangan. Hal ini akan menumbuhkan tanggung jawab dan rasa memiliki yang akan menentukan keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil tersebut.

Dialog dengan umpan balik dari masyarakat dalam upaya pengambilan keputusan pengembangan pariwisata di pulau kecil, akan memperkaya dan menjadi nilai tambah suatu kegiatan yang akan dijalankan. Selain itu diperlukan kejujuran dan keterbukaan untuk memperoleh kepercayaan dari pihak lain yang terlibat dalam proses partisipasi tersebut. Masyarakat harus difasilitasi dalam keterlibatannya, termasuk menginformasikan konsekuensi dan keterlibatan, dan menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dapat menjadi nilai tambah.

### C. Prinsip Konservasi

*Memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan (alam dan budaya). Pengembangan harus diselenggarakan secara bertanggung jawab dan mengikuti kaidah-kaidah ekologi serta peka dan menghormati nilai-nilai sosialbudaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat.*

Pariwisata dan pelestarian lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan, dimana sumber daya alam (ekosistem, bentang alam, keaneka ragaman hayati) dan hasil-hasil kebudayaan serta peninggalan sejarah merupakan modal dasar dan daya tarik pariwisata. Di sisi lain pembangunan fasilitas dan infrastruktur pariwisata untuk wisatawan dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan budaya serta peninggalan sejarah tersebut.

Mengingat karakteristik pulau-pulau kecil yang antara lain relatif terisolasi; terbatas dari segi ukuran geografis dan sumberdaya, baik alam maupun manusia; tingkat keanekaragaman yang rendah namun memiliki jenis-jenis endemik yang lebih tinggi; maka pulau-pulau kecil sangat rentan akan suatu perubahan. Kerusakan lingkungan atau ketimpangan sosial akan dengan cepat memberikan dampak pada pariwisata yang dikembangkan. Dalam upaya meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan pariwisata, beberapa langkah dapat ditempuh, seperti: penentuan ambang batas (*carrying capacity*), baik secara sosial (*tourism social carrying capacity*) dan dialog's (*tourism ecological carrying capacity*). Berdasarkan jumlah ambang batas tersebut, baru dilaksanakan pembuatan sarana dan prasarana penunjang yang ditakukan dengan studi AMDAL.

### D. Prinsip Keterpaduan

*Pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus direncanakan secara terpadu dengan memperhatikan ekosistem pulau dan disinerjikan dengan pembangunan berbagai sektor.*

Pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus disesuaikan dengan dinamika sosial budaya masyarakat setempat, dinamika ekologi di pulau tersebut dan daerah sekitarnya. Disamping itu pengembangan pariwisata sebagai salah satu bagian dari pembangunan, harus disesuaikan dengan kerangka dan rencana pembangunan daerah.

### E. Prinsip Penegakan Hukum

Pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus dikembangkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada, serta dilaksanakan dengan penegakan hukum maupun peraturan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil. Dengan demikian, pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan di atas agar dapat dinikmati tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

**A. Perbedaan Karakteristik Pulau-pulau Kecil**

Pulau-pulau kecil memiliki perbedaan karakteristik dilihat dari aspek fisik, sosial budaya, maupun lainnya.

**1. Fisik**

Secara fisik, pulau-pulau kecil dapat bervariasi berdasarkan :

- a) **Ukuran** : Beragam ukuran pulau, beberapa definisi menyebutkan pulau-pulau kecil adalah pulau dengan ukuran kurang atau sama dengan 2000 km<sup>2</sup> (Keppmen UKP No. 41 tahun 2001). Definisi lain menyebutkan bahwa pulau-pulau kecil adalah pulau dengan ukuran antara 11 hingga 1000 km<sup>2</sup>. Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan pulau-pulau sangat kecil adalah pulau yang berukuran kurang dari 10 km<sup>2</sup>. Sementara dilihat dari ukuran panjang pulau, beberapa definisi menjelaskan bahwa pulau kecil memiliki ukuran panjang kurang dari 10 km. Sedangkan definisi yang lain menyebutkan bahwa panjang maksimum sebuah pulau kecil adalah 50 km.
- b) **Litologi** (batuan penyusunannya) : pulau dapat terbentuk karena beberapa penyebab, diantaranya adalah karena proses pengendapan (*depositional island*), karena proses pengikisan (*erosional island*), karena penumpukan karang dari terumbu karang, penyebab vulkanik, maupun tektonik, atau gabungan dari beberapa penyebab, misalnya penyebab tektonik yang kemudian dilanjutkan dengan pengikisan. Perbedaan proses pembentukan pulau menyebabkan masing-masing pulau memiliki karakteristik litologi yang berbeda-beda.

2. **Geomorfologi** : merupakan bentukan rupa bumi dari suatu pulau yang meliputi kemiringan tanah serta elevasinya terhadap pasang surut. Pulau yang tergolong terjal memiliki derajat kemiringan 46° hingga 70° ; terjal sedang 10° - 45° , sedangkan pulau landai memiliki kemiringan kurang dari 10°. Topografi sebuah pulau dapat berupa dataran atau berbukit- bukit dengan ketinggian yang berbeda. Pulau tinggi rentang ketinggian antara 501-1.000 mdpl. Pulau ketinggian sedang berkisar antara 11-500 mdpl dan pulau rendah 3-11 mdpl. Pulau dengan ketinggian kurang dari 3 meter disebut pulau pasang surut.

- a) **Keberadaan tutupan biota** : tutupan biota dari suatu pulau dapat

diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu biota yang berbeda di atas air dan biota yang terendam. Di daerah daratan pulau sendiri, terdapat pulau yang memiliki tutupan biota yang sangat beragam hingga hanya didominasi oleh satu jenis vegetasi. Ada pula pulau yang daratannya tidak memiliki tutupan biota. Pulau yang terpisah jauh dengan daratan utama (*mainland*) dengan tutupan biota yang sangat beragam, biasanya memiliki jumlah jenis endemik yang tinggi. Di bagian pulau yang terendam air (daerah tepi), ada pulau yang memiliki tutupan terumbu karang, daerah mangrove, dan padang lamun, ada yang hanya memiliki salah satu diantaranya, atau tidak ketiganya. Keberadaan tutupan biota dapat digunakan sebagai penetapan ukuran sebuah pulau. Pada beberapa negara dengan tipe pulau-pulau atol, ukuran

Sebuah pulau dihitung dari total luas dataran ditambah dengan luasan perairan di sekitarnya dengan ketentuan kedalaman sesuai fungsinya untuk perlindungan biota.

b) **Geografi** : beberapa pulau terletak di daerah yang strategis, dekat dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang penting bagi daerah sekitarnya. Daerah yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi biasanya memiliki tingkat kemudahan pencapaian yang tinggi. Sedangkan beberapa pulau terletak di daerah yang terpencil dan kurang strategis, sehingga tingkat aksesibilitasnya pun kurang.

### 3. **Sosial Budaya**

Pulau-pulau kecil dapat memiliki perbedaan budaya, keberadaan, dan kepadatan penduduk :

a) **Budaya** : kebudayaan penduduk yang berada di pulau-pulau kecil dapat sangat khas, terutama pulau-pulau yang terpisah cukup jauh dari daratan utama. Beberapa pulau kecil juga memiliki penduduk yang berasal dari berbagai suku bangsa, sehingga memiliki kebudayaan yang telah bercampur dan berbeda-beda.

b) **Keberadaan penduduk** : pulau-pulau kecil ada yang ditinggali penduduk dan ada pula yang tidak ditinggali penduduk (kosong), atau hanya digunakan untuk kegiatan tertentu, seperti budidaya pertanian atau upacara tradisional keagamaan pada waktu tertentu.

4. **Kepadatan** : pulau-pulau kecil yang ditinggali penduduk juga memiliki kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Pulau dengan populasi penduduk sangat padat berkisar antara 1.001-10.000 orang/km<sup>2</sup>. Sedangkan pulau dengan kepadatan penduduk sedang memiliki kepadatan 101-1001 orang/km<sup>2</sup>, dan kepadatan rendah 11-101 orang/km<sup>2</sup>.

5. **Lain-lain :**

- a) **Kepemilikan** : dari segi status kepemilikan, pulau-pulau kecil dapat dimiliki oleh pribadi, pemerintah atau dikelola oleh swasta.
- b) **Pemanfaatan khusus** : pemanfaatan pulau-pulau secara khusus dapat terjadi karena letak dan fungsinya yang dimanfaatkan untuk tujuan khusus untuk penelitian, pulau militer, pulau penjara, pulau batas negara, pulau tambang minyak dan gas bumi, maupun pulau yang menjadi suaka alam dan zona inti area konservasi yang menyebabkan aksesibilitas dan mobilitas menjadi terbatas. Hal-hal tersebut menyebabkan potensi dan daya dukung setiap pulau kecil menjadi terbatas dan berbeda-beda. Ketersediaan sumber daya Manusia yang terdapat di setiap pulau juga akan berbeda, sehingga akan berpengaruh pada kesesuaian peruntukan bagi kegiatan tertentu, termasuk kegiatan pariwisata. Di lain pihak, perbedaan karakteristik pulau-pulau akan menimbulkan perbedaan daya tarik yang beragam antara satu pulau dengan pulau lainnya. Karakteristik suatu pulau kecil akan menentukan pengembangan pariwisata yang sesuai, baik dari segi skala luas, jenis pembangunan sarana dan prasarana penunjang, serta intensitas kegiatan pariwisatanya.

## B. Perbedaan Kegiatan Pariwisata

Dilihat dari daya tariknya, keanekaragaman daya tarik wisata di pulau-pulau kecil dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, daya tarik wisata yang berbasis sumber daya alam daratan (seperti hutan, gunung, sungai, danau maupun pantai) dan sumber daya laut (seperti: terumbu karang, gua dan gunung api bawah laut). Kedua, daya tarik wisata yang berbasis warisan maupun pusaka budaya (*cultural heritage*) baik yang bersifat nyata (*tangible*) seperti situs, makam, istana, maupun yang bersifat tidak nyata (*intangible*) seperti pertunjukan budaya atau tradisi budaya masyarakat. Selain kedua jenis pariwisata yang memanfaatkan langsung potensi sumber daya (alam dan budaya) diatas, juga terdapat wisata buatan yang pada intinya juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Wisata buatan pada hakikatnya merupakan hasil karya cipta manusia yang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang secara langsung atau tidak langsung dapat menjadi objek

dan daya tarik wisata tertentu seperti wisata belanja, pendidikan, olahraga, atau taman rekreasi (*theme park*).

Kegiatan wisata alam daratan diantaranya kegiatan menikmati bentang alam, olah raga pantai, pengamatan satwa, Jelajah hutan, mendaki gunung dan lain sebagainya. Sementara kegiatan wisata bahari mencakup *snorkeling*, menyelam (*diving*), selancar angin (*parasailing*), selancar (*surfing*), memancing (*fishing*), ski-air, berperahu (*canoewing*), berperahu kayak (*sea kayaking*) dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan wisata yang berbasis budaya seperti kegiatan menangkap ikan, mengolah ikan, mengamati kebiasaan hidup para nelayan sehari-hari, melihat adat istiadat yang berlaku diperkampungan nelayan, melihat bangunan rumah-rumah nelayan, melihat upacara adat yang biasa dilakukan para nelayan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan tujuannya kegiatan wisata dapat dibedakan menjadi wisata minat khusus dan wisata umum (rekreasi). Wisata minat khusus merupakan suatu bentuk perialanan dimana wisatawan mengunjungi suatu tempat karena memiliki minat atau tujuan khusus mengenai suatu jenis objek atau kegiatan yang dapat ditemui atau dilakukan dilokasi atau daerah tujuan wisata tersebut. Dalam wisata minat khusus, wisatawan terlibat secara aktif pada berbagai kegiatan di lingkungan fisik atau komunitas yang dikunjunginya.

Sementara itu kegiatan wisata umum atau kegiatan rekreasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dilaksanakan pada waktu luang secara bebas dan menyenangkan. Dalam kegiatan rekreasi tidak ada tujuan khusus yang ingin dicapai dan memang untuk bersenang-senang. Pengembangan kegiatan rekreasi saat ini diarahkan pada kegiatan rekreasi edukatif, yang juga bertujuan agar wisatawan mendapatkan tambahan pengamatan atau pengetahuan yang bermanfaat.

Intensitas suatu kegiatan wisata dapat beragam, dari yang berintensitas rendah, sedang, hingga tinggi. Intensitas kegiatan akan berimplikasi pada daya dukung dan dampak yang menyertainya. Untuk daerah-daerah dengan keterbatasan daya dukung, tentunya pembangunan kegiatan wisata yang sesuai adalah yang memiliki intensitas rendah sampai sedang.

Kegiatan wisata minat khusus maupun rekreasi umum dapat dilakukan di pulau-pulau kecil. Namun mengingat karakteristik pulau-pulau kecil dan keterbatasan daya dukungnya, maka pengembangan kegiatan wisata di pulau-pulau kecil lebih diarahkan pada pengembangan kegiatan wisata minat khusus sebagai

kegiatan utama, dan kegiatan wisata rekreasi edukatif sebagai kegiatan pendukung.

### **C. Perbedaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata.**

Adanya kegiatan pariwisata di suatu tempat berimplikasi pada kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang yang bervariasi baik jenis maupun bentuk dan konstruksi fisiknya tergantung pada sumber daya jenis kegiatan wisata yang dikembangkan.

Sarana dan prasarana penunjang diadakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama mereka tinggal dan berwisata di suatu daerah tujuan wisata tertentu, termasuk kebutuhan makan minum, dan tidur dan hal-hal mendasar lainnya. Fasilitas yang disediakan mencakup akomodasi, rumah makan, transportasi, dan beberapa fasilitas umum pertokoan lainnya yang terkait langsung dengan wisatawan.

Berdasarkan sumber daya dan kegiatan wisata yang dikembangkan, terdapat fasilitas khusus yang sangat spesifik, hanya diperlukan untuk kegiatan yang satu, tetapi tidak atau kurang dibutuhkan untuk kegiatan lainnya. Kegiatan wisata bahari selam misalnya, membutuhkan sarana penunjang untuk mendukung para penyelam, seperti kapal, dermaga, tabung oksigen, kompresor dan lain-lain.

Bentuk dan konstruksi sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan juga sangat beragam. Penyediaan dermaga bagi kapal bisa bervariasi dari yang sederhana untuk kapal-kapal kecil hingga dermaga besar berkelas untuk pelabuhan kapal penyeberangan. Penyediaan fasilitas akomodasi misalnya akan sangat beragam, dari hotel bintang lima bertingkat banyak hingga losmen atau home stay sederhana atau bahkan bangunan semi permanen.

Mengingat karakteristik pulau-pulau kecil sangat khas, keterbatasan daya dukung dan jenis kegiatan wisata yang dapat dikembangkan di pulau-pulau kecil, maka penyediaan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan pun perlu direncanakan secara cermat, disesuaikan dengan potensi dan daya dukung masing-masing pulau. Jika memang tidak memungkinkan adanya pembangunan fisik satu pulau, maka pengadaan sarana dan prasarana penunjang harus diadakan di pulau lain, sementara kegiatan wisatanya masih mungkin tetap berlangsung di pulau tersebut.

#### D. Implikasi

Pengembangan kegiatan wisata maupun penyediaan penunjang kepariwisataan di pulau-pulau kecil akan berdampak pada lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi pulau-pulau kecil tersebut. Di lain pihak pengembangan pariwisata harus bermanfaat secara ekologis dan ekonomis, baik bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat lokal. Sementara itu peraturan-peraturan yang sudah ada yang terkait dengan pengelolaan pulau-pulau belum tentu bisa langsung diterapkan sama untuk setiap pulau-pulau kecil. Setiap pulau memiliki karakteristik yang khas, demikian juga dengan kegiatan wisata yang sangat beragam Jenis dan skalanya. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pengembangan kegiatan pariwisata di pulau-pulau kecil. Perlu ditentukan pulau-pulau kecil mana dan dengan karakteristik seperti apa yang dapat dikembangkan. Lebih lanjut perlu ditentukan peruntukan kegiatan pariwisata yang seperti apa yang sesuai, dengan sarana prasarana yang juga direncanakan dengan cemat.

Pada prinsipnya Pemerintah Daerah memiliki pilihan dalam menentukan bentuk pengembangan pariwisata, atau bahkan pilihan untuk tidak mengembangkan suatu jenis kegiatan pariwisata di suatu pulau kecil. Jika pilihannya adalah mengembangkan kegiatan pariwisata tertentu di pulau kecil, maka harus mengikuti prinsip-prinsip dan pendekatan pengembangan yang akan diuraikan pada bab-bab berikutnya.



## BAB IV

### ARAHAN PENGEMBANGAN

#### A. Penataan ruang

Permasalahan yang sering muncul di dalam pembangunan disuatu kawasan adalah tumpang tindihnya peruntukkan lahan dan atau pembangunan yang tidak mengikuti ketentuan peruntukkan lahan yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam penataan ruang pulau adalah :

1. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan tata ruang pulau melalui proses konsultatif dengan para pihak ( stakeholders )
2. Penataan ruang kawasan harus didasarkan pada hasil kulaborasi antara masukan para pihak dengan perencana kawasan
3. Penataan ruang harus memperhatikan aspek lingkungan, termasuk konservasi sumber daya alam dan sentifitas ekosistem serta aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Sesuai dengan batasan luas dalam definisi pulau-pulau kecil maka dalam implementasinya akan terdapat dua kondisi berbeda, yaitu :

1. Dimana suatu pulau seluruhnya ditetapkan sebagai kawasan pariwisata.
2. Dimana sebahagian luas pulau ditetapkan sebagai kawasan pariwisata

Bagi pulau yang secara keseluruhan ditetapkan untuk pengembangan pariwisata, maka perlu menetapkan suatu kawasan sebagai daerah lindung.

Penataan ruang akan sangat mempengaruhi penyusunan rencana kawasan pariwisata yang merupakan inti dari seluruh perencanaan pengembangan pariwisata. Salah satu aspek penting dalam perencanaan kawasan adalah penyusunan dan penetapan zonasi kawasan.

Pengertian dari zonasi adalah membagi area dalam suatu tapak kedalam beberapa area (zona) yang sesuai tata guna lahan. Penentuan zonasi dalam suatu kawasan pariwisata di pulau-pulau kecil, perlu mempertimbangkan:

- 1) Kerentanan ekosistem serta nilai keanekaragaman hayati darat dan laut;
- 2) Keterkaitan geografis, sosio-ekonomi, sosio budaya di dalam pulau dan antar pulau ;
- 3) Status kawasan ;
- 4) Penetapan pemerintah daerah tentang penataan ruang ;
- 5) Nilai sejarah dan karakteristik kawasan ;

- 6) Aksesibilitas ;
- 7) Keamanan, kebutuhan dan kenyamanan pengunjung ;
- 8) Optimalisasi potensi atraksi wisata yang tersedia ;
- 9) Akses ruang bagi masyarakat terhadap wilayah-wilayah yang menjadi kepentingan umum seperti sumber air tawar, pantai dan daerah tangkapan ikan ;
- 10) Bencana alam (natural disaster).

Jenis-jenis zonasi yang umum digunakan dalam pengembangan pariwisata adalah :

1. **Zona Intensif**, yaitu suatu kawasan yang dirancang untuk dapat menerima kunjungan dan tingkat kegiatan yang tinggi dengan memberikan ruang yang luas untuk kegiatan dan kenyamanan pengunjung. Dalam zona ini dapat dikembangkan sarana dan prasarana fisik untuk pelayanan pariwisata yang umumnya tidak melebihi 60% luas kawasan zonasi intensif dan memperhatikan daya dukung lingkungan.
2. **Zona Ekstensif**, yaitu suatu kawasan yang dirancang untuk menerima kunjungan dan tingkat kegiatan terbatas, untuk menjaga kualitas karakter sumber daya alam. Dalam zona ini kegiatan pengunjung harus dapat dikontrol dan pembangunan sarana dan prasarana terbatas hanya untuk pengunjung kegiatan, seperti jalan setapak, tempat istirahat, menara pandang, papan penunjuk dan informasi.
3. **Zona Perlindungan**, yaitu suatu kawasan yang dirancang untuk tidak menerima kunjungan dan kegiatan pariwisata. Kawasan ini biasanya merupakan kawasan yang menjadi sumber air bagi kawasan seluruh pulau, atau memiliki kerentanan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.

#### **B. Pendekatan Daya Dukung (*Carrying Capacity*)**

Daya dukung dapat diartikan sebagai kondisi maksimum suatu ekosistem untuk menampung komponen biotik (mahluk hidup) yang terkandung di dalamnya, dengan juga memperhitungkan faktor lingkungan dan faktor lainnya yang berperan di alam. Tidak ada satu ukuran mutlak yang dapat menunjukkan daya dukung ekosistem dalam menampung semua kegiatan manusia karena berbagai variabel yang menentukan. Besarnya daya dukung ekosistem tersebut sangat bervariasi dan sangat tergantung pada tingkat pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia. Kemampuan daya dukung setiap kawasan berbeda-beda sehingga perencanaan pariwisata di pulau-pulau kecil secara spatial akan bermakna dan menjadi penting.

Secara umum ragam daya dukung wisata di pulau-pulau kecil dapat meliputi :

1. Daya dukung ekologis; yang merupakan tingkat maksimal penggunaan suatu pulau.
2. Daya dukung fisik, yang merupakan jumlah maksimum penggunaan atau kegiatan yang dapat diakomodir tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas. Daya fisik diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung.
3. Daya dukung sosial, yang merupakan batas tingkat maksimum dalam jumlah dan tingkat penggunaan yang akan menimbulkan penurunan dalam tingkat kualitas pengalaman atau kepuasan pengunjung di pulau-pulau kecil.

### C. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Agar pengembangan pariwisata tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan tetap menjaga aspek keberlanjutan maka pengembangan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil harus melalui studi AMDAL / UKL-UPL. Ketentuan teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut :

1. Luas area terbangun untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari luas pulau yang diperuntukan bagi pengembangan pariwisata.
2. Garis sempadan bangunan dan sempadan pantai harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali untuk pembangunan bungalow atas air (*water bungalow*) yang telah di setujui berdasarkan studi AMDAL.
3. Bangunan akomodasi menghadap ke arah pantai dan tidak dihalangi oleh bangunan lain.
4. Ketinggian bangunan disesuaikan dengan luasan pulau dan karakteristik lingkungan pulau.
5. Gaya arsitektur dan bahan bangunan untuk pembangunan sarana wisata disarankan mencerminkan identitas lokal dan ramah lingkungan.
6. Pembuatan sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan.
7. Pembangunan fasilitas bungalow atas air (*water bungalow*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Fondasi bungalow tidak merusak gugusan terumbu karang hidup.
  - b. Tinggi bungalow maksimum 1 (satu) lantai.

- c. Jumlah kamar bungalow atas air harus didasarkan pada perhitungan daya dukung lingkungan.

8. Pembangunan pendaratan/tambat kapal (*jetty*) dan *mooring buoy* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak dibangun di atas terumbu karang hidup.
- b. Fondasi bangunan tambat kapal tidak merusak gugusan terumbu karang hidup.

#### D. Pengelolaan Lingkungan

Pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus direncanakan dan dikembangkan secara ramah lingkungan dengan tidak menghabiskan atau merusak sumber daya alam dan sosial, namun dipertahankan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Identifikasi ekosistem kritis (*critical ecosystem*) serta penentuan ambang batas (*carrying capacity*) pulau-pulau kecil sangat penting dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata dengan pendekatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

##### 1. Sasaran Pengelolaan

Pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus memperhatikan:

- a) Terjaminnya keberlanjutan sumber daya pendukung pembangunan pariwisata di pulau-pulau kecil sebagai satu syarat penting bagi terciptanya manajemen pariwisata yang memadai dan handal.
- b) Pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia. kegiatan pariwisata harus menjamin perubahan yang dapat diterima sehubungan dengan pengaruhnya terhadap sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan kapasitas untuk mengelola berbagai dampak dan residu yang ditimbulkan.

##### 2. Langkah Pengelolaan

Dalam upaya mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, maka pengelolaan lingkungan di pulau-pulau kecil dilakukan dengan langkah penerapan sebagai berikut :

- a) Pengelolaan limbah :
  - 1) melaksanakan pengelolaan limbah padat dan cair yang berasal dari kegiatan pariwisata agar tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

- 2) Pengelolaan limbah padat dan cair dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R yaitu Reduce (reduksi), Reuse (penggunaan kembali), dan Recycle (daur ulang).
- 3) Pada daerah dengan kawasan gugusan pulau, dapat menetapkan satu pulau kosong yang memungkinkan untuk tempat pengolahan limbah, sesuai kapan AMDAL

**b) Pengelolaan Air Tawar:**

- 1) Penggunaan air tawar dilakukan dengan memperhatikan konservasi air yang tersedia di pulau, serta akses masyarakat terhadap kebutuhan air tawar.
- 2) Dianjurkan agar mengembangkan sistem pengolahan air laut menjadi air tawar.

**c) Pelestarian Flora dan Fauna :**

Melakukan upaya menjaga dan memelihara flora, fauna serta terumbu karang, disekitar pulau dengan :

- 1) Pengawasan dan pengamanan sumber daya kelautan sekitar pulau dari kegiatan yang dapat merusak dan mengurangi populasinya.
- 2) Merencanakan dan melaksanakan program perlindungan dan pemeliharaan flora, fauna dan terumbu karang.
- 3) Tidak memasukkan jenis flora dan fauna yang berasal dari luar pulau tanpa seijin instansi yang berwenang.
- 4) Tidak menggunakan karang, sebagai bahan bangunan untuk sarana dan prasarana di pulau.

**d) Pelestarian Pesisir:**

- 1) Tidak melakukan pengerukan, reklamasi dan atau melakukan kegiatan yang dapat merubah kondisi pantai dan pola arus laut.
- 2) Tidak melakukan pengambilan atau pengerukan pasir baik di daratan maupun di perairan pulau.
- 3) Semua pembangunan di pesisir harus didasarkan pada studi AMDAL/UPL/UKL.

**3. Peran serta Masyarakat**

Pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus melihatkan peran aktif masyarakat sejak awal proses pengembangan pariwisata. Hal ini sejalan dengan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ( Community Based Tourism Development). Peningkatan

peran serta masyarakat dilakukan antara lain dengan

- a) Memprioritaskan petuang kerja dan usaha bagi masyarakat lokal.
- b) Membantu peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat antara lain melalui program pelatihan untuk menunjang usaha pariwisata.
- c) Membangun hubungan kemitraan antara pengusaha dan masyarakat dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil produk lokal.
- d) Mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati di antara pengusaha dan masyarakat.
- e) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanamkan modal melalui kepemilikan saham perusahaan.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil merupakan suatu pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan sosial, lingkungan, dan pelayanan tidak saja kepada wisatawan, tetapi juga kepada masyarakat lokal pulau. Dalam pengertian yang lebih umum, partisipasi mengarah pada pemberdayaan masyarakat lokal dalam menentukan tujuan pembangunannya dan memahami harapan serta fokus perhatian mereka terhadap pariwisata. Pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil harus mendukung budaya tradisional dengan menunjukkan penghargaan dan penghormatan nilai agama, adat istiadat masyarakat setempat.

#### 4. Pengusaha

Pengusahaan pariwisata di pulau-pulau kecil adalah pemanfaatan pulau kecil untuk kegiatan dan pengelolaan pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Pengusahaan pariwisata di pulau-pulau kecil harus berbentuk Badan Hukum Indonesia dan terbuka untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b) Ijin prinsip pengusahaan pariwisata di pulau-pulau kecil diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- c) Ijin penanaman modal di pulau-pulau kecil diberikan oleh BKPM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1) Untuk satu atau beberapa pulau tidak berpenghuni yang sangat kecil dan berdekatan, memungkinkan untuk mengembangkannya menjadi kawasan wisata yang dikelola satu manajemen tertentu:

- 2) Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di pulau kecil dilakukan berdasarkan perencanaan tapak kawasan (site plan) pulau yang telah di setujui Pemerintah Daerah.

d) Pengusahaan pariwisata di pulau-pulau kecil wajib

- 1) Menghormati nilai-nilai agama, adat istiadat dan tata nilai masyarakat di pulau dan sekitar pulau ;
- 2) Menyediakan pemondokan, sarana ibadah dan kebutuhan lainnya bagi karyawan yang tinggal pulau;
- 3) Metarang segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan perjudian, prostitusi dan peidagangan narkoba di area pengusahaannya dan daerah sekitar;
- 4) Membuka akses perairan sekitar pulau untuk masyarakat lokal;
- 5) Menyediakan fasilitas dan tenaga yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) sesuai dengan standar yang beriak.



## PENGEMBANGAN INVESTASI

Investasi pariwisata di pulau-pulau kecil dapat dilakukan dalam bentuk:

1. **Investasi Langsung**

Pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil sepenuhnya dilakukan oleh suatu Badan Usaha tanpa keikutsertaan Badan Usaha lain. Pengelolaan bersifat murni dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui BUMU maupun melalui badan Usaha Milik Swasta.

2. **Kerjasama Badan Usaha**

Pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil dilakukan melalui kerjasama pengelolaan antara Badan Usaha, baik Badan Usaha Pemerintah Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Swasta. Kerjasama Badan Usaha tersebut dapat berbentuk kerjasama usaha patungan (*Joint Venture*), Kerjasama Operasi (*Joint Operation*), dan Bangui) Operasi Serahkan (*Build Operation Transfer/BOT*)

Badan Usaha yang berminat untuk mengembangkan pariwisata di pulau-pulau kecil harus mengajukan suatu proposal kepada Pemerintah Daerah. Proposal memuat antara lain:

- a. Profit Perusahaan;
- b. Jenis usaha pariwisata yang akan dikembangkan;
- c. Hasil Studi Kelayakan;
- d. Hasil Studi AMUAL;
- e. Rencana Bisnis;
- f. Program Pemherdayaan Masyarakat;
- g. Program Pelestarian Lingkungan.

3. Untuk mendorong investasi pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil Pemerintah Daerah perlu:

- a. Memberikan Insentif-insentif investasi dalam bentuk fiskal dan keringanan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Memberikan kemudahan perijinan dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan efisien;
- c. Memberikan kepastian dan keamanan berinvestasi dengan menetapkan kejelasan status pulau yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- d. Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berinvestasi dengan menghilangkan atau setidak-tidaknya meminimalisasi timbulnya konflik antar pihak di lingkungan pulau kecil;

- e. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui pengkayaan jenis balian-bahan promosi, peningkatan kerjasama promosi serta peristiwa (*event*) promosi.
- f. Mempercepat pembangunan dan penyediaan infrastruktur penunjang investasi di pulau-pulau kecil.
- g. Mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan menunjang antara pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) usa besar.



## B A B V I

### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

- 1 Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pihak dalam pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil, Pemerintah Daerah perlu membentuk suatu kelembagaan yang bersifat kolaboratif dengan beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat, dengan tugas pokok:
  - a. Mengarahkan pelaksanaan pengembangan pariwisata di pulau kecil agar sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang ditentukan
  - b. Mengkoordinasikan kebijakan Pemerintah Pusat c.q. Menteri dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata di pulau kecil.
  - c. Menetapkan kebijakan yang dapat mendorong pengembangan pariwisata di pulau kecil dengan mengintegrasikan kepada kebijakan Pemerintah Pusat.
  - d. Melakukan penilaian terhadap investasi pengembangan Pariwisata di pulau kecil.
  - e. Melakukan pengendalian dan pengawasan.
  
2. Dalam rangka pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan meliputi:
  - a. Memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata di pulau-pulau kecil.
  - b. Melakukan koordinasi lintas sektor agar tercipta sinkronisasi program dan kegiatan dalam mendukung pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil.
  - c. Memfasilitasi upaya kegiatan promosi investasi pariwisata di pulau-pulau kecil.
  - d. Pemantauan dan evaluasi kegiatan.



## VII. PENUTUP

Pedoman umum ini merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota dalam merencanakan, mengembangkan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan pariwisata di pulau-pulau kecil.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 30 Nopember 2004

MENTERIKEBUDAYAANDANPARIWISATA

